



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN PULAU-PULAU
KECIL TERLUAR (PPKT) MELALUI PENYUSUNAN
BASIS DATA (*DATABASE*) BATAS MARITIM DAN PPKT
DI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**

Disusun oleh:

Nama	: Siti Metrianda Akuan
N I P	: 196709202000032001
Jabatan	: Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara
Instansi	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan B N P P
Kelas/Kelompok	: B/VI
Nomor Daftar Hadir	: 31
Angkatan	: XXVIII

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 202**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

FORM PERSETUJUAN MENTOR


NAMA PESERTA : **SITI METRIANDA AKUAN, S.T., M.Si.**
NDH : 31
INSTANSI : **BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**

NAMA MENTOR : **DR. ROBERT SIMBOLON, MPA.**
NIP : 19640828 198503 1 002
JABATAN : **DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
NEGARA**
NO. HP. MENTOR :
GAGASAN PERUBAHAN : **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM
DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT)
MELALUI PENYUSUNAN BASIS
DATA (DATABASE) BATAS MARITIM DAN PPKT DI
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN ”**

Disetujui oleh
Mentor.

**Dr. Robert Simbolon, MPA.
Pembina Utama /(IV/e)
NIP. 196408281985031012**

FORMULIR PERSETUJUAN COACH

1. Nama Peserta	: Siti Metrianda Akuan, S.T, M.Si.
2. Instansi	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan
3. Gagasan Perubahan	“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) MELALUI PENYUSUNAN BASIS DATA (DATABASE) BATAS MARITIM DAN PPKT DI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN”
Catatan terhadap Hasil Implementasi Proyek Perubahan Peserta	
	
Rekomendasi 	

Jakarta, 6 Desember 2022

Coach



Drs. H. Machmudan, M.Si
 Pembina Utama Muda / (IV/c)
 NIP. 19710305199202100

LEMBAR PERSETUJUAN PROYEK PERUBAHAN

JUDUL : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) MELALUI PENYUSUNAN BASIS DATA (DATABASE) BATAS MARITIM DAN PPKT DI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

NAMA : SITI METRIANDA AKUAN
NIP : 196709202000032001
PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA UTAMA MUDA/ IV(c)
INSTANSI : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
JABATAN : ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA
WILAYAH LAUT DAN UDARA
KELAS/KELOMPOK : B/VI
NOMOR DAFTAR HADIR : 31

Disetujui diseminarkan Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII pada tanggal 6 Desember 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta, 7 Desember 2022

Coach



Drs. H. Machmudan, M.Si
Pembina Utama Muda /(IV/c)
NIP. 197103051992021002

Mentor



Dr. Robert Simbolon, MPA
Pembina Utama /(IV/e)
NIP. 196408281985031012

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen
Kepemimpinan



Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

BERITA ACARA

SEMINAR PROYEK PERUBAHAN

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Desember 2022
Pukul :
Tempat : BPSDM Kementerian Dalam Negeri

Telah diseminarkan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

JUDUL : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) MELALUI PENYUSUNAN BASIS DATA (*DATABASE*) BATAS MARITIM DAN PPKT DI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DISUSUN OLEH : Siti Metrianda Akuan
JABATAN : Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara

KELAS/KELOMPOK : B/VI
NOMOR DAFTAR HADIR : 31

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, *Mentor*, dan *Coach*.

Coach



Drs. H. Machmudan, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197103051992021002

Peserta



Siti Metrianda Akuan, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196709202000032001

Penguji



Dr. Rochayati Basra, M.Pd.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196710312001122001

Mentor



Dr. Robert Simbolon, MPA.
Pembina Utama / (IV/e)
NIP. 196408281985031012

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan



Mohammad Rizal, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

RINGKASAN

Program digitalisasi merupakan aspek yang sedang giatnya dilakukan pada masa reformasi birokrasi saat ini. Perkembangan teknologi memicu integrasi data dalam sistem komputer yang tentunya lebih efisien dan efektif dibanding sistem konvensional. Penghimpunan data yang dilakukan Keasdepan Taslaud masih belum dikoordinasikan sempurna, dan masih memakai sistem konvensional. Dengan begitu perlu dibentuk suatu sistem basis data/*database* daring yang dapat menghimpun pendataan dan penyimpanan semua data tersebut. Dengan adanya pendataan terintegrasi dengan aplikasi daring maka visualisasi informasi maritim dan pemetaan Pertahanan Laut Strategis dapat dilakukan dengan mudah.

Dalam pembahasan Proyek Perubahan ini, ruang lingkup materi substansi koordinasi meliputi koordinasi di Kedeputan Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, pada tugas pokok Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (Taslaud), khususnya ruang lingkup Koordinasi Pengelolaan Batas Negara di Wilayah Laut atau Batas Maritim. Sebelum melaksanakan Proyek Perubahan, sudah dikaji Rencana Proyek Perubahan yang meliputi penjelasan detail latar belakang, tujuan Proyek Perubahan. Tujuan umum proyek perubahan yaitu membangun sistem digitalisasi dalam sistem penyimpanan, penyebaran informasi, pengarsipan di wilayah Keasdepan Taslaud, dengan tujuan utama membangun basis data pada data identifikasi sarpras hankam PPKT dan informasi Progres Batas Maritim Indonesia.

Pelaksanaan proyek perubahan memiliki tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pada pembahasan proyek perubahan ini dominan membahas progres yang sudah dilakukan pada jangka pendek, juga sedikit penjelasan mengenai rencana pelaksanaan capaian tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Adapun capaian untuk *output* jangka pendek sudah terpenuhi dengan teridentifikasi sarpras dasar di 49 PPKT Tidak Berpenduduk sesuai Amanat RPJMN 2020-2024 dalam suatu publikasi buku digital, juga sudah dilakukan pengkajian, pengumpulan informasi aktual Progres Batas Maritim dalam buku digital. Hasil akhir *output* jangka pendek berupa basis data sederhana untuk data PPKT dan Batas Maritim. Visualisasi basis data menggunakan media interaktif Google Data Studio yang menampilkan informasi spasial PPKT yang otomatis diperbaharui dengan basis data daring yang telah dibuat. Rencana pengembangan dari Proyek Perubahan akan meneruskan kepada capaian jangka menengah dan jangka panjang yaitu terpenuhinya semua data terkait semua PPKT dan terbentuk Sistem Informasi BWN-KP Batas Maritim – SIBATIM

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warakhmatulahi Wabarokatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena atas karuniaNya penulis dapat menyelesaikan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II untuk jangka waktu pendek yang mengambil judul “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) MELALUI PENYUSUNAN BASIS DATA (*DATABASE*) BATAS MARITIM DAN PPKT DI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN”.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Robert Simbolon, MPA., selaku **Mentor** sekaligus Pimpinan dan Guru kami yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Proper ini serta kepada Bapak Drs. H. Machmudan, M.Si. selaku **Coach** yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan dalam penulisan Proper serta memotivasi dalam penyelesaiannya.

Akhir kata penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Keasdepan Taslaud BNPP atas dukungannya serta seluruh Pejabat, Pengajar (WI) dan Staf BPSPDM yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, sebagai Tim Pendukung PKN II Angkatan XXVIII yang solid dan sangat profesional dalam menjalankan tugas, kami sungguh menghargai semua bantuan, bimbingan dan ketulusan bapak/ibu sekalian.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Berkah dan RahmatNya kepada kita sekalian serta menjadikan segala kebaikan yang kita perbuat sebagai catatan amal ibadah bagi kita semua. Aamiin Yaa Rabb.

Wabillahirraufiqwalhidayah Wassalamualaikum Warakhmatullahiwabarakatuh.

Jakarta, 7 Desember 2022
Peserta



Siti Metrianda Akuan, S.T., M. Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670920200003200

DAFTAR ISI

FORM PERSETUJUAN MENTOR	ii
FORMULIR PERSETUJUAN <i>COACH</i>	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PROYEK PERUBAHAN	iv
BERITA ACARA	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SKEMA	xiii
BAB I RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN.....	1
A. PENDAHULUAN.....	1
B. LATAR BELAKANG	2
C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN	10
D. <i>OUTPUT</i> (KELUARAN) DAN <i>OUTCOME</i> (HASIL/MANFAAT).....	13
1) <i>OUTPUT</i> JANGKA PENDEK (SEPT-NOV 2022)	13
2) <i>OUTPUT</i> JANGKA MENENGAH (DES 2022-DES 2023).....	14
3) <i>OUTPUT</i> JANGKA PANJANG (JAN 2024-DES 2024)	14
4) <i>OUTCOME</i>	15
E. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS	15
1) TUJUAN JANGKA PENDEK	15
2) TUJUAN JANGKA MENENGAH.....	15
3) TUJUAN JANGKA PANJANG	16
F. DEKSRIPI SI PROYEK PERUBAHAN	17
G. RENCANA STRATEGI <i>MARKETING</i>	21
H. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSI	30
I. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	31
J. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN	32
K. PERSETUJUAN PROJECT SPONSOR.....	32
L. RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	32

BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	34
A. DASAR TEORI PROYEK PERUBAHAN	34
1) URGENSI BASIS DATA (DATABASE)	34
2) SARANA DAN PRASARANA PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI PPKT	37
3) URGENSI DAN PROGRES BATAS MARITIM INDONESIA	39
B. CAPAIAN TUJUAN PROYEK PERUBAHAN JANGKA PENDEK	46
1) IDENTIFIKASI DAN EVALUASI SARPRAS DASAR PPKT	46
2) PEMBUATAN BUKU DIGITAL HASIL SURVEI PPKT	49
3) PEMBUATAN BUKU DIGITAL TENTANG PROGRES BATAS MARITIM	50
4) DIGITALISASI DATA PPKT DALAM BASIS DATA	52
5) DIGITALISASI DATA PROGRES BATAS MARITIM DALAM BASIS DATA	54
6) VISUALISASI INFORMASI PADA BASIS DATA PPKT	55
7) VISUALISASI INFORMASI PADA BASIS DATA BATAS MARITIM	57
8) KOORDINASI K/L DALAM PEMBANGUNAN BASIS DATA PPKT	58
9) KOORDINASI K/L DALAM PEMBANGUNAN BASIS DATA BATAS MARITIM ..	66
10) PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN	70
C. RENCANA TINDAK LANJUT PROYEK PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG.....	71
1) PEMBANGUNAN BASIS DATA TINGKAT LANJUT	71
2) PENGGUNAAN EKOSISTEM DIGITAL BERBASIS SISTEM TERPADU	73
3) RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BWN-KP BATAS MARITIM – SIBATIM.....	75
BAB III PENUTUP	77
A. LESSON LEARNT	77
B. KESIMPULAN.....	78
C. SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81
LAMPIRAN.....	85
1. ANALISIS SWOT INTERNAL.....	85
2. ANALISIS SWOT EKSTERNAL	89
3. TABEL BASIS DATA PPKT VERSI SEMENTARA	95
4. TABEL BASIS DATA BATAS MARITIM VERSI SEMENTARA	100
5. BERKAS RAPAT BASIS DATA 25 OKTOBER 2022	105

5.1 UNDANGAN PESERTA.....	105
5.2 UNDANGAN NARASUMBER	108
5.3 DAFTAR HADIR PESERTA.....	111
5.4 DAFTAR HADIR NARASUMBER	112
5.5 NOTA DINAS HASIL RAPAT	113
6. BERKAS RAPAT BASIS DATA 26 OKTOBER 2022	116
6.1 UNDANGAN PESERTA	116
6.2 UNDANGAN NARASUMBER	119
6.3 DAFTAR HADIR PESERTA.....	122
6.4 DAFTAR HADIR NARASUMBER	124
6.5 NOTA DINAS HASIL RAPAT	125
7. BERKAS RAPAT BASIS DATA 28 OKTOBER 2022	131
7.1 UNDANGAN PESERTA.....	131
7.2 UNDANGAN NARASUMBER	134
7.3 DAFTAR HADIR PESERTA.....	137
7.4 DAFTAR HADIR NARASUMBER	139
7.5 NOTA DINAS HASIL RAPAT	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Batas Wilayah NKRI	2
Gambar 2 Analisis SWOT	28
Gambar 3 Bentuk Dasar Basis Data	35
Gambar 4 Buku Digital Hasil Survei PPKT Edisi 2022	49
Gambar 5 Surat Hasil Survei Sarpras Hankam ke K/L terkait	50
Gambar 6 Cover buku digital Batas Maritim	51
Gambar 7 Isu Terbaru Batas Maritim Indonesia - Vietnam	51
Gambar 8 Basis Data Awal Survei PPKT	52
Gambar 9 Penggunaan Google Drive dalam Penyimpanan Online	53
Gambar 10 Menghubungkan Data Google Drive ke Basis Data	53
Gambar 11 Basls Data Batas Maritim	54
Gambar 12 Visualisasi Basis Data PPKT di Google Data Studio	56
Gambar 13 Dashboard Analisis Sarpras di 49 PPKT	57
Gambar 14 Tampilan <i>Dashboard</i> Batas Maritim Indonesia	58
Gambar 15 Undangan Rapat Basis Data 25 Oktober 2022	59
Gambar 16 Daftar Hadir Rapat Basis Data 25 Oktober 2022	60
Gambar 17 Daftar Hadir Narasumber Rapat Basis Data, 25 Oktober 2022	60
Gambar 18 Asdep membuka Rapat Basis Data Hari Pertama, 25 Oktober 2022	61
Gambar 19 Pemaparan Materi oleh Narasumber	61
Gambar 20 Undangan Rapat Basis Data PPKT Lanjutan, 26 Oktober 2022	63
Gambar 21 Asdep Taslaud membuka Rapat Basis Data Hari Kedua, 26 Oktober 2022	64
Gambar 22 Daftar Hadir Narasumber Rapat 26 Oktober 2022	64
Gambar 23 Daftar Hadir Peserta Rapat Basis Data PPKT 26 Oktober 2022	64
Gambar 24 Pemaparan Materi dari Ditjen Kepelabuhan Kemhub	65
Gambar 25 Undangan Peserta Rapat Basis Data Batas Maritim, 28 Oktober 2022	67
Gambar 26 Rapat Basis Data Batas Maritim dipimpin oleh Asdep Taslaud	68
Gambar 27 Pemaparan Materi dari Ditjen HPK, Kemlu	68
Gambar 28 Daftar Hadir Peserta Rapat Basis Data Batas Maritim, 25 Oktober 2022	69
Gambar 29 Daftar Hadir Narasumber Rapat Basis Data Batas Maritim, 25 Oktober 2022	69
Gambar 30 Dashboard COVID dengan Data Kuantitatif Berubah Setiap Periode Waktu	72
Gambar 31 Penggunaan DBMS dan DLA SQL	72
Gambar 32 Penggunaan Ekosistem Google, Google Calender untuk Penyebaran Informasi ...	73
Gambar 33 Penggunaan Google Chat untuk Workspace Efektif	74
Gambar 34 Sistem Informasi Maritim Tingkat Lanjut pada K/L terkait	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikasi Target RPJMN 2020-2024	7
Tabel 2 Kendala Koordinasi Identifikasi 49 PPKT Tidak Berpenduduk	10
Tabel 3 <i>Output</i> Jangka Pendek Proyek Perubahan	13
Tabel 4 <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dari Proyek Perubahan	15
Tabel 5 Linimasa Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Sarpras di PPKT Tidak Berpenduduk	16
Tabel 6 Analisis <i>Stakeholder</i>	23
Tabel 7 Tabel Hasil Analisis SWOT pada BNPP	29
Tabel 8 Batas Maritim Indonesia dan negara tetangga	40
Tabel 9 Perjanjian Garis Batas Maritim dengan negara tetangga	44
Tabel 10 Progress Survei ke 49 PPKT	48

DAFTAR SKEMA

Skema 1 Struktur BNPP	4
Skema 2 Skema Ruang Lingkup Deputi 1 Pada SETTAP BNPP	6
Skema 3 Alur Pikir.....	9
Skema 4 Timeline Alur Kerja	12
Skema 5 Tahapan Penyusunan Database PPKT dan Batas Maritim.....	19
Skema 6 Diagram Alir Pembuatan <i>Database</i> PPKT dan Batas Maritim	20
Skema 7 Diagram <i>Marketing</i> Proyek Perubahan (Proper)	22

BAB I RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17.508 gugusan pulau dan terdapat 111 PPKT yang berhadapan langsung dengan negara tetangga yang mempunyai nilai yang strategis dari sisi pertahanan keamanan (Hankam) dan dengan luas wilayah yang berpotensi besar mengandung sumber daya alam. Keppres Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap pentingnya PPKT untuk menjaga keutuhan kedaulatan NKRI. Pulau-pulau kecil tersebut mengemban misi politik yang sangat penting bagi negara, dimana di kawasan tersebut terdapat Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR) sebagai penentu batas kedaulatan dan yurisdiksi perairan Indonesia. Disisi lain lokasi yang berada di perbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan kawasan tersebut sangat strategis dari aspek ideologi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Permasalahan utama yang terjadi di PPKT saat ini adalah : keterisolasian letak yang jauh dan sulit dijangkau dari lokasi pemerintahan serta keterbatasan/tidak terdapat sarana-prasarana seperti: sarana transportasi menuju PPKT, sarana komunikasi, dermaga/jeti untuk berlabuh, tanggul laut, *break water* dan sarpras lainnya yang dibutuhkan di PPKT untuk mendukung keberadaan PPKT itu sebagai penentu batas kedaulatan dan yurisdiksi batas laut NKRI;

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, membutuhkan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan serta pengawasan dan pengendalian secara terus menerus, khususnya dalam Pembangunan Sarana Prasarana di PPKT tidak berpenduduk sehingga efektivitas Pengelolaan PPKT dapat optimal dan otomatis akan sangat mendukung kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang memberi mandat kepada BNPP untuk melaksanakan koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan sarana prasarana hankam non alutsista di 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk. Pemilihan 49 PPKT Tidak Berpenduduk merupakan prioritas keamanan yang diamanatkan kepada BNPP

dikarenakan 49 PPKT tersebut berbatasan langsung dengan batas maritim negara tetangga. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pulau dilakukan koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di PPKT Tidak Berpenduduk dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah setempat.

Salah satu strategi pelaksanaan pertahanan dan keamanan wilayah laut dilakukan melalui upaya pengembangan Sistem Pertahanan dan Keamanan Laut di Kawasan Laut Strategis Berbasis PPKT. Dalam melaksanakan Pertahanan Laut dan Keamanan tersebut di Kawasan Perbatasan dilakukan dengan berbasis pemetaan Kawasan laut strategis yang menghasilkan pengelompokan (regionalisasi) kawasan laut yang rentan terhadap ancaman kedaulatan. Pada langkah strategis membutuhkan data atau informasi terkini mengenai PPKT tersebut.

Penghimpunan data yang dilakukan Keasdepan Taslaud masih belum dikoordinasikan sempurna, dan masih memakai sistem konvensional. Semua data survei seperti data perjalanan dinas ke PPKT, data koordinasi dengan Pemerintah Daerah, data progres perjanjian batas maritim dan sebagainya masih terhimpun dalam suatu sistem *hardware* berupa *hardisk/flashdisk*. Faktor lain selalu didapat kasus penyimpanan rentan akan rusak dan malware/virus. Dengan begitu perlu dibentuk suatu sistem basis data/database daring yang dapat menghimpun pendataan dan penyimpanan semua data tersebut. Dengan adanya pendataan terintegrasi dengan aplikasi daring maka visualisasi informasi mengenai PPKT dan pemetaan Pertahanan Laut Strategis dapat dilakukan dengan mudah.

B. LATAR BELAKANG



Gambar 1 Peta Batas Wilayah NKRI

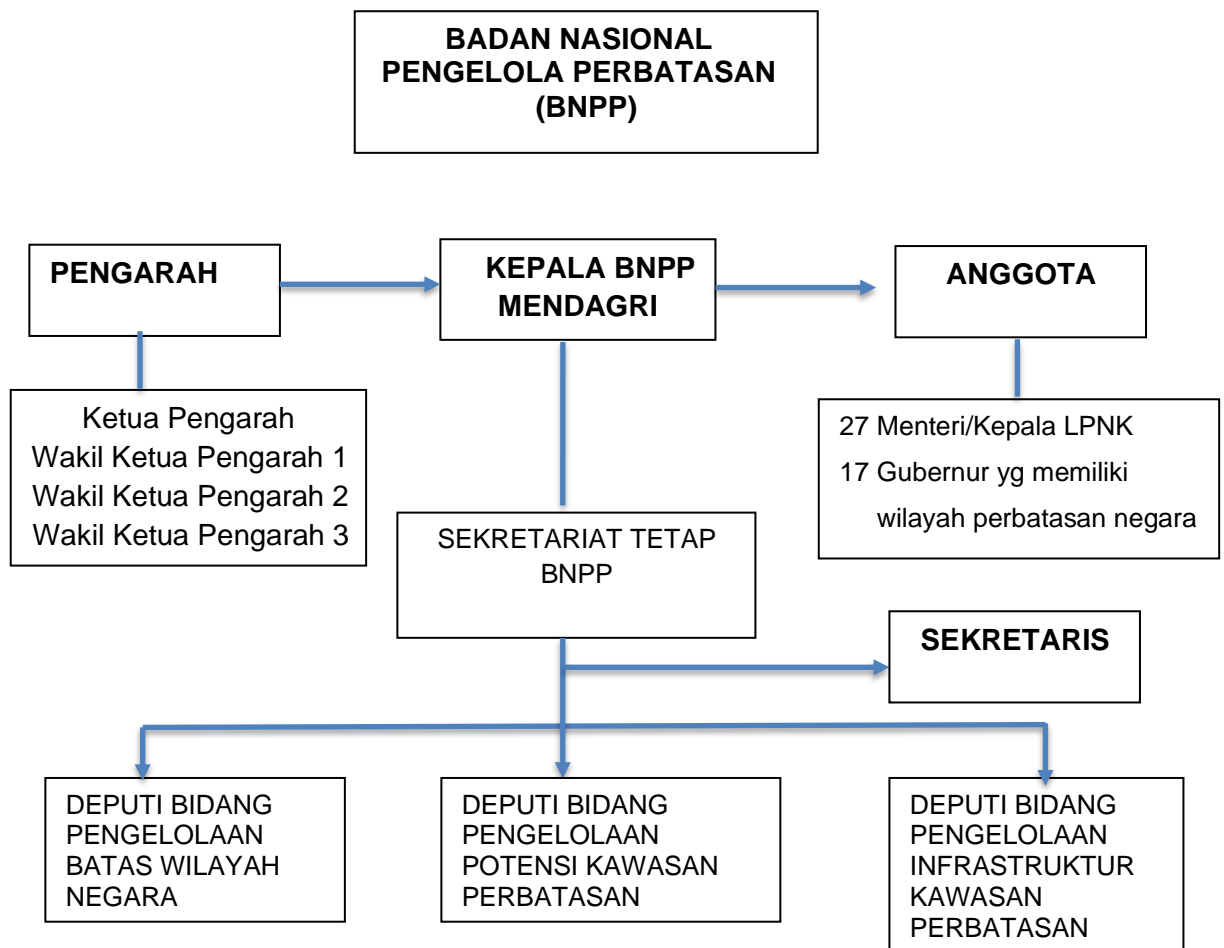
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis seperti pada **Gambar 1**, membentang dari Barat ke Timur diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dengan jumlah PPKT yang tersebar di seluruh Indonesia serta memiliki:

- (1) Batas Darat dengan 3 Negara, yaitu: Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini dengan panjang batas darat dengan ketiga negara adalah ± 3.151 km,
- (2) Batas Laut dengan 10 Negara, yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia, dengan panjang garis pantai batas laut adalah ± 99.093 km
- (3) Luas wilayah baik darat dan perairan adalah seluas 8.300.000 km² (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)

Sebagaimana Amanah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola serta membangun Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Badan Pengelola daerah. Badan Pengelola bertugas:

- a. Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
- b. Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Struktur BNPP digambarkan pada **Skema 1** berikut:



Skema 1 Struktur BNPP

Keterangan:

1. Ketua Pengarah: Menko. Bidang Polhukam
2. Wakil Ketua Pengarah I: Menko. Bidang Perekonomian
3. Wakil Ketua Pengarah II: Menko. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Wakil Ketua Pengarah III: Menko. Bidang Kemaritiman dan Investasi

Dengan Anggota terdiri dari:

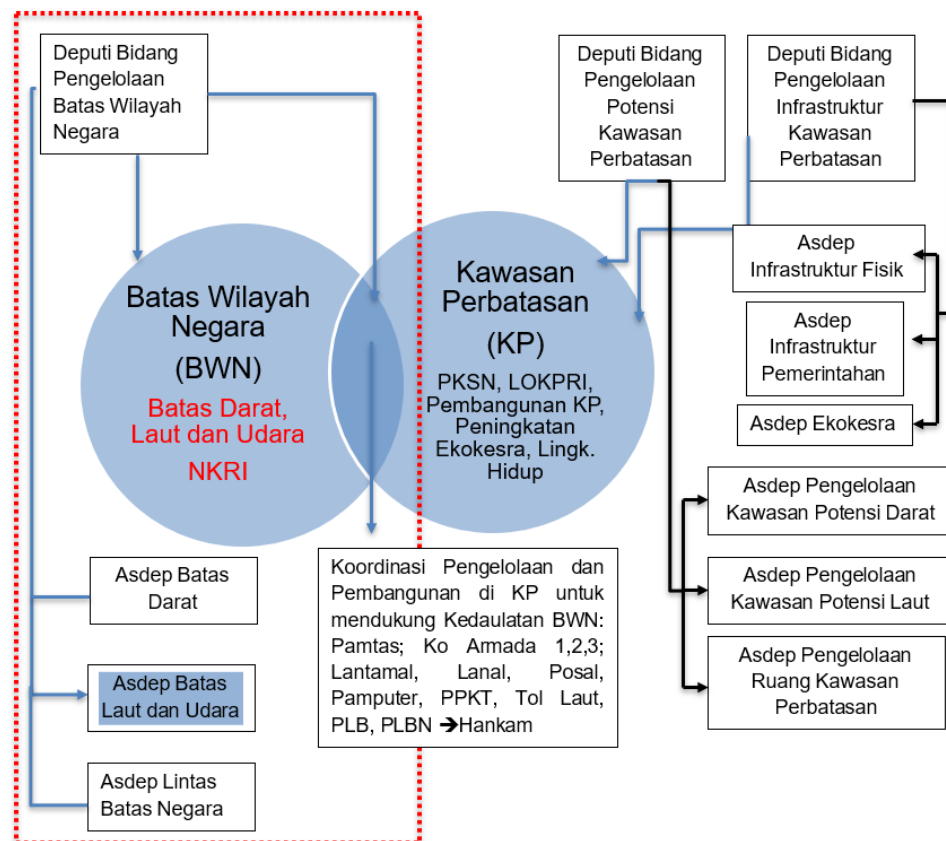
1. Menteri Luar Negeri
2. Menteri Pertahanan
3. Menteri Hukum dan Ham
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek
6. Menteri Kesehatan

7. Menteri Perindustrian
8. Menteri Perdagangan
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Menteri PUPR
11. Menteri Perhubungan
12. Menteri Kominfo
13. Menteri Pertanian
14. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15. Menteri Kelautan dan Perikanan
16. Menteri Desa/PDTT
17. Menteri ATR/BPN
18. Menteri PPN/BAPPENAS
19. Menteri BUMN
20. Menteri KUKM
21. Panglima TNI
22. Kepala POLRI
23. Kepala BIN
24. Kepala BNN
25. Kepala BIG
26. Kepala BNPT
27. Kepala BAKAMLA
28. 17 Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan negara.

Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, diperlukan perbatasan negara yang kuat dan tangguh. Pemerintah memberikan komitmen terhadap hal tersebut melalui kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk itu peran strategis wilayah negara dan Kawasan Perbatasan negara, harus dapat berkontribusi untuk memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan sebagai bagian dari ketahanan nasional dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan perbatasan sebagai beranda depan negara. Tanggung jawab atas pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara, mulai dari Batas Wilayah Negara (BWN), pulau-pulau kecil terluar (PPKT) sampai Kawasan Perbatasan (KP), dilakukan secara koordinatif (koordinasi) baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam UU Wilayah Negara. Koordinasi dimaksud dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, adalah koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terarah,

terpadu, dan sistematis mengacu pada Perpres 118 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan (RENDUK) dalam rangka terciptanya pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang holistik, integratif, tematik, berbasis spasial.

Dalam pembahasan Proyek Perubahan ini, ruang lingkup materi substansi koordinasi meliputi koordinasi di Kedeputan Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, pada tugas pokok Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, khususnya ruang lingkup Koordinasi Pengelolaan Batas Negara di Wilayah Laut atau Batas Maritim. Memperhatikan nomenklatur Kedeputan 1, Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (BWN) domain tugas kedeputan ini adalah Pengelolaan di BWN, namun demikian di Kawasan Perbatasan juga tugas-tugas Kedeputan satu merupakan tugas-tugas penting, yang sangat vital bagi eksistensi Kedaulatan NKRI. **Skema 2** berikut menjelaskan hal-hal tersebut.



Skema 2 Skema Ruang Lingkup Deputy 1 Pada SETTAP BNPP

Dalam pengelolaan BWN-KP, Undang-undang Wilayah Negara mengamankan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan (monev). Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP telah menyusun Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 (Perpres No. 118 Tahun 2022) dan menetapkan Renaksi Pengelolaan BWN-KP.

Di dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 disusun dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Strategi pelaksanaan, subbidang Pertahanan Wilayah Laut, adalah: Membangun Sistem Pengawasan Maritim dan Sistem Keamanan Laut Nasional Terintegrasi, mendorong terbentuknya Pengaturan mengenai Keamanan Laut dan Mengembangkan Sistem Pertahanan Laut di Kawasan Laut Strategis Berbasis PPKT, hal ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024.

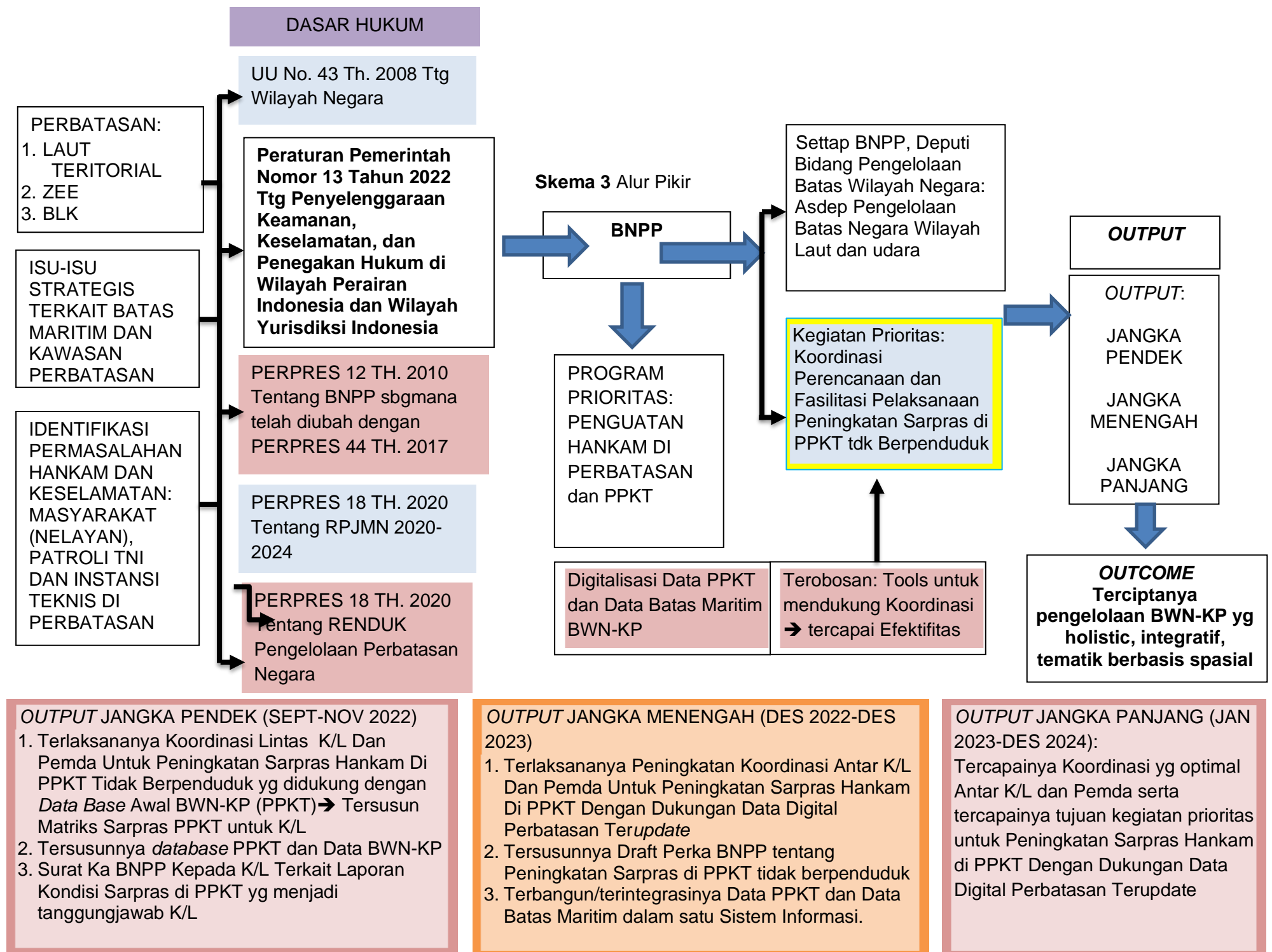
Dalam RPJMN 2020-2024, Asdep Batas Laut dan Udara mendapat amanah Program Prioritas Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar (PPKT) dengan Kegiatan Prioritas Koordinasi Perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di PPKT Tidak Berpenduduk. Indikator dalam kegiatan ini adalah Jumlah PPKT yang ditingkatkan Sarana Prasarana Pertahanan Keamanannya (Sarpras Hankam) dengan indikasi target jumlah PPKT yang menjadi lokus koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana prasarana di PPKT tidak berpenduduk sebagai berikut pada **Tabel 1**:

Tabel 1 Indikasi Target RPJMN 2020-2024

INDIKASI TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
36 PPKT	41 PPKT	49 PPKT	49 PPKT	49 PPKT

Karena alasan kondisi pandemi Covid-19 dan tidak tersedianya anggaran (karena *refocusing* anggaran) kegiatan ini baru dimulai pada TA 2021.

Pengelolaan dan Pembangunan BWN-KP memerlukan manajemen pengelolaan Kawasan Perbatasan yang menyeluruh (holistik) dengan data yang meliputi berbagai sektor/lintas K/L dan Pemda, terkoordinasi dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, seluruh data BWN-KP baik data hasil koordinasi maupun data hasil survei/kunjungan ke lapangan harus terinventaris sistematis, sehingga tahapan koordinasi dapat termonitor dan terlaksana dengan baik. Inventarisasi data dapat dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan TIK sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas. dengan mengoptimalkan koordinasi melalui Rakor Intensif, FGD dan menyurati Pimpinan tertinggi K/L serta meningkatkan efektivitas koordinasi dengan dukungan data digital. Alur pikir kegiatan Proyek Perubahan ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN

Sesuai Perpres PERPRES 18 TH. 2020 Tentang RPJMN 2020-2024, Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara mendapat amanah melaksanakan Program Prioritas: Penguatan Hankam di Perbatasan & PPKT dengan Kegiatan Prioritas melaksanakan Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Sarpras di PPKT tdk berpenduduk, dengan target dalam RPJMN 2020-2024 adalah Peningkatan Sarpras pada 49 PPKT tidak berpenduduk, dari 111 PPKT yang tersebar di perbatasan. Indikator kegiatan ini adalah peningkatan sarpras hankam di PPKT dan jumlah PPKT yang menjadi lokus koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Peningkatan Sarpras Hankam di PPKT tidak berpenduduk.

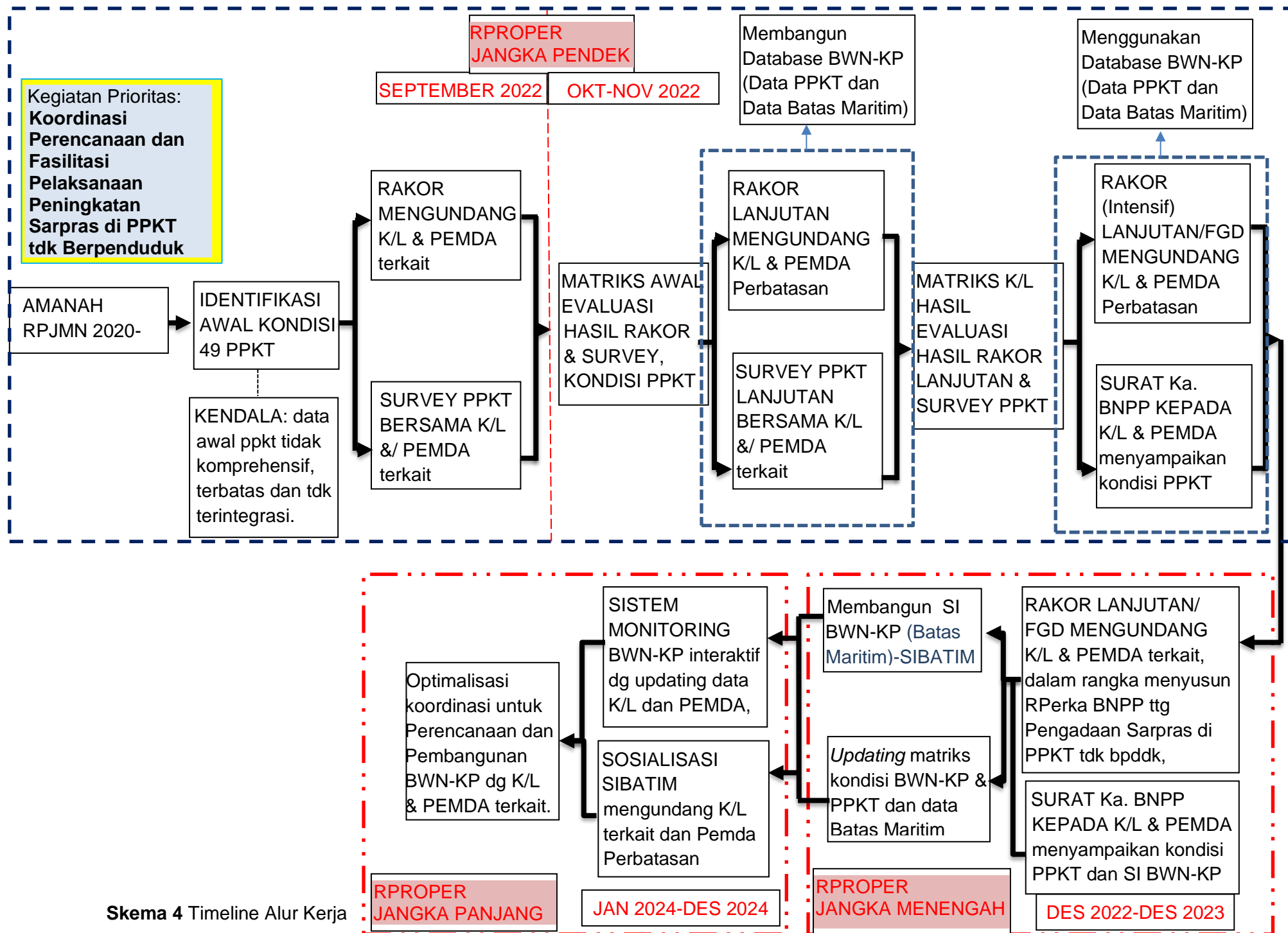
Kendala yang dalam melaksanakan kegiatan koordinasi tersebut di atas dapat diidentifikasi pada **Tabel 2** sebagai berikut:

Tabel 2 Kendala Koordinasi Identifikasi 49 PPKT Tidak Berpenduduk

No.	Identifikasi Kondisi 49 PPKT tidak berpenduduk
1.	Tidak tersedia data awal Sarpras Hankam pada PPKT dimaksud secara komprehensif, sedikit data yang ada masih bersifat manual dan, belum tersedia data digital.
2.	Letak PPKT yang terisolasi, sangat jauh diperbatasan sehingga untuk mencapai membutuhkan biaya transportasi (sewa speedboat) sangat mahal.
3.	Belum terdefinisiannya sarpras dasar yang dibutuhkan pada PPKT dimaksud, karena kondisi fisik pulau yang berbeda, sehingga perlu membuat tipologi pulau berdasarkan kondisi fisik pulau dan sarpras hankam dasar yang dibutuhkan dan dapat/memungkinkan dibangun di PPKT.
4.	Adanya sarpras yang tidak masuk dalam kebijakan/program pengadaan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab terhadap Sarpras Hankam tersebut jika di PPKT tidak berpenduduk, tetapi hanya di PPKT yang berpenduduk.
5.	Ada Pemda Perbatasan yang tidak memiliki data PPKT di wilayahnya, sehingga untuk mengetahui kondisi awal sarpras hankam PPKT tersebut perlu dilakukan survey langsung ke PPKT dimaksud.

6.	Masih ada perbedaan data sarpras hankam antar K/L, seperti koordinat dan penomoran Pilar Titik Referensi (PTR), sehingga perlu klarifikasi.
----	---

Melihat permasalahan tersebut di atas, langkah-langkah perubahan dalam melakukan tindak lanjut koordinasi yang digambarkan dalam alur kerja pada **Skema 4** sebagai berikut:



Skema 4 Timeline Alur Kerja

D. OUTPUT (KELUARAN) DAN OUTCOME (HASIL/MANFAAT)

1) OUTPUT JANGKA PENDEK (SEPT-NOV 2022)

Koordinasi Lintas K/L dan Pemerintah Daerah Perbatasan untuk Peningkatan Sarpras Hankam di PPKT dengan *data base* Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) di PPKT dengan:

- a. Teridentifikasinya Sarpras Dasar (Matriks Sarpras) di 49 PPKT tidak berpenduduk dan K/L Penanggungjawab, yang merupakan hasil rapat mengundang K/L dan Pemda perbatasan serta hasil survey ke PPKT bersama K/L dan/ Pemda Perbatasan dalam rangka fasilitasi perencanaan pemenuhan sarpras hankam di PPKT.
- b. Surat Kepala BNPP kepada K/L terkait, yang pada intinya menyampaikan kondisi *eksisting* sarana-prasarana di PPKT untuk mendapat perhatian dalam perencanaan kebijakan program pembangunan perbatasan dan rencana pengalokasian kebutuhan anggaran serta mengkoordinasikan pelaksanaan;
- c. Tersusunnya Data Batas Maritim dan PPKT secara digital untuk membantu proses perencanaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Sarpras di PPKT tidak berpenduduk. *Output* jangka pendek dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3 *Output* Jangka Pendek Proyek Perubahan

No.	OUTPUT JANGKA PENDEK: hasil identifikasi awal kondisi 49 PPKT
1.	Teridentifikasinya sarpras dasar pada 49 PPKT tidak berpenduduk
2.	Teridentifikasinya K/L penanggungjawab yang akan dikoordinasikan untuk klarifikasi kebijakan program pembangunan dan penganggaran sarpras di PPKT tidak berpenduduk.
3.	Tersusunnya matriks sarpras di PPKT tidak berpenduduk dan K/L penanggungjawab
4.	Tersusunnya surat kepada K/L menyampaikan informasi tentang 49 PPKT dan kondisi Sarpras di PPKT, yang diharapkan hasil koordinasi ini akan diprogramkan dan dianggarkan pengadaan sarpras dimaksud dalam TA mendatang

5.	Tersusunnya data digital kondisi Sarpras Hankam pada 49 PPKT dengan data spasial serta data atribut PPKT dalam <i>database</i> PPKT.
6.	Tersusunnya data batas maritim yang akan melengkapi Data BWN-KP

2) **OUTPUT JANGKA MENENGAH (DES 2022-DES 2023)**

- a. Peningkatan Koordinasi Antar K/L Dan Pemda Untuk Peningkatan Sarpras Hankam Di PPKT dengan dukungan Data Digital Perbatasan *terupdate*.
- b. Teridentifikasinya Sarpras Dasar (Matriks Sarpras) 111 PPKT dan K/L Penanggungjawab secara digital, yang merupakan hasil rapat mengundang K/L dan Pemda perbatasan serta hasil survey ke PPKT bersama K/L dan/ Pemda Perbatasan dalam rangka fasilitasi perencanaan pemenuhan sarpras hankam di PPKT dengan Data Digital Perbatasan.
- c. Terbangunnya Sistem Informasi Batas Maritim (SIBATIM) BWN-KP dengan alternatif *Dabase* Batas Laut dan Udara (PPKT dan Batas Maritim /SIBATIM) digabungkan dengan *Database* Batas Darat dan *Database* Lintas Batas Negara menjadi satu system terintegrasi yaitu, Sistem Informasi Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- d. Draft Perka BNPP Untuk Peningkatan Sarpras Di PPKT, yang pada intinya Perka ini akan mengatur penanggungjawab Sarpras di PPKT yang belum terakomodir dalam Tupoksi K/L (*filling the gap*).

3) **OUTPUT JANGKA PANJANG (JAN 2024-DES 2024)**

- a. Peningkatan Koordinasi Antar K/L Dan Pemda Untuk Peningkatan Sarpras Hankam Di PPKT dengan dukungan Data Digital Perbatasan *terupdate* yang dapat diakses/interaktif (secara bersyarat) oleh K/L terkait dan Pemda Perbatasan.
- b. Terbangun koordinasi yang optimal dengan dukungan Sistem Informasi Geografis Batas Maritim dan PPKT.

4) **OUTCOME**

Tabel 4 *Output dan Outcome dari Proyek Perubahan*

Output (Keluaran)		Outcome (Manfaat)	
	Jangka Pendek		
1	Identifikasi 49 PPKT	1	Informasi kebutuhan sarana prasarana PPKT tidak berpenduduk
	Jangka Menengah		
2	Sistem Informasi Batas Maritim (SIBATIM)	2	Kemudahan dan Kecepatan akses informasi untuk BNPP dan lembaga terkait
	Jangka Panjang		
3	Perencanaan dan Pembangunan BWN-KP yang optimal	3	Rencana yang sistematis dan pembangunan yang tidak tumpang tindih

E. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Proyek perubahan ini memiliki tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang antara lain:

1) TUJUAN JANGKA PENDEK

Tujuan Jangka Pendek yaitu:

1. Mengoptimalkan hasil koordinasi lintas K/L terkait Pengelolaan Batas Negara dan Pemda Perbatasan.
2. Terkoordinasinya hasil koordinasi dan survey PPKT kepada K/L terkait dengan Surat Mendagri selaku Ka. BNPP kepada K/L terkait dan Pemda Perbatasan.
3. Membangun Data Base PPKT dan Batas Maritim Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP)
4. Mengkoordinasikan kondisi Sarpras Hankam untuk Peningkatan Sarpras Hankam di PPKT

2) TUJUAN JANGKA MENENGAH

Tujuan Jangka Menengah yaitu:

1. Merumuskan Peraturan Kepala Badan dalam Standarisasi dan Pengadaan

Sarpras Hankam di PPKT tidak berpenduduk dan K/L yang bertanggung jawab.

2. Surat Mendagri selaku Ka. BNPP kepada K/L terkait dan Pemda Perbatasan dalam rangka moneyv kondisi Sarpras Hankam di PPKT BWN-KP *terupdate*.
3. Membangun Sistem Informasi Batas Maritim dan PPKT yang dapat diakses oleh K/L dan Pemda. (interaktif)

3) TUJUAN JANGKA PANJANG

Tujuan Jangka Panjang yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kondisi Sarpras Hankam di BWN-KP, dengan data dan informasi *terupdate* dengan K/L dan Pemda (memanfaatkan SI Batas Maritim dan PPKT)
2. Meningkatkan koordinasi secara virtual (daring) dengan K/L dan Pemda terhadap hasil moneyv *terupdate*

Tahapan perubahan rencana strategis dijelaskan dalam bentuk **Tabel 5** linimasa dibawah ini

Tabel 5 Linimasa Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Sarpras di PPKT Tidak Berpenduduk

No	Kegiatan	2022																2023	2024
		September				October				November				December					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Program Jangka Pendek																		
a	Identifikasi Awal Kondisi 49 PPKT																		
	- Rakor K/L dan Pemda																		
	- Survey bersama K/L dan Pemda																		
b	Evaluasi Hasil Rakor Awal & Survey PPKT																		
c	Membangun Database BWN-KP (Data PPKT dan Data Batas Maritim)																		
	- Rakor lanjutan mengundang K/L Pemda Perbatasan Terkait																		
	- Survey PPKT lanjutan bersama K/L dan Pemda																		
d	Evaluasi Hasil Rakor Lanjutan & Survey PPKT																		
e	Menggunakan Database BWN-KP (Data PPKT dan Data Batas Maritim)																		

Data Batas Laut/Batas Maritim serta PPKT akan meningkatkan efektivitas Pengelolaan PPKT.

Dalam meningkatkan pengelolaan batas negara di wilayah laut difokuskan, optimalisasi koordinasi dengan dukungan kompilasi data secara digital pada tiga kegiatan yaitu data:

- a. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT)
- b. Peningkatan sarpras hankam non alutsista di PPKT.
- c. Progres penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga,

Dalam membangun *database* Pengelolaan PPKT dan Peningkatan Sarpras Hankam di PPKT (a,b,c) dan data penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga, dilakukan Langkah-langkah sesuai pada **Skema 5** sebagai berikut:

1. Penelusuran peta dasar, peta-peta tematik dan penggambaran kembali/plotting koordinat secara kartometrik, peta foto, citra satelit. (pengumpulan data spasial)
2. Pengumpulan koordinat-koordinat hasil perundingan dan data sejarah/keterangan tambahan dari media sosial
3. Inventarisasi semua arsip dan data hasil kesepakatan/perundingan
4. Digitalisasi semua data dan peta (data spasial dan data atribut) untuk koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait.

Adapun untuk langkah-langkah teknis dalam pembuatan basis data dapat dilihat pada **Skema 6**.

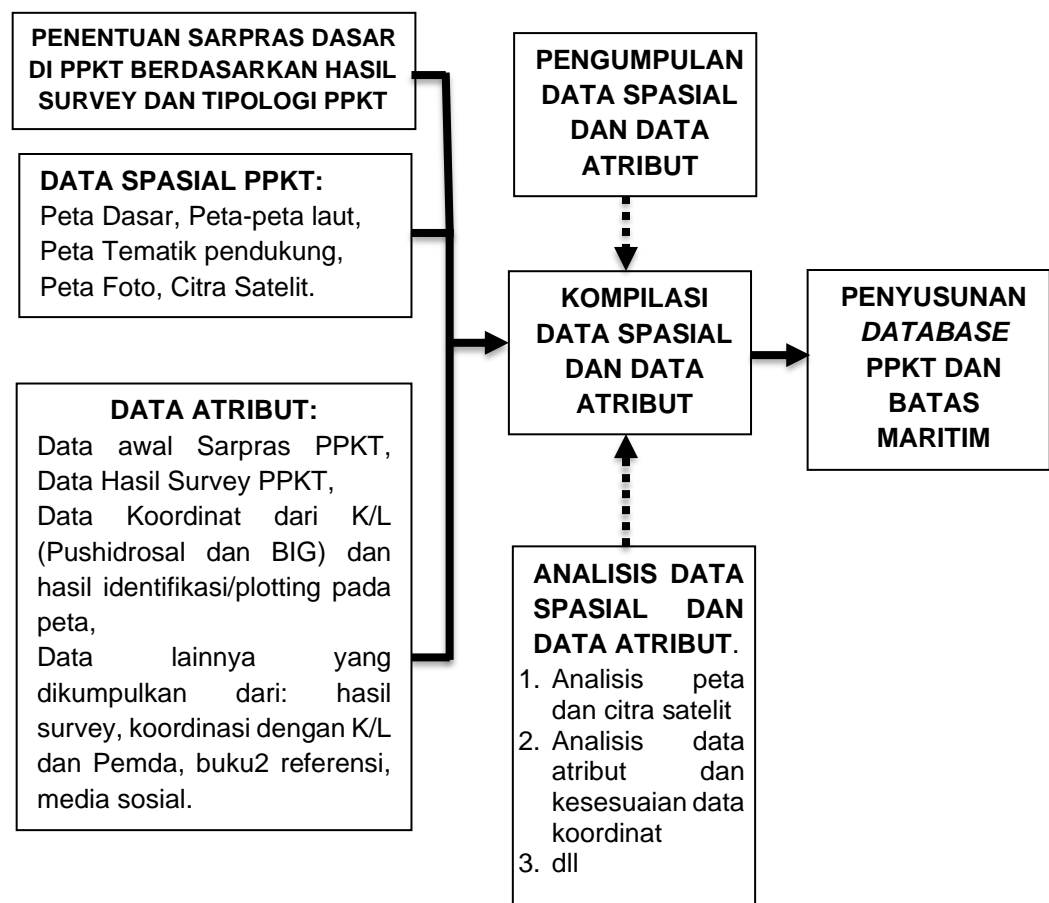
Langkah-langkah dalam Identifikasi pengelolaan PPKT:

- 1) Kondisi PPKT dalam semua aspek pendekatan (fisik pulau, keamanan, kesejahteraan dan lingkungan), termasuk ancaman, peluang dan permasalahan yang dihadapi, penyiapan RDTR, Zonasi, Master Plan;
- 2) Penentuan Sarpras Hankam (Sarpras Dasar) di PPKT berdasarkan Hasil Survey dan Tipologi PPKT
- 3) Koordinasi intensif lintas K/L dan Pemda Perbatasan, meminta laporan kondisi PPKT *terupdate* dan menyikapi berbagai perkembangan dalam pengelolaan

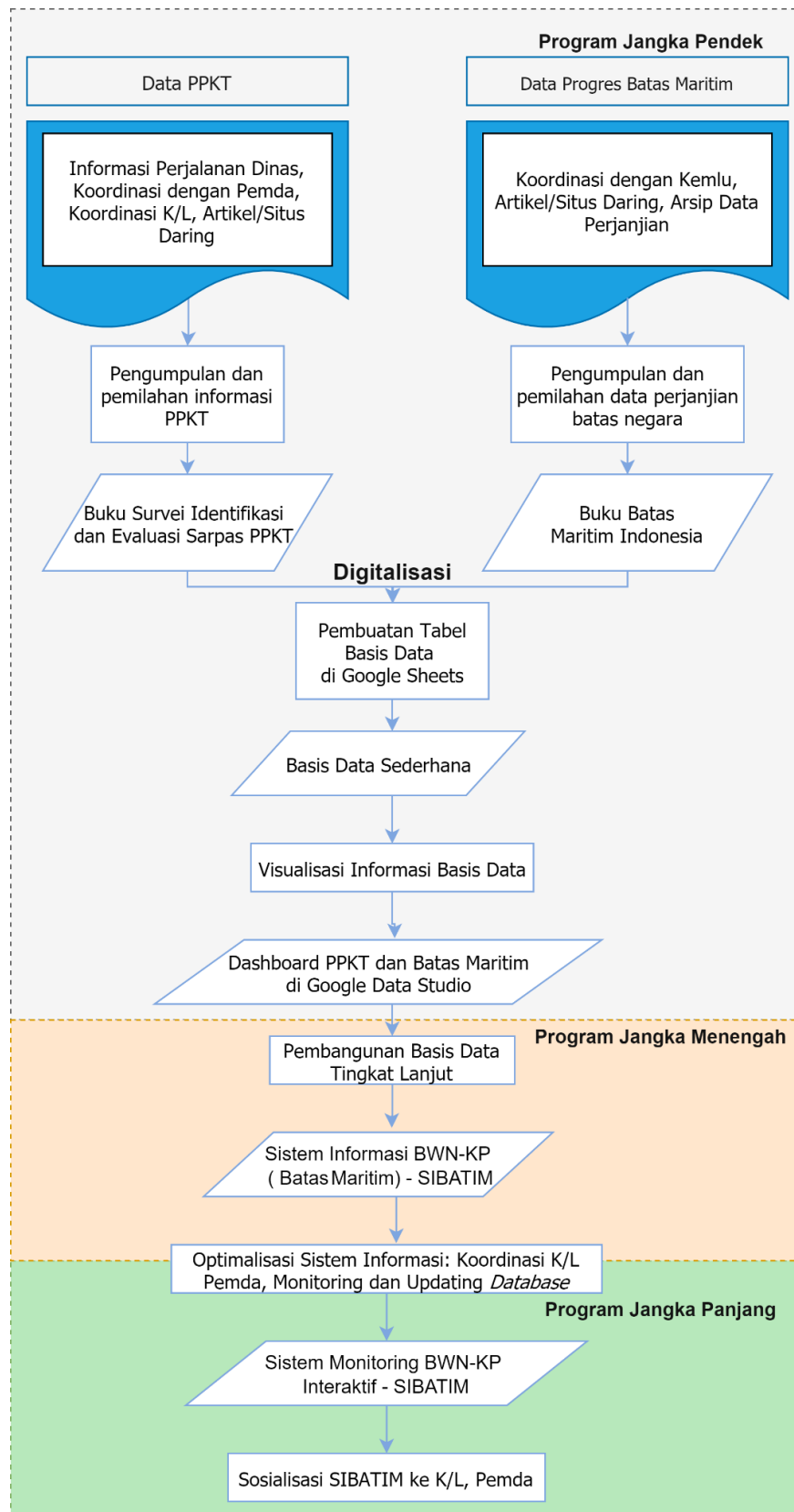
PPKT; dan

- 4) Sinkronisasi dan integrasi program kegiatan lintas K/L melalui penyusunan Rencana Aksi tentang Pengelolaan PPKT.

Program Prioritas Penguatan Hankam di Perbatasan dan Pulau Terluar (PPKT) dengan Kegiatan Prioritas Koordinasi Perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarpras di PPKT tidak berpenduduk, dilaksanakan dengan strategi optimalisasi koordinasi dan bersinergi dengan mitra Kementerian/Lembaga (K/L) anggota BNPP dan Pemerintah Daerah Perbatasan.



Skema 5 Tahapan Penyusunan *Database* PPKT dan Batas Maritim



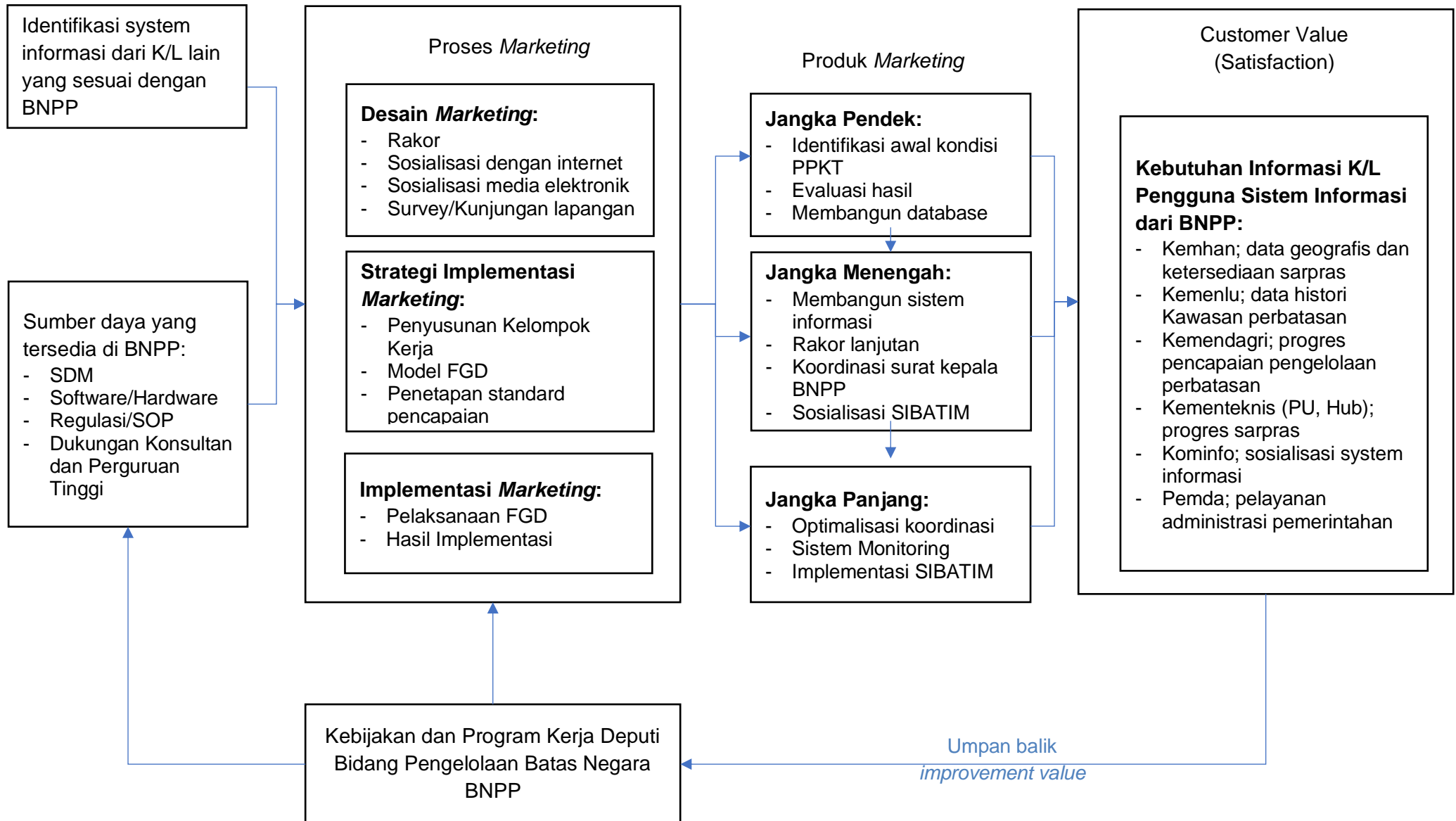
Skema 6 Diagram Alir Pembuatan *Database* PPKT dan Batas Maritim

G. RENCANA STRATEGI *MARKETING*

Identifikasi instansi/individu yang berkepentingan dan dapat memberi pengaruh terhadap hasil akhir dari proyek perubahan dilakukan untuk mengetahui dampak positif dan negatif terhadap proyek perubahan. Pengaruh dari *stakeholder* bersifat positif yang berarti mendukung atau negatif yaitu menjadi sumber penghambat. Pemetaan jenis dan nilai pemangku kepentingan (*stakeholder*) akan berpengaruh terhadap pencapaian atau keberhasilan proyek perubahan. Pemahaman kepentingan dan pengaruh *stakeholder* terhadap proyek perubahan digunakan untuk strategi komunikasi agar berbagai kendala dapat diantisipasi.

Kompleksitas tingkat pengaruh dan kepentingan serta nilai-nilai *stakeholder* terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan dapat dipetakan dengan instrumen *Net Map* guna memetakan tingkat pengaruh dan hubungan baik antar *stakeholder* maupun dengan *Project Leader*. Dari peta ini akan dapat dilakukan observasi dan kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan terhadap semua *stakeholder* guna pencapaian proyek perubahan. Secara skematis tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan masing-masing *stakeholder* terhadap keberhasilan proyek perubahan dapat digambarkan Peta *stakeholder* pada **Skema 7** sebagai berikut:

Skema 7 Diagram *Marketing* Proyek Perubahan (Proper)



Tabel 6 Analisis *Stakeholder*

<i>LATENS</i>	<i>PROMOTORS</i>
Kementerian/LPNK Pemerintah Daerah Perbatasan	Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
<i>APAHETICS</i>	<i>DEFENDERS</i>
Masyarakat Perbatasan	Pejabat Fungsional: Perencana Madya, dan Perencana Muda, Staf IT/ TIK (1.Kebijakan Program dan Penganggaran dan 2. Fasilitasi Kebijakan dan Monev)

Sedangkan untuk pengembangan strategi *Marketing* yaitu:

1. *Product*

- 1) Database Batas Maritim;
- 2) Database PPKT; dan
- 3) Surat Kementerian/LPNK dan Pemda Perbatasan terkait koordinasi informasi kondisi sarpras hankam di PPKT

2. *Place*

- 1) BNPP; dan
- 2) Kementerian/LPNK
- 3) Pemerintah Daerah Perbatasan.

3. *Price*

- 1) Biaya rapat koordinasi, FGD;
- 2) Biaya Tenaga Ahli Perorangan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- 3) Waktu yang tidak terlalu lama untuk mendapatkan informasi;

4. *Customer*

- 1) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat anggota BNPP; dan
- 2) Pemerintah Daerah Perbatasan

5. *Promotion*

- 1) Media Sosial Badan Nasional Pengelola Perbatasan antara lain: Web, Instagram, Facebook, TV Perbatasan;
- 2) Badan Pengelola Perbatasan Daerah, pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Perbatasan; dan
- 3) Kegiatan Rapat, FGD dan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh BNPP

Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Negara (BWN-KP) merupakan representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan semangat kedaulatan negara sehingga terwujud Kawasan Perbatasan negara sebagai beranda depan dan penghubung internasional. Indonesia memiliki hubungan batas darat secara langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, serta batas laut dengan sepuluh negara yaitu Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia. Dalam pengelolaan perbatasan negara tersebut terdapat berbagai isu strategis yang menjadi perhatian sekaligus tantangan ke depan.

Beberapa kondisi yang dihadapi dan menjadi isu strategis pada aspek pengelolaan Batas Wilayah Negara antara lain:

- 1) Belum selesainya penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen;
- 2) Belum maksimalnya pengawasan dan pemeliharaan tanda batas negara;
- 3) Belum efektifnya diplomasi perbatasan (border diplomacy) dalam rangka perundingan penyelesaian batas negara;
- 4) Belum tuntasnya penetapan batas laut Indonesia (laut teritorial, batas Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE, dan landas kontinen) dengan beberapa negara;
- 5) Belum selesainya penetapan wilayah udara Indonesia;
- 6) Masih adanya potensi kerentanan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada masyarakat perbatasan.

Isu strategis yang menjadi perhatian pada aspek pembangunan Kawasan Perbatasan negara antara lain:

- 1) Percepatan penyelesaian dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta pengendalian dan pemanfaatan ruang;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi komoditas lokal (pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata);
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hayati dan nonhayati pesisir dan laut untuk kepentingan perekonomian masyarakat;
- 4) Masih rendahnya produktivitas produk unggulan daerah yang berorientasi pada pasar negara tetangga (pengembangan branding);
- 5) Masih rendahnya daya saing dan belum berkembangnya pusat/sentra industri, perdagangan dan pariwisata di kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
- 6) Masih rendahnya konektivitas dan layanan infrastruktur transportasi terutama yang mendukung rantai lalu lintas pasokan komoditas (distribusi logistik/supply chain) dan hubungan sosial budaya antarwilayah;
- 7) Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan akses telekomunikasi, informasi dan penyiaran;
- 8) Masih terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar berupa pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan, dan permukiman yang memadai;
- 9) Belum meratanya pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa atau sebutan lain di Kawasan Perbatasan.

Pada aspek pengelolaan lintas batas negara, Kawasan Perbatasan negara yang merupakan area pelintasan antarnegara sangat rawan dan rentan terhadap isu yang disebabkan oleh adanya aktivitas atau interaksi lintas batas negara secara ilegal. Isu strategis yang menjadi perhatian dalam pengelolaan aktivitas lintas batas negara antara lain:

- 1) belum terpadunya sistem pemeriksaan dan pelayanan lintas batas pada jalur non-Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
- 2) masih relatif banyaknya jalur-jalur perlintasan tidak resmi;
- 3) terbatasnya sumber daya manusia dan dukungan teknologi dalam

penyelenggaraan pelayanan lintas batas (custom, immigration, quarantine, security);

- 4) belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pengamanan lintas batas negara, baik di darat maupun di laut (Pos Pengamanan Perbatasan/Pamtas, Pos TNI Angkatan Laut, Pos Kepolisian, termasuk teknologi pengamanan perbatasan);
- 5) belum terbangunnya sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security system); serta
- 6) berbagai permasalahan lintas batas baik terkait aspek ekonomi dan sosial budaya, maupun aktivitas kejahatan lintas negara (transnational crime) lainnya.

Jumlah kabupaten/kota dan provinsi yang banyak, terbentang dalam bentuk kepulauan, dengan jarak perbatasan (baik darat dan laut) yang Panjang, isu-isu strategis di BWN-KP, kondisi alam dan geografis yang berbeda, penting untuk memperhatikan tiga dimensi kapasitas, yaitu:

- (i) kapasitas ekstraktif untuk menyediakan sumberdaya;
- (ii) kapasitas pemerintahan untuk melakukan implementasi; dan
- (iii) kapasitas produksi regulasi untuk memberikan kepastian aturan

(Berwick & Christia, 2018).

Untuk menciptakan negara yang memiliki kapasitas di atas, perlu adanya penguatan tata kelola yang tepat di berbagai tingkat pemerintahan baik pusat dan juga pemerintah daerah yang mampu merespon kondisi saat ini sekaligus juga merumuskan upaya untuk mencapai cita-cita ke depan.

Bryson (Keban, 2021) menegaskan bahwa kuat lemahnya institusi, bertumbuh-berkembangnya organisasi, atau jatuh-bangunnya lembaga publik akan sangat tergantung pada **“kapasitasnya dalam menata diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan internal birokrasi maupun lingkungan eksternal, seperti faktor ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, demografi, keadaan alam fisik, dan perkembangan teknologi”**. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan prinsip pengaturan yang tepat bagi organisasi publik dalam memecahkan permasalahan dan kepentingan publik. Inilah yang kemudian

dikenal dengan konsep manajemen strategis (*strategic management*), yang terdiri dari perencanaan strategis, implementasi strategis, dan evaluasi strategis (David, 2011).

Konsep Manajemen Strategis menjadi penting diterapkan dalam konteks pembenahan Badan//Lembaga, dalam hal ini Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai badan yang ditugaskan dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan, mengingat begitu dinamisnya dinamika dan tantangan pemerintahan terkini. Sejalan dengan perubahan-perubahan besar yang ditandai dengan *volatility, uncertainty, complexity, ambiguity* (VUCA) menuntut adanya transformasi mendasar dalam pendekatan penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks dengan jenis dan karakteristik aktor serta permasalahan yang semakin beragam.

Hal yang pertama dibutuhkan adalah melakukan semacam pemetaan atau analisis situasi, baik eksternal dan juga internal organisasi. Analisis lingkungan eksternal dilakukan mencakup analisis lingkungan strategis untuk mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi sehingga mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi. Setidaknya ada tiga kategori utama yang diidentifikasi ketika melakukan **analisis lingkungan eksternal**, yaitu:

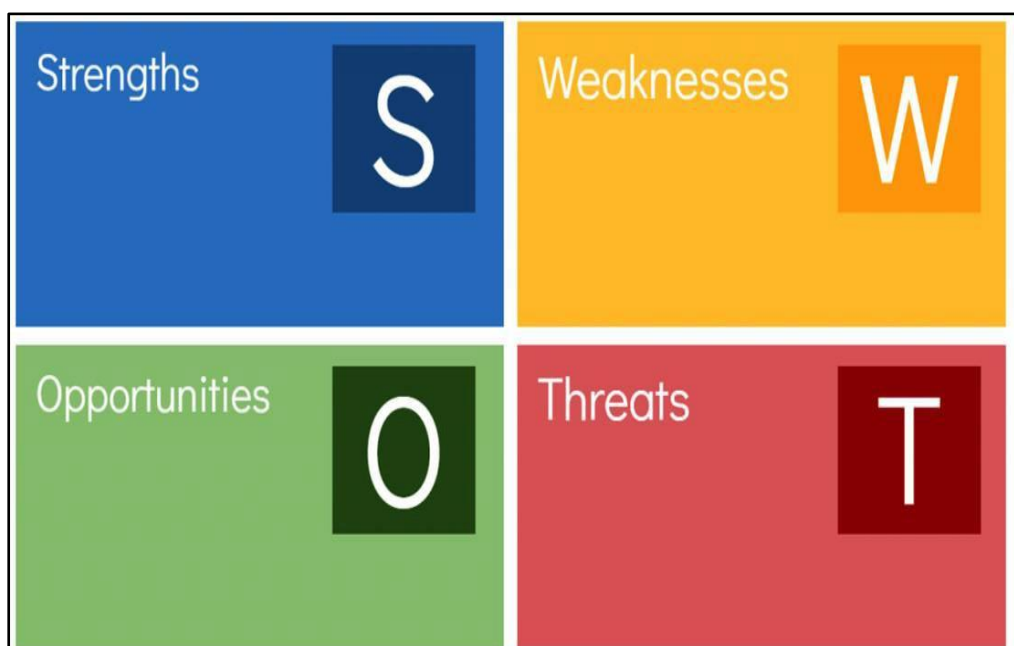
- 1) Pemetaan kekuatan-kekuatan/tekanan dan tren yang biasanya dikategorikan sebagai aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum;
- 2) Pemetaan pemilik sumber daya; dan
- 3) Peta pesaing aktual atau potensial, pemangku kepentingan, serta kekuatan penting yang mempengaruhi persaingan dan kolaborasi.

Di samping analisis eksternal, diperlukan juga **analisis lingkungan internal** untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, termasuk berbagai aspek dari organisasi yang dapat membantu dan menghambat pencapaian visi dan pemenuhan mandat organisasi. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan untuk membantu melakukan analisis internal organisasi, yaitu:

- 1) kekuatan organisasi;
- 2) kelemahan organisasi;

- 3) pertanyaan seputar visi dan misi; dan
- 4) kapasitas internal organisasi termasuk program kerja, SDM, manajemen dan kepemimpinan, sumber daya fisik, citra organisasi, dan lainnya).

Untuk menyederhanakan dan mempermudah analisis permasalahan, dalam melakukan analisis dapat digunakan analisis SWOT yang berbasis memetakan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang secara skematis dapat divisualisasikan di dalam **Gambar 2** dan analisisnya dalam **Tabel 7**.



Gambar 2 Analisis SWOT

Tabel 7 Tabel Hasil Analisis SWOT pada BNPP

NO.	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)			
	STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)	OPPORTUNITIES (KESEMPATAN)	THREATS (ANCAMAN)
1	Legalitas/ regulasi berdasarkan undang-undang dan setaranya	Luasnya wilayah kerja (geografis) dan jumlah pulau yang banyak	Penyelesaian kesepakatan Batas Wilayah Negara dengan negara tetangga melalui perundingan	Belum ada standardisasi pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa untuk sarana transportasi dan komunikasi di Kawasan Perbatasan.
2	Koordinasi Kementerian/Lemba ga di bidang pengelolaan batas wilayah dan Kawasan perbatasan (terdiri dari 27 K/L) dan 17 Pemprov perbatasan.	Belum lengkapnya wakil (Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD) di daerah.	Peningkatan dan pengawasan serta pemeliharaan tanda batas negara;	Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan akses telekomunikasi, informasi dan penyiaran
3	Aksesibilitas ke daerah perbatasan	Rotasi/mutasi SDM berkompeten	Mendukung kementerian luar negeri agar mencapai efektivitas diplomasi perbatasan (border diplomacy) dalam rangka perundingan penyelesaian batas negara.	Tidak optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi daerah. komoditas lokal
4	Kemampuan dan pengalaman sumber daya manusia mulai dari tingkat eselon 1 s.d. tingkat staf mengenai pengelolaan perbatasan	Keterbatasan anggaran	Mendukung tuntasnya penetapan batas laut Indonesia (laut teritorial, batas Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE, dan landas kontinen) dengan beberapa negara.	Masih adanya potensi kerentanan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada masyarakat perbatasan.
5	Hubungan yang	Masih terbatasnya	Percepatan	Masih banyak di daerah

	kuat dengan pemerintah daerah terutama untuk daerah perbatasan	akses menuju lokasi dan minimnya sarana dan prasarana yang memadai di Kawasan perbatasan	penyelesaian dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta pengendalian dan pemanfaatan ruang	perbatasan yang terisolasi (3T = Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal)
6	Memiliki akses/hubungan dengan negara tetangga yang berbatasan			

Berikut beberapa faktor yang ada di dalam analisis SWOT:

a. Faktor Internal

Data analisis faktor internal meliputi Strength (kekuatan) yang menjadi komponen untuk memberikan kelebihan serta keuntungan terhadap Weakness (kelemahan) yang nantinya akan menjadi komponen penentu mengenai kelemahan apa saja yang dijalankan.

b. Faktor Eksternal

Data analisis faktor eksternal melibatkan pihak dari luar, terdiri dari Opportunity (peluang) yang bisa dimanfaatkan di masa mendatang terhadap Threat (ancaman) yang mungkin nantinya akan dihadapi.

Hasil analisis faktor internal dan eksternal **terlampir**.

H. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSI

Potensi kendala yang akan dihadapi dalam merealisasikan proyek perubahan yang direncanakan dapat terjadi seperti:

- Kendala teknis yaitu keterbatasan SDM yang faham dengan pengembangan IT, sehingga akan bisa menghambat pada koordinasi yang memanfaatkan digitalisasi Data Batas Maritim dan Data PPKT, selain itu masalah waktu dalam menjalankan proyek perubahan sehingga bisa menyebabkan kegagalan proyek perubahan ini; dan

- b. Kendala substansi yaitu kapasitas data centre dan kualitas jaringan internet.

Alternatif solusinya adalah utk kendala teknis berupa SDM perlu merekrut pihak ke 3, yaitu Tenaga Ahli Perorangan dalam operasional Data Digital dan updating data digital, sedangkan untuk kendala kapasitas data center dan kualitas jaringan internet bisa dilakukan dengan koordinasi kepada Biro KUH (Bagian Umum) guna meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan internet.

I. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor kunci keberhasilan proyek perubahan ini ditentukan oleh pengambil kebijakan pada Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang dapat mendorong kinerja tim IT sebagai pelaksana pengembangan Database PPKT dan Batas Maritim dan komitmen seluruh pejabat dan staf pendukung di Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara. Dalam pengembangan kelembagaan pengelolaan BWN-KP, yang menjadi perhatian adalah:

- 1) Belum efektifnya kelembagaan horizontal (antar-lembaga dalam pemerintah pusat);
- 2) Belum efektifnya kelembagaan vertikal (hubungan antara pusat dan daerah) di daerah;
- 3) Masih lemahnya kelembagaan pengendalian lapangan sebagai fungsi pengendalian melaksanakan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam koordinasi lintas K/L dan koordinasi Pusat dan Daerah.

Digitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan TIK adalah pendorong utama yang membuat layanan publik mengubah tata kelola dengan menerapkan strategi transformasi dan digitalisasi. Pejabat pimpinan tinggi adalah pemimpin efisiensi tata kelola yang akan mengidentifikasi organisasi tersebut akan tetap menjadi pemimpin dalam layanan publik masa depan. Itulah mengapa penting untuk mengidentifikasi karakteristik pejabat dan mendukung pimpinan tinggi yang menerapkan strategi efisien. Proses digitalisasi di Indonesia sedang dalam tahap perkembangan aktif, oleh karena itu penting untuk memahami pemimpin transformasi digital untuk memprediksi efisiensi strategi.

J. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Proyek Perubahan merupakan suatu program yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kinerja organisasi agar organisasi menjadi lebih adaptif dan agile (lincah) dalam menghadapi setiap perubahan. Pelaksanaan proyek perubahan tidak terlepas dari tata kelola sebab tata kelola yang baik berdampak pada hasil perubahan yang baik begitu pula sebaliknya tata kelola yang kurang baik menyebabkan kegagalan dalam membuat perubahan. Tata Kelola merupakan rangkaian proses yang mempengaruhi, mengarahkan, mengelola, dan mengontrol suatu proyek perubahan pada organisasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola proyek perubahan ini adalah Mentor, Coach, Project Leader dan Tim Kerja.

Unsur-unsur yang terlibat dalam proyek perubahan ditempati oleh sumber daya yang memiliki kompetensi keahlian dan berpengaruh positif terhadap proyek perubahan. Proyek perubahan dikelola dengan koordinasi yang intensif antara Mentor, Coach, Project Leader dan Tim Kerja yang terbagi dalam tiga kelompok kerja dengan maksud agar pelaksanaan proyek perubahan dapat berjalan lancar baik aspek administrasi maupun aspek teknis penerapan teknologi.

K. PERSETUJUAN PROJECT SPONSOR

Ada pada halaman (ii) diatas yang ditanda tangani oleh:

1. *Coach* : Drs. H. Machmudan, M.Si
2. Mentor : Dr. Robert Simbolon, MPA.
3. Kapus : Mohammad Rizal, S.E., M.Si.

L. RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini akan menjadi rencana untuk pengembangan potensi diri antara lain:

- 1) Menjadi pelopor dalam perubahan penyusunan data, dari data manual menjadi data digital.
- 2) Mengembangkan digitasi seluruh data di Keasdepan Batas Laut dan Udara sehingga menjadi data yang komprehensif dan membantu proses pengambilan keputusan dengan cepat.

- 3) Meningkatkan kemampuan managerial; dan
- 4) Meningkatkan dan mengoptimalkan tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab tugas pokok dan fungsi dalam Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara.

Hal hal diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan Pendidikan
- 2) Berlatar belakang Pendidikan Teknik di fakultas Teknik sipil dan perencanaan ITB jurusan Teknik Geodesi dan Magister Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia saat ini masih melanjutkan pada program doktor di bidang ilmu pemerintahan dalam negeri di IPDN
- 3) Program Profesional
- 4) Telah mengikuti suspim pada tingkat 4 dan 3 yang menghasilkan pemahaman tentang kepemimpinan dan program administrasi pemerintahan yang telah diimplementasikan pada Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- 5) Program *on-job*
- 6) Mendampingi pimpinan dalam rapat-rapat lintas Direktorat Jenderal maupun lintas Kementerian, Pemerintah Daerah, serta Lembaga legislatif (DPR/DPRD) yang menghasilkan pemahaman tentang urgensi penanganan permasalahan pemerintahan.
- 7) Mentoring
- 8) Melakukan konsultasi kepada pimpinan dan menerapkan Code of Conduct (COC) kepada rekan maupun bawahan.
- 9) Pelatihan antar Departemen
- 10) Mengikuti rakor dan pelatihan di bidang polhukam, keuangan dan ilmu-ilmu keteknikan di Lembaga Teknik maupun perguruan tinggi.
- 11) Pemantapan Posisi
- 12) Memahami bisnis proses BNPP khususnya di ke Asdepan Batas Laut dan

Udara dengan cara melakukan penyusunan program kerja, pembuatan standar operasional, dan pelatihan/bimbingan kepada bawahan agar siap sebagai kader penerus.

13) Meningkatkan Interpersonal Skill

14) Memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang hardware maupun software yang mendukung tugas di BNPP dengan memanfaatkan keahlian vendor, konsultan, maupun perguruan tinggi.

BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. DASAR TEORI PROYEK PERUBAHAN

1) URGENSI BASIS DATA (*DATABASE*)

Basis data/*database* adalah kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Basis data merupakan sistem yang kompleks yang terkait pendataan informasi/data, penyimpanan dan penyebarannya. Basis data merupakan kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu, dan saling berhubungan, sehingga dapat dikelola dengan mudah. *Database* yang kompleks digunakan untuk menyimpan data pengguna untuk belanja di e-commerce yang tentunya memiliki banyak data, seperti gambar produk, deskripsi produk, informasi harga, dan lainnya. Tanpa *database*, data tersebut hanya akan tersimpan di komputer dan tidak bisa diakses oleh konsumen. Atau, konsumen harus mengakses data dari komputer Anda dulu secara langsung. Basis data secara dasar merupakan suatu tabel yang berisi data. *Database* besar akan menyimpan berbagai macam jenis tabel, setiap tabel pasti memiliki informasi yang berhubungan satu sama lain yang disebut Relasional *Database*.



Gambar 3 Bentuk Dasar Basis Data

Adapun lima komponen yang berkaitan dengan Basis Data yaitu (Naning Nur Wijayanti, 2021):

- 1) Data, file-file yang berisi informasi, baik teks, log, gambar, dan lainnya. Di dalam *database*, data akan disimpan dengan struktur Tabel seperti pada **Gambar 3**, sehingga mudah dikenali. Biasanya, struktur Tabel tersebut terdiri dari: Field (berupa kolom dengan satuan informasi yang rinci, seperti nama produk, harga, stok, dan lainnya; Record (berupa baris yaitu kumpulan dari field, yang membentuk satu informasi unik seperti, harga dari suatu produk); Table (kumpulan dari record, isi dari sebuah file); dan *Database* (kumpulan dari tabel atau file). Dalam suatu tabel basis data terdapat **primary key**, istilah tersebut sangat penting untuk dipahami. khususnya ketika akan membuat Relasional Database. Tanpa primary key, relasi antar tabel yang kalian buat tidak akan bekerja dengan sempurna. Pada tabel pada **Gambar 3**, primary key ada pada field NIM, yang menjadi informasi unik yang membedakan tiap record satu dengan yang lain, untuk dihubungkan dengan informasi dari Tabel lain seperti Tabel Gaji, Tabel Peforma dan sebagainya.
- 2) Hardware, perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Kalau untuk penyimpanan secara lokal atau di jaringan tertentu, hardware yang digunakan adalah komputer, disk, memori, dan lainnya. Sedangkan, untuk penyimpanan data online seperti website, server hosting-lah yang digunakan.

- 3) Sistem Operasi, bertanggung jawab atas semua sistem yang ada di komputer atau server. Pilihlah sistem operasi yang mendukung sistem *database* yang akan Anda bangun. Bisa menggunakan Windows atau Linux.
- 4) *Database Management System* (DBMS), aplikasi pengelolaan *database*. Dengan DBMS, Anda bisa lebih mudah ketika menginput dan mengupdate data. Sebagai contoh kalau Anda ingin mengelola *database* pada website, Anda bisa menggunakan MySQL, MariaDB, Azzure dsb. Adapun proses input data untuk data kecil dan sederhana masih dapat menggunakan Microsoft Excel atau *Google Spreaadsheet*.
- 5) *Database Access Language* (DAL), bahasa yang digunakan untuk menulis perintah, seperti mengakses, menambah, memperbarui, dan menghapus data di dalam *database*. Dengan DAL kita hanya memberi perintah dalam bentuk query yang akan diterjemahkan, sehingga kita tidak perlu lagi membuka satu-satu lagi tabel yang notabenenya membacanya sangat susah. Adapun jika menggunakan sistem *database* sederhana seperti Excel/Spreadsheet tidak dapat diakses *databases acces language*.

Dengan begitu dengan menggunakan *database* didapat berbagai fungsi yang menjadi kelebihan dari sistem, adapun beberapa fungsi *database* antara lain(Naning Nur Wijayanti, 2021):

- 1) Mempercepat dan Mempermudah Identifikasi Data, dengan *database*, Anda bisa membuat sebuah sistem yang dapat mengelompokkan data dan menyimpannya secara terstruktur. Jadi, ketika ada permintaan akses sebuah data, informasinya bisa diberikan dengan cepat sesuai kategori yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Mengontrol Data Secara Terpusat, tanpa *database*, data akan terpecah di berbagai penyimpanan secara lokal sesuai dengan pihak yang memiliki data tersebut. Dengan adanya *database*, semua data bisa dikumpulkan dalam satu tempat, misalnya di server hosting. Jadi, Anda pun bisa mengelola berbagai data dari pusat secara lebih efisien.
- 3) Menghindari Duplikasi Data, setiap data yang tersimpan dalam *database* dapat diatur agar terhindar dari data ganda. Sistem *database* dapat dirancang untuk mengidentifikasi data yang sama, sehingga dapat memberikan warning atau notifikasi ke pengelola *database*. Misalnya, dengan menerapkan sistem kata kunci atau primary key.

- 4) Menyimpan Data dengan Lebih Aman, mengumpulkan data ke dalam satu database, artinya fokus perlindungan keamanannya menjadi lebih baik. Jika data masih tersebar di beberapa perangkat, maka setiap perangkat perlu diamankan. Tapi kalau sudah terpusat di database, Anda cukup mengamankan server dengan perlindungan berlapis. Sebagai contoh, kalau menggunakan hosting Niagahoster yang memanfaatkan data center Tier 4 sebagai data center dengan kualitas terbaik, perlindungan data Anda lebih optimal. Selain itu, Anda bisa menyimpan database website dengan proteksi Imunify360 yang melindungi website dari DDoS dan Malware.
- 5) Menghemat Biaya, dengan database tidak lagi memerlukan banyak tempat untuk menyimpan data. Cukup satu server untuk berbagai kebutuhan data. Secara biaya tentu jauh lebih murah dibanding menyediakan beberapa tempat penyimpanan sendiri.
- 6) Dapat Diakses Multi-User, jika data disimpan secara offline di perangkat berbeda, untuk mengakses sebuah file tentu harus menghubungi pemiliknya dulu. Bagaimana kalau Anda memerlukan data bersamaan dari berbagai perangkat? Sangat tidak praktis, bukan?
- 7) Database menyimpan semua data dalam satu sistem. Maka, siapapun bisa mengaksesnya dengan mudah, asalkan memiliki hak akses. Mulai dari programmer, administrator, hingga pengunjung pada umumnya.

2) SARANA DAN PRASARANA PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI PPKT

Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) merupakan tombak kedaulatan NKRI, hilangnya kepemilikan satu PPKT yang berhubungan dengan garis pangkal akan berpengaruh dengan berubahnya batas wilayah laut Indonesia yang sudah diakui secara Internasional. Penyebab hilangnya status kepemilikan suatu pulau dikarenakan faktor alam (abrasi, penurunan tanah, bencana alam), dan bahkan dapat diambil alih kedaulatannya oleh negara lain. Dengan demikian PPKT termasuk yang tidak berpenduduk dan berpenduduk masyarakat di sekitarnya harus diberi perhatian khusus. Adapun perhatian khusus berupa pengadaan sarana dan prasarana dasar yang membuktikan jika suatu pulau tersebut menjadi kepemilikan Indonesia. Adapun sarana dan prasarana dasar yang harus ada di PPKT antara lain:

- 1) Keamanan, berupa pos jaga Angkatan Laut atau pos Polisi yang memiliki personel cukup untuk patroli rutin lingkaran pulau. Kebutuhan inventaris patroli berupa sepeda motor, *speedboat* juga diperlukan untuk patroli via darat dan laut. Adapun kementerian lembaga yang berkaitan terkait sarpras keamanan yaitu Kementerian Pertahanan.
- 2) Kebutuhan primer, berupa akses telekomunikasi, akses listrik, dan akses air bersih. Akses telekomunikasi berupa pengadaan menara BTS untuk komunikasi data selular. Akses listrik meliputi kebutuhan penerangan terkhusus pada pos jaga. Akses air bersih berupa air tawar yang aman digunakan dan diminum. Sarana prasarana mobilisasi berupa penyediaan jalan lingkaran dapat digunakan dalam patroli lingkaran pulau dan mobilisasi masyarakat dengan kendaraan. Adapun kementerian lembaga yang berkaitan terkait sarpras ini yaitu: Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo); Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Kementerian PUPR.
- 3) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, berupa menara suar/mercusuar, dermaga yang berguna untuk akses masuk transportasi kapal untuk berlabuh. Adapun kementerian lembaga yang berkaitan terkait sarpras ini yaitu Kementerian Perhubungan.
- 4) Infrastruktur Pantai, berupa pembangunan tanggul pemecah ombak untuk mengurangi abrasi pulau. Adapun kementerian lembaga yang berkaitan terkait sarpras ini yaitu Kementerian PUPR
- 5) Sarpras Simbol Negara, yaitu pembangunan identitas simbolik negara dapat berupa pembangunan Tugu Kode Pos Merah Putih, patung simbolik, prasasti identitas wilayah, maupun gapura. Adapun kementerian lembaga yang berkaitan terkait sarpras ini yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Informasi dsb.
- 6) Titik referensi (TR), titik referensi berhubungan titik dasar pada Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang digunakan dalam penentuan batas wilayah laut negara. Titik referensi merupakan titik nyata yang ada di lapangan yang digunakan untuk validasi titik dasar yang bersifat kartometrik/abstrak. Pemeliharaan dan penjagaan titik referensi perlu dilakukan. Adapun kementerian lembaga yang berkaitan terkait sarpras ini yaitu Pusidrosal TNI-AL dan Badan Informasi Geospasial.

- 7) Sarana pendukung, berupa sarana dan prasana untuk mendukung kesejahteraan terkhusus bagi PPKT yang berpenduduk. Saran pendukung berupa sarana pemerintahan meliputi fasilitas umum, kantor pemerintahan, pembangunan jalan desa, pengembangan ekonomi, peminjaman dan perbankan, pendidikan, kesehatan, sanitasi, transportasi umum, dan sebagainya.

3) URGENSI DAN PROGRES BATAS MARITIM INDONESIA

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia.

Penetapan batas laut antara Indonesia dengan negara-negara tetangga memiliki arti penting dalam rangka melindungi dan memajukan kepentingan nasional Indonesia di wilayah laut, khususnya dalam memberikan kepastian batas wilayah dan batas kedaulatan negara di laut. Selain itu kepastian batas wilayah laut juga dapat memberikan jaminan kekuasaan bagi negara dalam mengamankan, mengatur dan mengelola wilayah lautnya.

Dalam konteks hubungan internasional, perundingan batas wilayah laut merupakan suatu wujud konsistensi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjunjung tinggi asas penyelesaian sengketa secara damai. Adapun hasil perundingan penetapan batas laut dalam konteks hukum internasional dapat menjadi salah satu bentuk pengakuan negara lain terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara, serta sebagai penegasan kepemilikan Indonesia atas pulau-pulau terluar yang berada di dalam garis pangkal kepulauannya.

Kepastian batas wilayah dan batas kedaulatan Indonesia di wilayah laut akan memberikan dampak dan kontribusi yang positif dalam penguatan hubungan bilateral

antara Indonesia dan negara tetangga, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berbatasan langsung dengan 10 negara untuk segmen laut yaitu: Australia, Tiongkok, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, Vietnam dan Singapura.

Negara Indonesia telah mendepositkan data batas-batas wilayah dan yurisdiksinya di laut kepada Sekjen PBB pada 11 Maret 2009, dalam bentuk peta ilustratif yang sekaligus mencantumkan daftar koordinat geodetik dari titik-titik dasar (TD). Secara keseluruhan Indonesia mempunyai 193 TD.

Berikut pada **Tabel 8** adalah perjanjian batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga dalam tiga zona maritim yaitu Laut Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen. Perjanjian batas tersebut digunakan sebagai batas-batas terluar dari zona maritim yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Tabel 8 Batas Maritim Indonesia dan negara tetangga

NO.	NEGARA	BATAS WILAYAH			
		BATAS LAUT TERITORIAL	BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF	BATAS LANDAS KONTINEN	BATAS TERTENTU
1	Indonesia - India				
	Samudera Hindia, Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial	Belum Perundingan	Selesai - 1974, 1977	
Tri	Indonesia - India - Thailand				
	Laut Andaman				Selesai - 1978, Trijunction Point and the Delimitation of the Related

NO.	NEGARA	BATAS WILAYAH			
		BATAS LAUT TERITORIAL	BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF	BATAS LANDAS KONTINEN	BATAS TERTENTU
					Boundaries of the three Countries in the Andaman Sea 22 June 1978
2	Indonesia - Thailand				
	Selat Malaka bagian utara	Tidak ada batas Laut Teritorial	Belum Perundingan	Selesai - 1971	
	Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial		Selesai - 1971 dan 1975	
Tri	Indonesia - Thailand - Malaysia				
	Selat Malaka bagian Utara			Selesai - 1971, Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen (Trijunction RI-Thai-Malaysia) di bagian Utara Selat Malaka 21 Desember 1971	
3	Indonesia - Malaysia				
	Selat Malaka	Selesai - 1970, Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah di Selat Malaka 17 Maret 1970	Belum Perundingan	Selesai - 1969, Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut China Selatan 27 Oktober 1969	

NO.	NEGARA	BATAS WILAYAH			
		BATAS LAUT TERITORIAL	BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF	BATAS LANDAS KONTINEN	BATAS TERTENTU
	Selat Malaka bagian selatan	Tahap Perundingan			
	Selat Singapura bagian timur	Tahap Perundingan			
	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai - 1969, Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut China Selatan 27 Oktober 1969	
	Perairan Laut Sulawesi	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	
Tri	Indonesia - Malaysia - Singapura				
	Selat Singapura bagian barat dan timur	Pending			
4	Indonesia - Singapura				
	Segmen Tengah	Selesai - 1973			
	Segmen Barat	Selesai - 2009			
	Segmen Timur, selatan Changi	Selesai - 2014			
	Pedra Branca/Timur	Belum Perundingan			

NO.	NEGARA	BATAS WILAYAH			
		BATAS LAUT TERITORIAL	BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF	BATAS LANDAS KONTINEN	BATAS TERTENTU
5	Indonesia - Vietnam				
	Pulau Natuna bagian Utara	Tidak ada batas Laut Teritorial	Tahap Perundingan	Selesai - 2003	
6	Indonesia - Filipina				
	Laut Sulawesi	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai - 2014	Pending	
7	Indonesia - Palau				
	Samudera Pasifik	Tidak ada batas Laut Teritorial	Tahap Perundingan	Belum Perundingan	
8	Indonesia - Papua Nugini				
	on the island of New Guinea (Irian)				Selesai - 1973 dan 1980, Batas Dasar Laut Tertentu Indonesia dan Papua Nugini
9	Indonesia - RDTL				
	Laut Sawu, Selat Wetar, Laut Timor	Baru akan dimulai setelah dituntaskannya perundingan batas darat	Baru akan dimulai setelah dituntaskannya perundingan batas darat	Baru akan dimulai setelah dituntaskannya perundingan batas darat	
10	Indonesia - Australia	Tidak ada batas Laut Teritorial			
	Laut Timor dan Arafura		Selesai - 1971	Selesai - 1971 dan 1972	

NO.	NEGARA	BATAS WILAYAH			
		BATAS LAUT TERITORIAL	BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF	BATAS LANDAS KONTINEN	BATAS TERTENTU
	Perairan selatan Pulau Jawa		Selesai (Belum Ratifikasi) 1997	Selesai (Belum Ratifikasi) 1997	

Pada **Tabel 9** dibawah adalah tabulasi Ratifikasi Perjanjian Batas Maritim Indonesia, sehingga perjanjian batas Negara Indonesia dengan negara tetangga sudah memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum di Indonesia. Informasi ini didapatkan dari Pushidrosal selaku lembaga teknis bersama BIG dalam perundingan batas maritim Indonesia.

Tabel 9 Perjanjian Garis Batas Maritim dengan negara tetangga

INDONESIA - MALAYSIA	
1. Landas Kontinen , 27 Otober 1969	Keppres No. 89 tahun 1969
2. Laut Teritorial di Selat Malaka, 17 Maret 1970	UU No. 2 tahun 1971
INDONESIA - SINGAPURA	
3. Laut Teritorial di Selat Singapura, 25 Mei 1973	UU No. 7 tahun 1973
4. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian barat, 10 Maret 2009	UU No. 4 tahun 2010
5. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian timur, 3 September 2014	UU No. 1 Tahun 2017
INDONESIA - AUSTRALIA - PNG	
6. Dasar Laut Tertentu, 18 Mei 1971	Keppres No. 42 tahun 1971
7. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, Tambahan terhadap Persetujuan tanggal 18 Mei 1971, 9 Oktober 1972	Keppres No. 66 tahun 1972
	UU No. 6 tahun 1973

8. Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 12 Februari 1973	Keppres No.21 Tahun 1982
9. Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 13 Desember 1980	-
10. ZEE dan Dasar Laut Tertentu, 14 Maret 1997	
INDONESIA – MALAYSIA - THAILAND	
11. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka (juga dengan Thailand), 21 December 1971	Keppres No. 20 tahun 1972
INDONESIA - THAILAND	
12. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, 17 Desember 1971	Keppres No. 21 tahun 1972
13. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975	Keppres No. 1 tahun 1977
INDONESIA - INDIA	
14. Garis Batas Landas Kontinen, 8 Agustus 1974	Keppres No. 51 tahun 1974
15. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977	Keppres No. 26 tahun 1977
INDONESIA – INDIA - THAILAND	
16. Trijunction Point dan Garis Batas dari Garis-garis Batas Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978	Keppres No. 24 tahun 1978
INDONESIA - VIETNAM	
17. Garis Batas Landas Kontinen di Utara P. Natuna, 26 Juni 2003	UU No. 18 tahun 2007
INDONESIA - FILIPINA	
18. Garis Batas ZEE di Laut Sulawesi, 23 Mei 2014	UU No. 4 Tahun 2017

B. CAPAIAN TUJUAN PROYEK PERUBAHAN JANGKA PENDEK

1) IDENTIFIKASI DAN EVALUASI SARPRAS DASAR PPKT

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan bertugas: a) menciptakan kebijakan program pembangunan perbatasan; b) menetapkan rencana kebutuhan anggaran; c) mengoordinasikan pelaksanaan; dan d) melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan, bahwa Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Mengacu pada konsiderans tersebut diatas dan dalam rangka optimalisasi pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara, maka Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 pada Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Kedeputan Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Sekretariat Tetap BNPP akan melaksanakan program kerja dalam kegiatan "Koordinasi Perencanaan Dan Fasilitas Pelaksanaan Sarpras Di PPKT Tidak Berpenduduk". Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2020- 2024 yang mendefinisikan apa yang akan dicapai melalui Program dan Kegiatan tahunan. Dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas Nasional Keasdepan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara pada Tahun 2022 akan melaksanakan Identifikasi dan Inventarisasi Sarpras Hankam Non Alutista di PPKT Tidak Berpenduduk pada 49 PPKT tidak berpenduduk yang juga telah dilaksanakan pada Tahun 2021 sebanyak 41 PPKT namun terlaksana pada 35 PPKT karena adanya 6 PPKT yang *direfocusing*. Pada Tahun 2022, Asdep Taslaud sudah melakukan

koordinasi dan kunjungan langsung di 41 PPKT, 8 PPKT rencananya akan segera disurvei pada tahun mendatang. Adapun data selengkapnya hasil survei dari 49 dapat dilihat pada **Tabel 10**.

Pada Tabel dapat dilihat ada 23 PPKT telah dikunjungi dalam rentang tahun 2020-2021, sebagian besar PPKT yang dikunjungi berada di Indonesia bagian barat meliputi PPKT yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan beberapa PPKT yang berada di Indonesia bagian tengah meliputi PPKT yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. PPKT yang dilakukan koordinasi dimaksudkan BNPP sudah koordinasi kepada Pemerintah Daerah mengenai survei identifikasi dan urgensi pentingnya PPKT. BNPP mendapat data-data sekunder dari Pemerintah Daerah untuk melengkapi data survei sarana dan prasarana. Data tersebut hanya informasi secara lisan dan belum ada bukti pasti keadaan survei sarana dan prasarana. Hasil koordinasi tentunya didapatkan Pemda tidak mempunyai dokumentasi mengenai Pulau terkhusus sarana dan prasarana yang dibutuhkan. BNPP sampai sekarang sudah melakukan koordinasi ke 13 PPKT dengan provinsi/pemda terkait. 13 PPKT sebagian besar merupakan Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Sumatera Utara dan Aceh. PPKT yang sebenarnya secara resmi belum dikunjungi yaitu Pulau Batu Mandi, Pulau Rondo namun sudah dikoordinasikan kepada Pemda, dan ada K/L lain terkait akhir- akhir ini telah mengunjungi Pulau tersebut dan BNPP mendapat memberi informasi terbaru.

Untuk Indonesia bagian Barat, meliputi Kepri hanya 2 PPKT yang belum dikunjungi yaitu P. Kelapa dan P. Tokongboro. Alasan tidak mengunjungi Pulau tersebut dikarenakan pulau tersebut tidak berdekatan dengan kebanyakan PPKT di Kepri, seperti P. Kelapa yang lebih dekat kepada Kalimantan Utara, perbatasan Malaysia Serawak, Indonesia. Untuk 2 PPKT dianggap prioritas bawah, prioritas utama kunjungan Survei Asdep Taslaud BNPP meliputi PPKT yang berada di Indonesia bagian Timur. Terakhir pada bulan Mei – Agustus, sudah mengunjungi 5 PPKT yang semuanya berada di Indonesia bagian tengah/timur. Selanjutnya bulan Oktober, Asdep Taslaud akan melakukan kunjungan sekaligus koordinasi dengan Pemda Maluku dan Maluku Utara terkait PPKT, diikuti selanjutnya di PPKT di Papua Selatan, P. Laag dan P. Puriri.

Tabel 10 Progress Survei ke 49 PPKT

No.	Nama PPKT	Provinsi
1	Rondo	Aceh
2	Berhala	Sumut
3	Batu Mandi	Riau
4	Berakit	Kepri
5	Sentut	Kepri
6	Malang Berdaun	Kepri
7	Tokong Malang Biru	Kepri
8	Damar	Kepri
9	Mangkai	Kepri
10	Tokong Nanas	Kepri
11	Tokong Berlayar	Kepri
12	Tokong Boro	Kepri
13	Semiun	Kepri
14	Sebetul	Kepri
15	Sekatung	Kepri
16	Senoa	Kepri
17	Kepala	Kepri
18	Tokong Hiu/Iyu Kecil	Kepri
19	Nipa	Kepri
20	Batu Berhanti	Kepri
21	Nongsa/Putri	Kepri
22	Karang Unarang	Kaltara
23	Sambit	Kaltim
24	Dolangan	Sulteng
25	Solando/Salando	Sulteng
26	Bongkil/Bangkit	Sulut
27	Batu Bawaikang	Sulut
28	Intata	Sulut
29	Yiew Besar/ Jiew	Maluku Utara
30	Ararkula	Maluku

No.	Nama PPKT	Provinsi
31	Asutubun	Maluku
32	Batarkusu	Maluku
33	Batu Goyang	Maluku
34	Enu	Maluku
35	Karang	Maluku
36	Karaweira	Maluku
37	Kultubai Utara	Maluku
38	Kultubai Selatan	Maluku
39	Fani	Papua Barat
40	Miossu	Papua Barat
41	Moff/Budd	Papua Barat
42	Fanildo	Papua
43	Habee	Papua
44	Komolom	Papua
45	Laag	Papua
46	Puriri	Papua
47	Dana	NTT
48	Ndana	NTT
49	Batek	NTT

Keterangan:

23

PPKT yang sudah di survey sampai dengan 2021

7

PPKT yang belum dilakukan survey dan belum di fasilitasi di 2021

13

PPKT yang sudah dilakukan fasilitasi koordinasi via daring dengan pemda setempat di 2021

6

PPKT yang sudah dilakukan survey dan/ dikoordinasikan tahun 2022

2) PEMBUATAN BUKU DIGITAL HASIL SURVEI PPKT

Perencanaan survei PPKT berupa pembuatan TOR (*Term of Reference*) beserta Surat Tugas (ST) untuk personel yang ditugaskan untuk survei. Hasil survei harus disesuaikan dengan *Term of Reference* sebagai keluaran berupa laporan Nota Dinas kepada Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Sekretaris BNPP. Isi dari laporan Nota Dinas berisi rekap perjalanan survei termasuk hasil koordinasi dengan Pemda setempat, observasi deskripsi penjelasan sarana dan prasarana hankam non-alutsista. Hasil lain dari nota dinas didampingi laporan dokumentasi, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang sudah ditandatangani.

Hasil dari survei PPKT sebagian besar berupa data kualitatif yang menjelaskan deskriptif naratif mengenai sarpras tersebut, dan berupa hasil wawancara dari pemerintah setempat, atau wawancara dengan penduduk yang memang tinggal di daerah tersebut. Tiap-tiap PPKT ada juga yang berisi informasi spasial berupa koordinat tengah titik pulau, koordinat TD di pulau tersebut dan koordinat PTR. Koordinat tersebut dapat menjadikan aspek *database* menjadi aspek basis data spasial dimana informasi survei didapat dapat dihubungkan dengan aspek koordinat di peta, sehingga visualisasi informasi menjadi interaktif berbasis peta.



Gambar 4 Buku Digital Hasil Survei PPKT Edisi 2022

Sebelumnya hasil survei identifikasi dan evaluasi sarpras di PPKT sudah terdapat dalam satu buku digital dengan judul *Survei Identifikasi dan Evaluasi Sarana Prasarana di PPKT Tidak Berpenduduk*, Edisi 1 Tahun 2021. Buku tersebut sudah dilakukan revisi

Edisi 2 Tahun 2022 pada **Gambar 4**, dengan berbagai macam perubahan termasuk, penambahan informasi dari hasil PPKT yang sudah dikunjungi tahun 2022 beserta informasi pendukung yang didapat dari BPN dan KKP yang sebelumnya sudah pernah melakukan pendataan di 111 PPKT. Hasil cek survei sarana prasarana hankam non-alutsista sebelumnya dilakukan dalam matriks yang sudah diberikan di K/L yang berkaitan dan sudah ditandatangani oleh Sekretaris BNPP pada **Gambar 5**. Adapun ada beberapa revisi yang dilakukan terhadap data yang lama yang sudah diberikan kepada pihak K/L terkait, dan sudah disusun draft surat revisi tersebut.

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : BPN/BA.01/1233/V/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Hal : 1 dari 1

Jakarta, 12 Mei 2022

Hasil Identifikasi dan Evaluasi Sarpras Hankam
Non-Alutsista di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT)

Yth. Para Pejabat dalam Daerah Tersempit
Di Tempat

Selubungan dengan pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), khususnya PPKT Tidak Berpenduduk, dengan hormat dipaparkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) mengamanatkan bahwa dalam rangka pengoptimalan pelayanan dan keamanan di perbatasan negara dan pulau-pulau terluar, perlu pengoptimalan sarana dan prasarana perbatasan dan keamanan (sarpras hankam) non-alutsista di PPKT, khususnya PPKT Tidak Berpenduduk.

2. Untuk mendukung pelaksanaan amanat RPJMN 2020-2024 di atas, BNPP telah melaksanakan identifikasi dan evaluasi sarpras hankam non-alutsista pada 38 PPKT dan terdapat 49 PPKT untuk tahun 2020-2024. Saat ini PPKT akan dimulai pada tahun 2022 ini.

3. Terkait dengan hal-hal di atas, terlampir disampaikan ringkasan hasil identifikasi dan evaluasi sarpras hankam non-alutsista pada 38 PPKT di bawah, yang mencakup masa pengoptimalan, kondisi sarana, dan prasarana. Sarpras hankam non-alutsista (SNAP) berupa sarana dan prasarana (sarpras hankam) non-alutsista di PPKT, khususnya PPKT Tidak Berpenduduk, untuk menjadi bahan koordinasi perencanaan dan penganggaran di lingkungan instansi terkait.

4. Dalam hal membutuhkan konfirmasi atau informasi terkait hasil evaluasi, dapat menghubungi Asisten Deputi Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil dan Uluksa pada Deputi Bidang Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil, BNPP, dengan menyalurkan Sal. Elektronik P. Dengan hormat, surat ini ditandatangani oleh Sekretaris BNPP.

Ditujukan untuk menjadi maklum. Atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

h. KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

SEKRETARIS

RESTUARDY DAUD, M.Sc.

h. RESTUARDY DAUD, M.Sc.

Terselamatkan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah BNPP.
2. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP.
3. Menteri Pertahanan.
4. Menteri Kelautan dan Perikanan.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
6. Panglima TNI.

Hasil Survei Sarpras Hankam Non Alutsista 49 PPKT

No.	NAMA PPKT	PROVINSI	KABUPATEN	KELOMPOK KEBUDUDAYAAN				KELOMPOK KEBUDUDAYAAN				KELOMPOK KEBUDUDAYAAN				KELOMPOK KEBUDUDAYAAN				KELOMPOK KEBUDUDAYAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				MD		MD		MD		MD		MD		MD		MD		MD		MD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	Bangka	Bangka	Bangka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Gambar 5 Surat Hasil Survei Sarpras Hankam ke K/L terkait

3) PEMBUATAN BUKU DIGITAL TENTANG PROGRES BATAS MARITIM

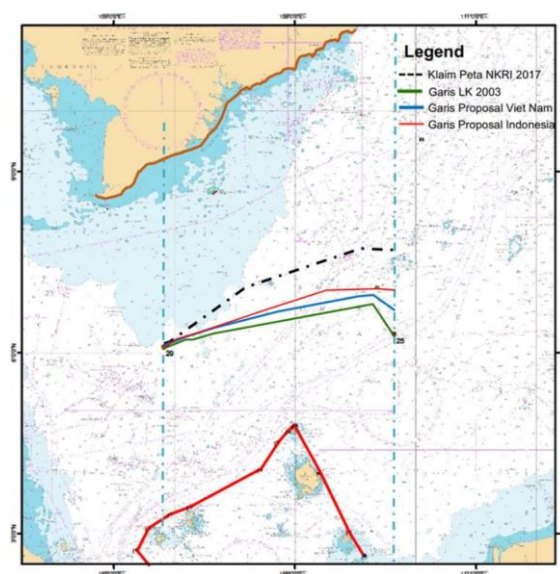
Adapun untuk informasi batas maritim sudah dilakukan pendataan, pengumpulan informasi terkini dari koordinasi K/L terutama Kementerian Luar Negeri dalam suatu buku digital berjudul Batas Maritim Indonesia (**Gambar 6**). Buku Batas Maritim merupakan bentuk upaya pengintegrasian data dan informasi batas maritim dalam suatu *database* batas maritim Indonesia. Buku batas maritim ini ditujukan untuk rekam jejak perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, baik perjanjian yang sudah selesai maupun yang masih dalam perundingan.

Informasi terbaru yang ditampilkan dalam buku batas maritim edisi I tahun 2022 adalah informasi terbaru dari perundingan batas maritim Indonesia dan Vietnam yang selama

12 Tahun perundingan tidak mengalami banyak kemajuan seperti pada **Gambar 7**. Pada tahun 2022 ini Vietnam bersedia tinggalkan prinsip single line dan setuju menggunakan prinsip dual line untuk batas ZEE dan batas Landas Kontinen. Kemajuan dari batas ZEE Indonesia dan Vietnam adalah Vietnam mengusulkan garis ZEE di utara garis LK 2003 dengan Remaining area: 6.455 km² namun Tim Teknis Indonesia terus perjuangkan kepentingan Indonesia untuk memajukan garis batas ZEE. Selain Indonesia dan Vietnam, pada buku batas maritim edisi I tahun 2022 ini juga ditampilkan informasi dari Kemlu terkait status perundingan yang terjadi di tahun 2022 yaitu segmen yang paling berpotensi untuk disepakati dalam waktu dekat.

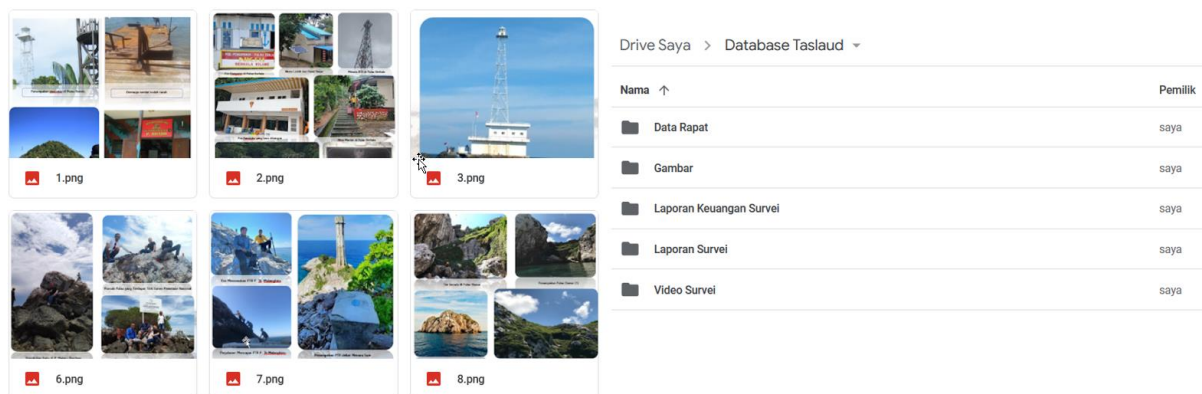


Gambar 6 Cover buku digital Batas Maritim



Gambar 7 Isu Terbaru Batas Maritim Indonesia - Vietnam

Upload Data Media berupa data foto, video, secara online di Google Drive (**Gambar 9**). Pembentukan *database* berupa folder yang berdasarkan nama field informasi sehingga didapat beberapa informasi folder yang berisi file dari tiap record yang penamaan berdasarkan primary key seperti pada folder Gambar, untuk file nama 1.png pada Gambar merupakan data gambar untuk P. Rondo. Sistem tersebut akan digunakan untuk file lainnya dengan penambahan berbagai kriteria.



Gambar 9 Penggunaan Google Drive dalam Penyimpanan Online

Untuk menghubungkan data yang tersimpan di Google Drive dengan *database* tabel di Google Spreadsheet maka diperlukan mendapatkan file link seperti pada **Gambar 10**, dari tiap gambar yang dimodifikasi dan ditempelkan pada Record dari Field Gambar sehingga tiap Pulau memiliki file link berbeda. Hal tersebut nanti dilakukan sedemikian untuk **Lampiran** laporan perjalanan, nota dinas bahkan hasil rapat yang berhubungan dengan data tiap-tiap PPKT yang dihubungkan melalui link di pendataan *database*.

A	B	U	V	W	X	
No.	Pulau	Gambar	Status	Tanggal Survei	Deskripsi Pulau	Ke
1	Rondo	https://drive.google.com/file/d/1Rondo/view?usp=sharing	Sudah Dikoordinasikan		Pulau Rondo masuk	-
2	Berhala	https://drive.google.com/file/d/1Berhala/view?usp=sharing	Sudah Disurvei		Berhala merupakan	-
3	Batumandi	https://drive.google.com/file/d/1Batumandi/view?usp=sharing	Sudah Dikoordinasikan		Kondisi Pulau Batumandi	-
4	Berakit	https://drive.google.com/file/d/1Berakit/view?usp=sharing	Sudah Disurvei		Kondisi eksisting	-
5	Sentut	https://drive.google.com/file/d/1Sentut/view?usp=sharing	Sudah Disurvei		Pulau Sentut luas	-
6	Malang Berdaun	https://drive.google.com/file/d/1Malang Berdaun/view?usp=sharing	Sudah Disurvei		Pulau Malang Berdaun	-
7	Tokong Malang	https://drive.google.com/file/d/1Tokong Malang/view?usp=sharing	Sudah Disurvei			-
8	Damar	https://drive.google.com/file/d/1Damar/view?usp=sharing	Sudah Disurvei			-
9	Mangkai	https://drive.google.com/file/d/1Mangkai/view?usp=sharing	Sudah Disurvei			-

Gambar 10 Menghubungkan Data Google Drive ke Basis Data

5) DIGITALISASI DATA PROGRES BATAS MARITIM DALAM BASIS DATA

Basis data juga dapat diartikan sebagai kumpulan data yang *non-redundant* yang berbagi pakai diantara berbagai sistem aplikasi. Dalam hal ini tujuan agar data batas maritim tidak *redundant* maka perlu adanya *entitas* atau ID. Id adalah kode unik yang melekat disatu data, yang ketika dilakukan pemanggilan data sesuai dengan ID maka semua hal yang berkaitan dengan keunikan ID tersebut akan muncul. Hubungan *entitas/id* dengan data lainnya disebut *relationship*. Dalam basis data maritim ini yang menjadi entitas yaitu koordinat perjanjian (lintang dan bujur), sedangkan *relations* yang akan ditampilkan dalam basis data ini yaitu informasi tahun perjanjian, perjanjian tersebut merupakan perjanjian batas dengan negara apa, peta dari perjanjian tersebut, perjanjian tersebut menggambarkan batas pada zona maritim apa.

Tujuan dan maksud dilakukannya penyusunan Basis Data Batas Maritim yaitu: Memberikan gambaran terkait perjanjian batas maritim Indonesia dan negara tetangga; Sebagai bentuk upaya pengintegrasian data dan informasi Batas Maritim dalam Sistem Informasi Perbatasan; dan Sebagai sumber informasi terkait status dan perkembangan perjanjian batas maritim Indonesia dan negara tetangga.

Batas Maritim Indonesia

Batas Maritim - Google Spreads

← → ↺

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C80r1582NblIAoZfb-Wb4E8WwpTgGNK-8NkuVhmnSQ/edit#gid=0

☆

📄

📄

📄

Batas Maritim

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

Terakhir diedit kemarin pada pukul 17.21

🔍

100%

Rp

%

0.00

123

Arial

11

B

I

U

A

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

Gambar 11 Basls Data Batas Maritim

Pada **Gambar 11** diatas adalah bentuk basis data batas maritim yang dibuat secara online dengan tujuan untuk memudahkan akses oleh siapa saja yang memiliki izin dan

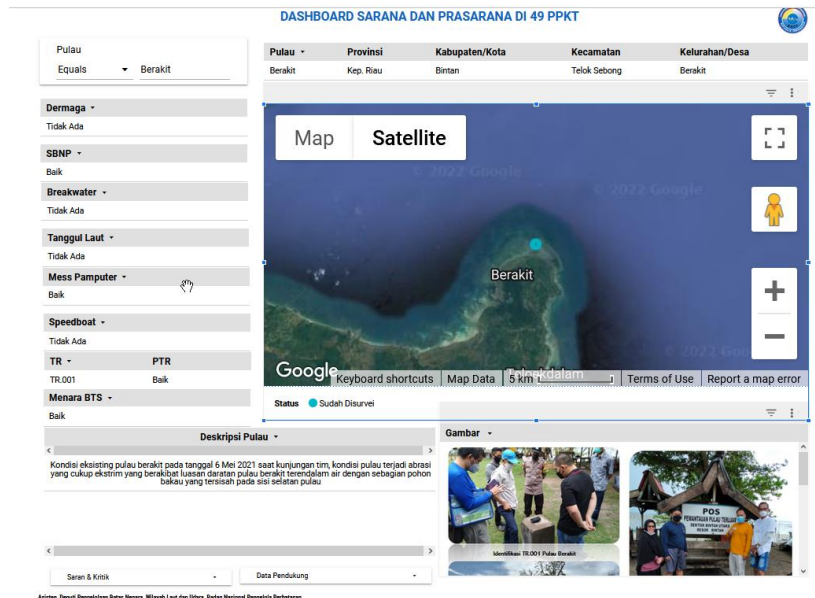
dapat dibuka dimanapun dengan syarat adanya akses internet saat membukanya. Basis data online yang digunakan kali ini yaitu Google Sheets, dengan alasan aplikasi yang ringan untuk digunakan antar pengguna dengan perangkat lunak berbasis *cloud computing*, dapat digunakan diberbagai sistem operasi baik desktop ataupun smartphone, selain itu juga web ini gratis. Bentuk Basis Dasis Data memiliki primary key dalam bentuk *Nama Titik* yang berupa koordinat Titik-Titik Batas Perundingan yang didapat dari dokumen Perjanjian antar negara.

6) VISUALISASI INFORMASI PADA BASIS DATA PPKT

Visualisasi menggunakan Google Data Studio untuk versi Beta, dimana di Google Data Studio dapat menampilkan analisis dan rangkuman data dalam bentuk tabel, dan peta interaktif. Semua data terhubung dalam basis data Google Spreadsheet yang sudah dibuat, jika ada perubahan di basis data akan otomatis terekap di dashboard visualisasi. Rekap basis data dapat terupdate otomatis paling lama 15 menit setelah data update di Basis Data.

Basis data memiliki koordinat sehingga visualisasi dapat berbasis spasial mengikat kepada koordinat Peta. Visualisasi basis data menggunakan basemap citra satelit beserta informasi toponimi dari provider Google Earth/Google Maps. Dengan menggunakan citra Google Earth memiliki beberapa kekurangan seperti beberapa data citra yang masih belum tercover untuk semua PPKT seperti P. Batu Mandi yang tidak tertera visual citra pulaunya di Google Earth melainkan berupa lautan lepas. Kekurangan lainnya dalam visualisasi peta tidak bisa memasukkan file shapefile berupa garis sehingga informasi seperti Batas Laut (Garis Pangkal, LT, ZEE, Landas Kontinen). Begitu juga dengan file shapefile polygon seperti batas administrasi daerah yang tidak dapat ditampilkan di peta. Alternatif fitur batas administrasi sudah tersedia di data Google Earth beserta toponiminya.

Hasil visualisasi dari basis data dapat dilihat pada **Gambar 12** atau dapat diakses pada link <http://bit.ly/surveippkt> . Visualisasi berupa dashboard dengan informasi utama berupa kondisi 8(delapan) sarpras, jenis informasi berupa keadaan Tidak Ada, Baik dan Rusak. Dalam dashboard juga tertera informasi pendukung seperti batas administrasi, deskripsi pulau dan Gambar Hasil Survei.

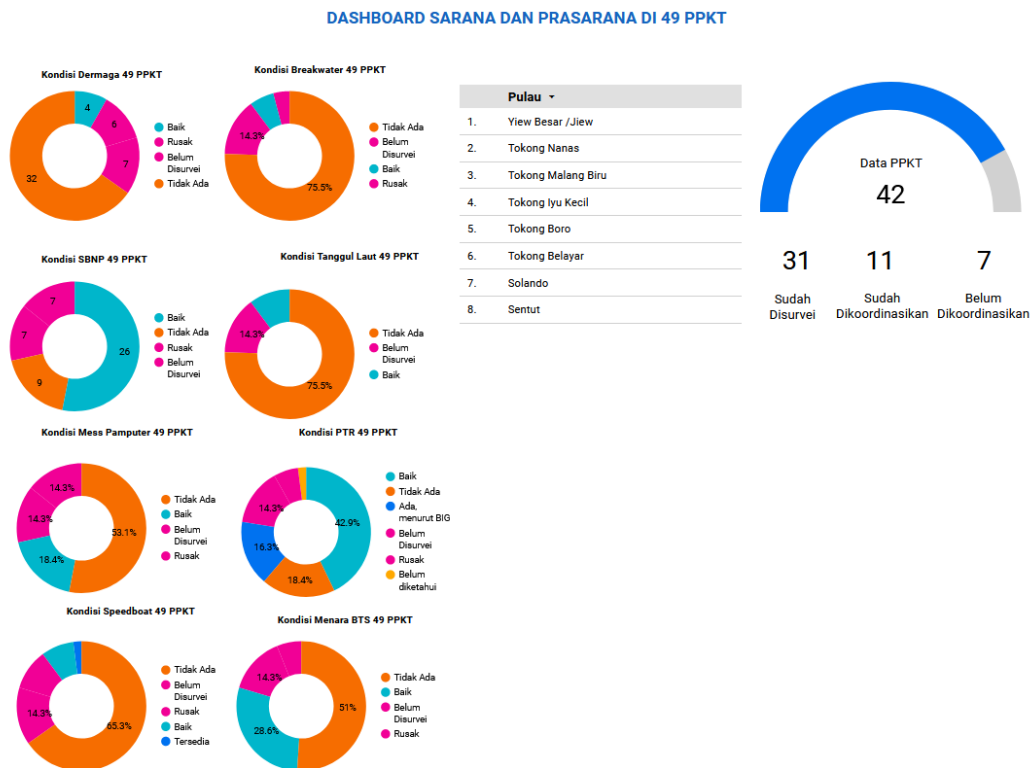


Gambar 12 Visualisasi Basis Data PPKT di Google Data Studio

Adapun beberapa fitur yang dapat digunakan pada Dashboard ini antara lain:

- 1) Memiliki fitur pencarian berdasarkan nama Pulau, fitur pencarian harus sesuai dengan penamaan di Pulau, jika pada Basis Data penamaan pulau “Berakit” namun jika dicari “berakit” hasil tidak akan tampil, sehingga fitur pencarian *sensitive case* berpengaruh terhadap huruf besar dan huruf kecil. Fitur pencarian akan otomatis merujuk ke koordinat pulau yang dicari di Peta.
- 2) Fitur Pengembangan Saran dan Kritik berupa masukan dari pengguna/user kepada pengembangan termasuk juga *updating* informasi dari pengguna. Juga beberapa informasi saran dan kritik yang menyangkut visualisasi dashboard. Fitur saran dan kritik berupa input informasi yang otomatis kedata di Basis Data yang mengikat kepada Pulau. Sampai saat ini fitur masih dalam tahap perancangan dan masih beberapa error.
- 3) Dalam dashboard terdapat Data Pendukung, dimana pada dashboard akan terhubung dengan data -data laporan, hasil rapat, video yang berhubungan dengan PPKT tersebut. Kedepannya fitur ini akan dibuat menyatu dalam dashboard sehingga pengguna tidak perlu keluar dari dashboard.
- 4) Pada dashboard dapat dilakukan analisis data menggunakan grafik, dan beberapa parameter visual seperti pada **Gambar 13** yang memudahkan

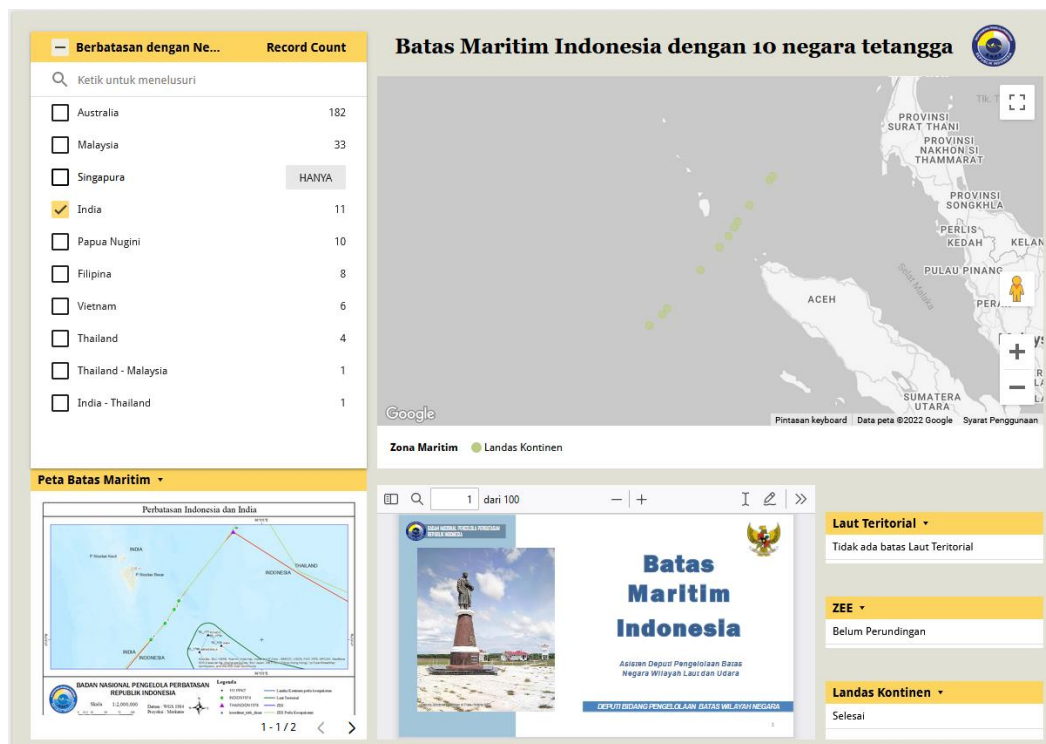
pengguna dalam melihat perkembangan update identifikasi sarpras PPKT. Informasi tersebut otomatis terhubung dengan data basis data PPKT yang ada.



Gambar 13 Dashboard Analisis Sarpras di 49 PPKT

7) VISUALISASI INFORMASI PADA BASIS DATA BATAS MARITIM

Mempertimbangkan perangkat lunak yang gratis dan mudah untuk diakses pengguna google sheet juga dapat dikolaborasikan dengan Google Data Studio sebagai dashboard basis data batas maritim sebagai visualisasi basis data. Tampilan dashboard basis data dalam google studio dapat diakses di situs <https://bit.ly/DBMaritim> ditampilkan pada **Gambar 14** dibawah.



Gambar 14 Tampilan *Dashboard* Batas Maritim Indonesia

Informasi yang ditampilkan dalam dashboard Batas Maritim Indonesia oleh Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara yaitu:

1. Negara yang berbatasan
2. Tahun Perjanjian
3. Segmen Batas yang disebutkan dalam perjanjian
4. Peta Batas Maritim
5. Link menuju e-book batas maritime

8) KOORDINASI K/L DALAM PEMBANGUNAN BASIS DATA PPKT

Keasdepan Taslaud sudah melaksanakan rapat koordinasi mengenai hasil dari pembangunan basis data PPKT kepada K/L terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana hankam non-alutsista di PPKT Tidak Berpenduduk. Rapat koordinasi pada dasarnya bermaksud untuk memperkenalkan basis data yang telah dibuat kepada K/L terkait agar pihak K/L dapat memberi saran kedepan dalam pengembangan dan

pemenuhan informasi sarpras tersebut dan aktualisasi pemenuhan sarpras di PPKT tersebut.

Rapat koordinasi dilakukan selama 2(dua) hari pada tanggal 25 Oktober dan 26 Oktober 2022. Agenda kedua rapat yaitu Penyusunan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) Dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT.

- **Rapat Basis Data PPKT Hari Pertama, 25 Oktober 2022**

Rapat Penyusunan Basis Data PPKT Dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT dilaksanakan di Hotel Orchardz Industri, Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2022 seperti pada Undangan Peserta rapat di **Gambar 15**, untuk undangan selengkapnya dapat dilihat di **Lampiran**. Hari pertama rapat fokus kepada pembahasan pembuatan basis data termasuk sosialisasi urgensi basis data untuk menangani permasalahan pokok yang selama ini Keasdepan Taslaud alami.



Gambar 15 Undangan Rapat Basis Data 25 Oktober 2022

Rapat dibuka oleh Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan, seperti pada **Gambar 18**, dan dihadiri oleh para pejabat yang mewakili K/L terkait (Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan,

Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mabes TNI, dan Badan Keamanan Laut) yang dapat dilihat pada daftar hadir di **Gambar 16**, dan selengkapnya pada **Lampiran**.

DAFTAR HADIR
RAPAT ANALISA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA HANKAM NON ALUTSISTA YANG DIBUTUHKAN UNTUK PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DI PPKT PENANGANAN KHUSUS
BERTEMPAT DI HOTEL ORCHARDZ INDUSTRI JAKARTA, SELASA, 25 OKTOBER 2022

No.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	NPWP	TANDA TANGAN
1	LETTU (KH) RIZAL T.	PAUR ADAPUS TANAH DISPASALAN	84.002.836.9-999.000	
2	Kol. Joni Jumeadi	Bid. Koor. Hasmanusa/Kebijakan	47.327.624.4-999.000	
3	LEDA CPM HAM HAMS	BAIS TNI	88.008.255.2-801.000	
4	LIE WUT (D) SUCIPTO	Dimutihan KEBUN	44.206.695.7-421.000	
5	ROY SAGALA	BAKTI Kominfo	47.005.208.7-411.000	
6	HERU PURWANTO	KABANGSA ROBBYU KEBUN	45.021.053.9-901.000	
7	NAUFAL SANCA LEYANDHIKA	PAUS TATA RUMAH/DI. PRL-KPP	70.291.200.8-412.000	
8	Franciscus Agisi Mahendra	Ditjak Madya Direktorat Bina	46.492.655.8-000.000	
9	WIC. HADI UTOMO	AGALIS DALPROGAS KEBUN		
10	ARIF SUDIAWAT	Sekret. KSNT - DI. PRL-KPP	89.249.351.6-412.000	
11	S. HARLHUNG	Palau (C)		
12	MPP. BAROLA			
13	Amirah Rahmi	Staf Taktik. KPP	53.729.245.020-3.000	
14	Frederic S.H. Winast.	Staf (Korlud) KPP	63.502.462.021.000	
15	Williano Rahmawati	Korlud. Madya. Pribadi KPP		

Gambar 16 Daftar Hadir Rapat Basis Data 25 Oktober 2022

DAFTAR HADIR NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT ANALISA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA HANKAM NON ALUTSISTA YANG DIBUTUHKAN UNTUK PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DI PPKT PENANGANAN KHUSUS
BERTEMPAT DI HOTEL ORCHARDZ INDUSTRI JAKARTA, SELASA, 25 OKTOBER 2022

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT EMAIL	NPWP	TANDA TANGAN
1	ROY SAGALA	Staf Ahli Dir. Infrastruktur BAKTI Kominfo	j.roysagala@gmail.com	47.005.208.7-411.000	
2	Vutikuo Julum	Ardeop Witar. Staf. Komando. Pribadi	alcherhettie.es@gmail.com		
3	Bambang Irawan	Dir. K. L. Pribadi			
4	RIDO BATUBARA	Atu Madya KPP			
5	Harry Prastowo	Korlud. T. Disfusi. Madya	harryprastowo@gmail.com	48.246.047.9-112.000	
6	Wiro HN	Anal. Pribadi. Komando			

Gambar 17 Daftar Hadir Narasumber Rapat Basis Data, 25 Oktober 2022

Pada rapat ini, pembahasan basis data PPKT mengundang narasumber terkait yang berhubungan dengan pemenuhan sarana prasarana PPKT seperti pada daftar hadir Undangan pada **Gambar 17**. Untuk pemenuhan sarpras khusus menara BTS yaitu BAKTI Kominfo, dan pos pamputer berupa Posal yang berhubungan dengan K/L Kemhan, TNI AL dan selaku pengarah BNPP yaitu Kemenko Polhukam.



Gambar 18 Asdep membuka Rapat Basis Data Hari Pertama, 25 Oktober 2022



Gambar 19 Pemaparan Materi oleh Narasumber

Pada rapat pihak K/L turut memberi informasi mengenai progres pemenuhan amanat RPJMN 2020-2024 terkhusus untuk pemenuhan sarpras hankam di PPKT yang seluruhnya dapat terangkum dalam hasil rapat berupa Nota Dinas yang dapat dilihat pada **Lampiran**. Rencana tindak lanjut Rapat Penyusunan Basis Data PPKT Dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT, Hotel Orchardz Industri pada 25 Oktober 2022 yaitu:

- a. Penyusunan basis data sarana prasarana PPKT yaitu mess pamputer/pos jaga, speedboat, dan BTS akan diintegrasikan dengan data sarpras hankam non alutsista lainnya di PPKT. Pengintegrasian ini akan disusun dalam laporan penyusunan basis data PPKT dalam rangka efektivitas pengelolaan batas maritim dan PPKT;
- b. Rapat tindak lanjut Penyusunan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT dilaksanakan pada tanggal 26 dan 28 Oktober 2022 dengan fokus pada Sarpras Hankam Non Alutsista yang telah dilakukan identifikasi di PPKT tidak berpenduduk dan penanganan khusus (breakwater, tanggul laut, Pilar Titik Referensi, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, dan dermaga);
- c. Hasil dari tahapan rapat dimaksud akan dikompilasi ke dalam laporan penyusunan basis data K/L teknis untuk memastikan program dimaksud telah atau belum masuk dalam dokumen perencanaan K/L khusus sarpras hankam non Alutsista 2023-2024.

- **Rapat Basis Data PPKT Hari Kedua, 26 Oktober 2022**

Rapat Penyusunan Basis Data PPKT Dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT dilaksanakan di Hotel Grand Cemara, Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2022 seperti pada Undangan rapat di **Gambar 20**, untuk undangan selengkapnya dapat dilihat di **Lampiran**. Rapat ini merupakan rapat hari kedua, lanjutan dari rapat pertama 25 Oktober 2022, di Hotel Orchardz Industri. Pada rapat ini berfokus kepada visualisasi interaktif informasi basis data yang terintegrasi secara daring dan *update* setiap waktu.



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**

DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

Jl. Kebon Sirih No. 31 Jakarta Pusat-10340 Tlp. (021)3142142 Web. <https://bnpp.go.id>

Nomor : BWN.84.01/2629/X/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 21 Oktober 2022

Yth. Pejabat dalam Daftar Terlampir
di -
Jakarta

Dengan hormat dipermaklumkan bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, akan melaksanakan rapat pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Grand Cemara Hotel, Jl. Cemara No. 1, RT 5/RW 3, Gondangdia,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
Agenda Rapat : Penyusunan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) dalam
Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT.
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap kehadiran Saudara/i sebagai peserta pada rapat dimaksud dengan membawa bahan yang relevan dengan agenda rapat sesuai lingkup tugas Saudara/i, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rapat dapat menghubungi Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara melalui Sdri. Yori Elfitriani (HP: 0822 8587 7894).

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**DEPUTI
BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA,**



Dr. ROBERT SIMBOLON, MPA

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris BNPP, sebagai laporan.

Gambar 20 Undangan Rapat Basis Data PPKT Lanjutan, 26 Oktober 2022

Rapat dibuka oleh Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan ST., MSi., seperti pada **Gambar 21** dan dihadiri oleh para pejabat yang mewakili K/L terkait (Kementerian Pertahanan, Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan, Direktorat Kenavigasian Kementerian Perhubungan), yang dapat dilihat pada daftar hadir di **Gambar 23**.



Gambar 21 Asdep Taslaud membuka Rapat Basis Data Hari Kedua, 26 Oktober 2022

Pada rapat lanjutan ini, pembahasan basis data PPKT mengundang narasumber terkait dengan pemenuhan sarana prasarana PPKT seperti pada daftar hadir Undangan pada **Gambar 22**. Adapun narasumber terkait dengan dermaga dan SBNP oleh Dir. Kepelabuhan, Dir. Kenavigasian Kemhub, Bappenas dan PUPR.

DAFTAR HADIR
RAPAT IDENTIFIKASI SARANA PRASARANA ALAT KOMUNIKASI DAN SARANA BANTU NAVIGASI DI PPKT TIDAK BERPENDUDUK
BERTEMPAT DI HOTEL GRAND CEMARA JAKARTA, RABU, 26 OKTOBER 2022

No.	N A M A	JABATAN/INSTANSI	NPWP	TANDA TANGAN
1	Lesta Cpm Hari Hari	BAIS TOL	86.128.257.2-801.000	
2	ASEP SOFYANU	DITACHAN KEMHUB	86.129.661.5-093.000	
3	Ellenlen	DIR NAU KEMHUB		
4	...	Koordinator PPKT		
5	Eko Arpana	Kor. Renc. Dan. W. D.		
6	...	Sekretaris		
7		
8		
9		
10	Ibnu Fathi	Sps. Titi		
11		
12	Agung R	Andika Kamban		
13		
14	M. Nur Fikman	Politi	34.412.661.001.000	
15		

Gambar 23 Daftar Hadir Peserta Rapat Basis Data PPKT 26 Oktober 2022

RAPAT IDENTIFIKASI SARANA PRASARANA ALAT KOMUNIKASI DAN SARANA BANTU NAVIGASI DI PPKT TIDAK BERPENDUDUK
BERTEMPAT DI HOTEL GRAND CEMARA JAKARTA, RABU, 26 OKTOBER 2022

No.	N A M A	JABATAN	ALAMAT EMAIL	NPWP	TANDA TANGAN
1	Brigjen TNI Novi Herianto	Dirdalprogar, Kemhan		15.368.761.1.223.000	
2	Laksma TNI Bambang Irawan	Direktur Ops. Laut, Bakamla		65.422.185.2.074.000	
3	Sinung Budi Prasjojo	Kadis Nautika Pusdikrosal		78.415.186.2.043.000	
4	Rahadi Bintang	Sub Koor. Kelompok Program Pembangunan Faspel, Kemhub		78.178.536.7.215.000	
5	Kol. Jerry Kristianto	Kasubdit Wtl. Udara, Ditwilhan, Kemhan		87.235.857.9.045.000	
6	Kombes Pol. Andy Kemala, S.IK, MM	...			

Gambar 22 Daftar Hadir Narasumber Rapat 26 Oktober 2022



Gambar 24 Pemaparan Materi dari Ditjen Kepelabuhan Kemhub

Pada rapat pihak K/L turut memberi informasi mengenai progres pemenuhan amanat RPJMN 2020-2024 terkhusus untuk pemenuhan sarpras hankam di PPKT yang seluruhnya dapat terangkum dalam hasil rapat berupa Nota Dinas yang dapat dilihat pada **Lampiran**. Rencana Tindak lanjut dari pembahasan rapat lanjutan basis data PPKT yaitu:

- a. Sebagai bahan dalam penyusunan basis data sarana prasarana yang diintegrasikan dengan data sarpras hankam non alutsista di PPKT, pengintegrasian ini akan disusun dalam laporan penyusunan basis data PPKT dalam rangka efektivitas pengelolaan batas maritim dan PPKT;
- b. Dalam pemaparan materi oleh Dir. Kepelabuhan pada **Gambar 24**. Pembangunan pelabuhan, dermaga/jetty akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan keberadaan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, untuk memastikan masuk atau tidaknya dalam program dan rencana Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan;
- c. Menyusun draft surat Rekomendasi Kebijakan yang ditujukan kepada Direktorat Kenavigasian untuk pembangunan menara suar di Pulau Puriri dan Pulau Komolom sebagai penanda keberadaan pulau, sebagai penentu posisi kapal, dan untuk mengetahui posisi bahaya di bawah permukaan laut dalam di wilayah perairan yang luas;

- d. BNPP menyusun rekomendasi kepada Kementerian Pertahanan untuk melakukan pemenuhan sarana prasarana pendukung sebagaimana Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan TNI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan, yang menyatakan bahwa pengamanan wilayah PPKT, Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Membangun pulau terluar strategis sebagai pangkalan militer; b. Menempatkan personel Pengamanan; c. Membangun Pos Pengamanan dan sarana prasarana pendukung dan; d. Memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

9) KOORDINASI K/L DALAM PEMBANGUNAN BASIS DATA BATAS MARITIM

Permasalahan batas maritim antar negara sampai sekarang masih banyak dalam masa perundingan dari kedua negara. Beberapa dari perundingan batas maritim antar negara ada yang sudah selesai dan disepakati bersama dan sudah diratifikasi dalam bentuk Undang-undang. Beberapa lagi dalam proses perundingan dan akhir-akhir ini ada yang diprediksi akan mengarah ke lampu hijau untuk selesai dan juga ada beberapa perundingan batas maritim yang semakin memanas.

Keasdepan Taslaud sebelumnya sudah pernah membahas, mengkaji, menyurvei mengenai perundingan batas maritim, namun hanya sebagai pengamat bukan subjek K/L teknis yang langsung berhubungan dengan perundingan tersebut. Dengan begitu Keasdepan Taslaud BNPP sangat aktif dalam berkoordinasi dengan K/L yang berhubungan langsung dengan penyelesaian masalah tersebut yaitu Kementerian Luar Negeri khususnya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.



Gambar 25 Undangan Peserta Rapat Basis Data Batas Maritim, 28 Oktober 2022

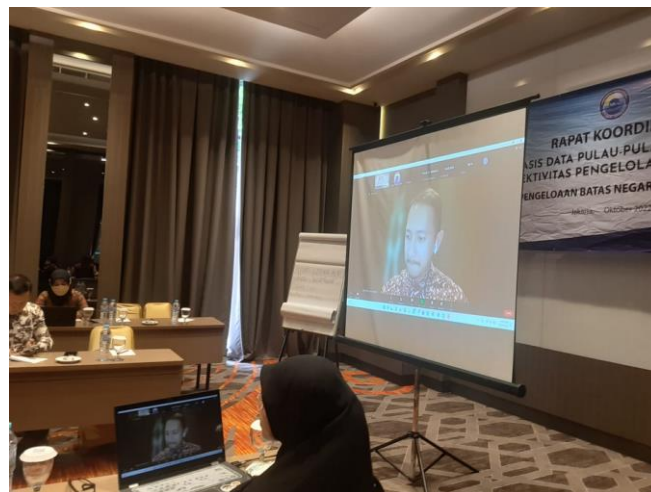
Mengenai informasi batas maritim, Keasdepan Taslaud sudah mengkaji dan mengumpulkan semua informasi baik yang terupdate dari koordinasi dengan K/L, terutama Kemlu. Dalam hal ini pembuatan basis data maritim, Keasdepan Taslaud melaksanakan rapat koordinasi mengenai Penyusunan Basis Data Batas Maritim dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 di Hotel Luminor seperti pada undangan pada **Gambar 25**, selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran**. Rapat ini merupakan rapat lanjutan rapat basis data PPKT pada 25-26 Oktober 2022.

Pada rapat sebelumnya fokus pada basis data PPKT, untuk rapat koordinasi ini lebih fokus kepada Pembuatan Basis Data Progres Batas Maritim Indonesia. Tujuan penyelenggaraan rapat adalah untuk mengintegrasikan data batas maritim dan PPKT serta mempermudah Kementerian/Lembaga dan BNPP dalam pencarian data batas maritim dan sarana prasarana di PPKT untuk koordinasi perencanaan/fasilitasi pelaksanaan program/kegiatan di BWN-KP, serta mendukung penguatan fungsi dan

kewenangan BNPP selaku Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk dan penanganan khusus.



Gambar 26 Rapat Basis Data Batas Maritim dipimpin oleh Asdep Taslaud



Gambar 27 Pemaparan Materi dari Ditjen HPK, Kemlu

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan ST, MSi. , seperti pada **Gambar 26**. Rapat dihadiri oleh para pejabat yang mewakili K/L terkait (Kementerian Polhukam, Pushidrosal, BIG, Kemlu, Bakamla, BAIS, Bappenas seperti pada daftar hadir pada **Gambar 28**, selengkapnya dapat dilihat di **Lampiran**. Narasumber utama rapat yaitu mewakili Direktorat Jenderal Hukum Dan Perjanjian Internasional, Haryo Nugroho yang hadir melalui *Zoom Conference* seperti pada Gambar. Selanjutnya narasumber penting lainnyaL: Deputi IV Bld. Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenkopolhukam; Aspamkersamaat Danpushidrosa, BIG seperti pada daftar hadir Undangan pada **Gambar 29**.

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN BAHAN MASUKAN RENCANA AKSI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH LAUT DAN UDARA TA. 2024 (T-2)
BERTEMPAT DI LUMINOR HOTEL KOTA, JAKARTA BARAT, JUM'AT 28 OKTOBER 2022

No.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	NPWP	TANDA TANGAN
1	Budhi Juzerman	Kasubdit Rencost Opsis Batas	78.931.203.0.617.00	
2	JAN L. BOY SUBIRNO	KASUBDIT INFORMASI DATA BAHAM	87.161.244.6.112.00	
3	Senda Anggar Prasetyo	APC Depdik Birelkor Hanney	89.249.995.1-421.00	
4	TRI MULOTONO	STAF KEMERKAS	69.987.550.6.343	
5	Adria Nugroho P	Staff Tasard		
6	Yusuf	Manajemen / KEMERKAS	80.111.121.11.000	
7	S. HATAMAH	PA/AN C4 / BAHAM	69.970.874.438.2100	
8	Hari Hari Priyanto	Danlim Mobile / BAS TNI	88.128.255.2.801.00	
9	Amir Pw	Rushmotel		
10	Rafael Juri Supriatno	Manajemen		
11	Andi L. Zaid	Baham		
12	Andi A. Widiyanti	KEMERKAS		
13	Andi Supriatno	Depdik Birelkor		
14	Suci	Sopir Markas TNI		
15	Andi H. Widiyanti	Andi H. Widiyanti		

Gambar 28 Daftar Hadir Peserta Rapat Basis Data Batas Maritim, 25 Oktober 2022

DAFTAR HADIR NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT PENYUSUNAN BAHAN MASUKAN RENCANA AKSI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH LAUT DAN UDARA TA. 2024 (T-2)
BERTEMPAT DI LUMINOR HOTEL KOTA, JAKARTA BARAT, JUM'AT 28 OKTOBER 2022

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT EMAIL	NPWP	TANDA TANGAN
1	Agung Tri Haryono	Depdik Birelkor Hanney Polhutan		25.149.575.0-640.00	
2	KOLONEL AJAR R	Agamakeras			
3	Arif Fahrman	Surta PPRW	arif.fahrman@kij.go.id	89.393.928.0.522.000	
4	Sopo Dan D	Direktori, Kemendik			
5	DAVID HASTUTI	Korplaut Baham			
6	Rita Basri	Manajemen KEMERKAS			
7	Haris Budi Anggoro	Kab Batas laut, Kemendik			

Gambar 29 Daftar Hadir Narasumber Rapat Basis Data Batas Maritim, 25 Oktober 2022

Pada rapat pihak K/L turut memberi informasi mengenai isu strategis mengenai permasalahan batas maritim Indonesia dengan negara lain yang belum selesai seperti Laut Natuna Utara, Ambalat yang penuh kontroversi. Pihak Kemlu juga memberi aspek-aspek penting bagaimana perkembangan penyelesaian batas maritim Indonesia. Adapun informasi tersebut seluruhnya terangkum dalam hasil rapat berupa Nota Dinas

yang dapat dilihat pada **Lampiran**. Untuk rencana Tindak lanjut dari pembahasan rapat basis data Batas Maritim yaitu:

- a. Hasil pertemuan FGD yang telah dilaksanakan pada tanggal 15, 26 dan 28 Oktober 2022 dengan peserta K/L sesuai dengan tanggungjawab dalam pemenuhan sarpras hankam non alutsista yang menjadi bahan program tanggungjawab masing-masing.
- b. K/L mendukung BNPP melakukan penyusunan basis data sarpras hankam non alutsista yang dibutuhkan di PPKT serta dukungan terkait data selanjutnya yang diperlukan untuk memperkaya basis data.
- c. Hasil akhir akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi program dalam mendukung K/L untuk melaksanakan pemenuhan sarpras hankam dimaksud sebagai penanggungjawab teknis untuk tahun 2023-2024.

10) PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN

Mulai Tahap Awal Penyusunan Basis Data sampai Selesai (Edisi I) dan selanjutnya (sustain):

1. Unit Kerja (UK) Keasdepan Taslaud membuka pengetahuan dan informasi kepada setiap pegawai, memberikan informasi yang komprehensif yang dapat menunjang kinerja dalam rencana kerja kelompok/tim maupun perorangan.
2. Mengembangkan kualitas data dengan updating data secara berkala serta mempermudah akses mendapatkan data.
3. Mengembangkan “proses digitalisasi data” pada UK
4. Membangun UK dengan kualitas data terupdate dan Tim Kerja yang memiliki “standar” pengetahuan tentang TASLAUD.
5. Memberdayakan stakeholder internal dan eksternal

C. RENCANA TINDAK LANJUT PROYEK PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG

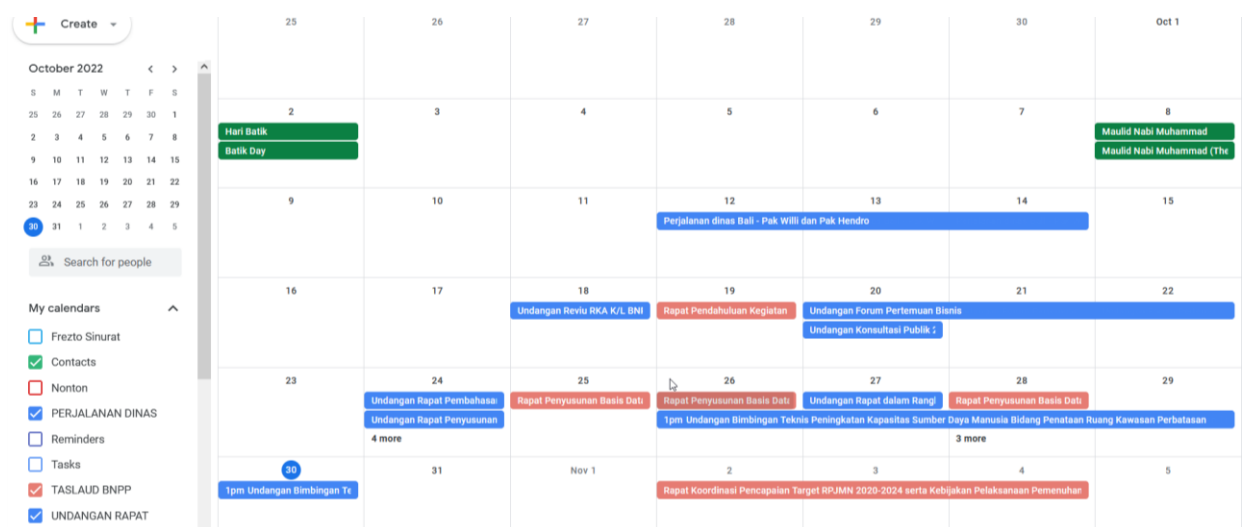
1) PEMBANGUNAN BASIS DATA TINGKAT LANJUT

Basis Data yang dibangun masih dalam tahap pengembangan masih banyak hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan basis data ini. Basis data/*database* saat ini masih memuat data PPKT dan data batas maritim Indonesia. Pengembangan *Database* bukan hanya untuk data tersebut melainkan menghubungkan semua data yang berhubungan dengan Keasdepan Taslaud. Pengembangan selanjutnya akan dikembangkan untuk semua data baik data keuangan, data kepegawaian, data hasil rapat. Terkhusus untuk data batas maritim, harus selalu dilakukan pembaharuan data mengikuti perkembangan perundingan. Informasi data yang dikumpulkan sebaiknya untuk dilakukan konfirmasi pada Kementerian Luar Negeri sebagai perwakilan Indonesia dalam perundingan batas. Mengingat BNPP khususnya Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara saat ini belum masuk dalam tim perundingan batas maritim..

Pengembangan *database* dengan data kuantitatif yang update setiap periodik waktu seperti data Mess Pamputer dengan personel update didalamnya dengan bekerja sama dengan K/L terkait. Contoh data kuantitatif yang berubah setiap waktu seperti dashboard kasus COVID 19 seperti pada **Gambar 30**. Visualisasi akan terangkum pada dashboard dan diupdate berdasarkan informasi tersebut. Adapun data tersebut merupakan data tertutup sehingga butuh dilakukan pengembangan dalam penguatan *security cyber* beberapa data yang rahasia. Pengembangan selanjutnya akan menggunakan platform ArcGIS yang memungkinkan input data batas laut, dan sudah terkenal sebagai platform visualisasi data spasial.

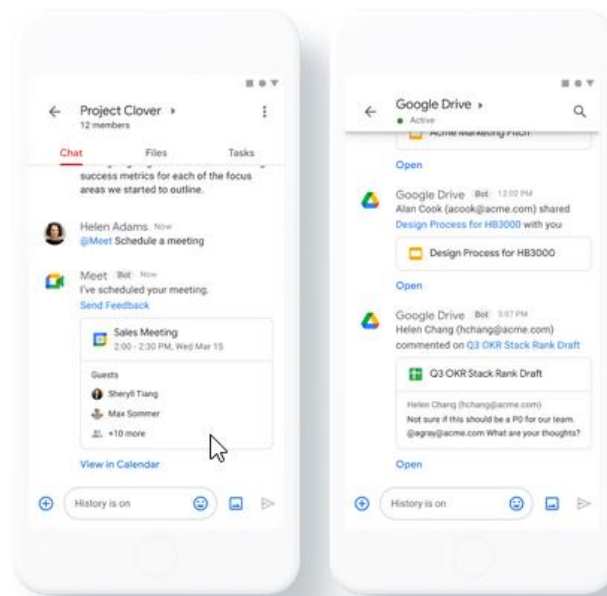
2) PENGGUNAAN EKOSISTEM DIGITAL BERBASIS SISTEM TERPADU

Integrasi penggunaan Ekosistem Google/ Ekosistem Microsoft yang sejenis dalam penyimpanan, *database*, perencanaan dan visualisasi data dalam penyebaran informasi/data. Basis data saat ini menggunakan Google Drive sebagai media penyimpanan awal, namun pada sistem Google sebenarnya mempunyai fitur Google *Database* namun akses penggunaan membutuhkan pembayaran. Sistem penyebaran informasi saat ini masih terdata dalam Google Spreadsheet, pengembangan selanjutnya akan dilakukan pendataan semua kegiatan termasuk perjalanan dinas, rapat, dan agenda internal dalam suatu kalender berupa Google Calender seperti pada **Gambar 32**. Google calender akan terhubung dengan basis data dan penyimpanan yang telah dibuat.



Gambar 32 Penggunaan Ekosistem Google, Google Calender untuk Penyebaran Informasi

Rencana tindak lanjut yang paling penting dilakukan yaitu Sosialisasi penggunaan sistem *database* kepada para personel di Keasdepan Taslaud. Adapun tiap personel harus memiliki akun Google termasuk tiap personel bakal menjadi penyedia data dan wajib memperbaharui data yang memang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan tiap personel. Sosialisasi mungkin akan dilakukan bertahap dan bakal membutuhkan waktu yang lama dikarenakan sebagian besar pemangku jabatan masih belum dapat menerima dengan mudah sistem ini. Sistem ini akan dipakai gadget berupa *smartphone* personel dan laptop/PC personel.



Gambar 33 Penggunaan Google Chat untuk Workspace Efektif

Keasdepan Taslaud sebagian besar melaksanakan penyebaran informasi termasuk penyimpanan informasi pada aplikasi pesan *Whatsapp*. Pada aplikasi chat *Whatsapp*, data dokumentasi berupa foto/video masing-masing tersimpan di tiap personel tim survei dan dikumpulkan di grup *Whatsapp*. Penyimpanan media *Whatsapp* rentan dengan kadaluwarsa dan akses data untuk file lama menyulitkan. Solusi dari permasalahan tersebut dapat menggunakan aplikasi terintegrasi berupa Google Chat. Informasi sosialisasi yang perlu ditingkatkan yaitu pembaruan penyebaran informasi tidak lagi menggunakan *Whatsapp* melainkan menggunakan aplikasi lain seperti Google Chat (**Gambar 33**) untuk informasi yang terkait dengan pekerjaan. menggunakan Pada Google Chat memiliki fitur Chat dan Ruang untuk mengerjakan konten bersama-sama secara lancar dengan Google Dokumen, Spreadsheet, dan Slide. Fitur menemukan percakapan atau file lama dengan mudah menggunakan penelusuran canggih Google. Pemanfaatan bot dan saran cerdas untuk membantu Anda terhubung dengan peserta rapat dan menyelesaikan tugas lebih cepat. Semua file yang dikirim baik foto, dokumen tersimpan dalam drive personel dan tidak ada namanya kadaluwarsa.

3) RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BWN-KP BATAS MARITIM – SIBATIM

Dalam proses pemenuhan capain jangka pendek dan jangka menengah masih menghasilkan produk basis data yang bersifat sederhana, dan memiliki banyak bug/error pada penggunaannya. Untuk penggunaan sistem masih melibatkan vendor pendukung Google yang sifatnya Personal Use, untuk penggunaan skala kantor perlu penganggaran besar untuk pembelian license penggunaan ekosistem digital terintegrasi ini seperti Ekosistem Google. Permasalahan license untuk sifat digital jangan dianggap sepele, dikarenakan pemakaian tidak resmi dan penyalahgunaan license dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta. Dengan demikian butuh persiapan yang besar untuk perealisasi sistem ini.

Sistem informasi yang sudah dibuat masih sederhana, jika diakses banyak orang akan susah dan masih tergantung pada sistem Google, sehingga user yaitu kita tidak dapat menambah/mengedit fitur tambahan yang ada pada sistem informasi harus menggunakan preferensi Google. Solusi dari permasalahan tersebut, sistem informasi nantinya akan dijadikan website yang tentunya butuh tenaga hosting, yang tentunya akan bekerja sama dengan kontraktor website hosting yang akan rutin memberi perkembangan mengenai traffic, monitoring dan *security cyber* dari website tersebut.

Sistem Informasi untuk pertahanan dan keamanan tingkat lanjut sebenarnya K/L terkait sudah ada yang pernah buat seperti pada **Gambar 34** . Sistem Informasi digunakan secara internal dan bersifat tertutup dikarenakan informasi tersebut berisi informasi sensitif yang dapat disalahgunakan. Adapun sistem informasi mengandalkan teknologi terkini dari hasil radar, sensor yang mereka punya sehingga informasi patroli dapat terupdate otomatis dalam peta Sistem Informasi.

Pada dasarnya Sistem Informasi BWN-KP Batas Maritim – Sibatim dapat diakses oleh masyarakat namun dengan batasan tertentu untuk beberapa informasi yang dianggap sensitif Sistem informasi nantinya akan berisi informasi terintegrasi dari lintas K/L terkait yang memberi visualisasi interaktif dan tetap guna dalam analisis pertahanan dan keamanan batas maritim, pemenuhan konektivitas sinyal antar pulau terluar, jalur konektivitas pulau dan sebagainya.

SISTEM PENGAWASAN SAAT INI

SISTEM MONITORING KEAMANAN LAUT YANG DIMILIKI OLEH INSTANSI KAMLA BERBASIS AIS TERESTERIAL, CITRA SATELIT, RADAR PERMUKAAN, LONG RANGE CAMERA, DLL.



Gambar 34 Sistem Informasi Maritim Tingkat Lanjut pada K/L terkait

Beberapa konsep penting yang nantinya ada pada sistem informasi antara lain:

- Sistem Informasi nantinya akan menampilkan informasi persebaran posal yang sudah terbangun, posal akan dibangun. Pihak kami nantinya dalam Sistem Informasi ini dapat menganalisis persebaran posal tersebut dan melakukan skoring tingkat ancaman pertahanan dan keamanan berdasarkan data koordinasi lintas K/L terkait seperti Bakamla, TNI AL, Bea Cukai. Analisis akan menghasilkan banyak manfaat antara lain: rekomendasi titik pembangunan posal rekomendasi, area-area yang rawan, dan klasifikasi tingkat kemananan Posal.
- Sistem informasi akan update setiap rentang waktu, dan informasi aktual mengikuti perkembangan berita mengenai pertahanan dan keamanan, dan lokasi patroli K/L terkait dalam suatu peta interaktif. Adapun rencana koordinasi mengundang K/L terkait terutama Bakamla, dan TNI AL
- Sistem informasi mengharapkan feedback dari masyarakat umum, yang nantinya mengandal media sosial terkait, untuk menjaring agen-agen muda yang tertarik mengangkat isu pertahanan dan keamanan dan kajian studinya.

BAB III PENUTUP

A. LESSON LEARNT

Dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan proyek perubahan mulai dari pembelajaran luring (Klasikal), pembelajaran mandiri (self learning), *distance learning*, pembangunan komitmen bersama, visitasi kepemimpinan nasional, sampai pada implementasi proyek perubahan, dapat diuraikan beberapa catatan proses pembelajaran (*lesson learnt*) dalam Kepemimpinan Strategis yang dialami dan dirasakan oleh *Project Leader*, yaitu: Beberapa hal yang perlu dipelajari mengenai pentingnya dukungan pimpinan:

1. Perlu komitmen yang kuat dalam perencanaan suatu kegiatan, khususnya menghadapi kondisi yang “dinamis” dan perkembangan yang terjadi terhadap rencana yang ditetapkan.
2. Perlu komitmen yang kuat dalam perencanaan suatu kegiatan, khususnya menghadapi kondisi yang “dinamis” dan perkembangan yang terjadi terhadap rencana yang ditetapkan.

Beberapa hal yang perlu dipelajari mengenai tim unit kerja yang solid:

1. Tim Efektif yang solid dalam menjalankan visi misi serta pembagian peran yang “sesuai” dalam suatu tim. Perlu komitmen yang kuat dalam perencanaan suatu kegiatan, khususnya menghadapi kondisi yang “dinamis” dan perkembangan yang terjadi terhadap rencana yang ditetapkan.
2. Perlu kreatifitas dan inovasi agar mampu menciptakan terobosan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat menjalani proyek perubahan yang dilakukan untuk capaian yang lebih baik.

Beberapa hal yang perlu dipelajari mengenai koordinasi lintas K/L

1. Membangun komunikasi efektif dan efisien kepada K/L, Kerjasama demi kepentingan bersama, kebutuhan akan data yang digagas dalam proyek perubahan.
2. Kerja sama lintas K/L yang saling menguatkan dengan mengedepankan Kepentingan Negara, Kedaulatan Wilayah NKRI.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pelaksanaan proyek perubahan didapatkan kesimpulan menjawab *output* dan *outcome* dari rencana strategi proyek perubahan yaitu

1. Capaian untuk *output* jangka pendek sudah terpenuhi dengan teridentifikasi sarpras dasar di 49 PPKT Tidak Berpenduduk dalam suatu publikasi , buku digital dengan judul Survei Identifikasi dan Evaluasi Sarana Prasaran di PPKT Tidak Berpenduduk. Sudah dilakukan pengkajian, pengumpulan informasi aktual Progres Batas Maritim dalam buku digital. Hasil identifikasi sarpras sudah disusun dalam *draft* surat yang akan ditujukan kepada K/L terkait, yaitu revisi dari surat K/L sebelumnya. *Draft* surat menunggu persetujuan dari Sekretaris BNPP, yang akan diberikan kepada K/L terkait berupa Surat Kepala BNPP. Hasil akhir *output* jangka pendek berupa basis data sederhana untuk data PPKT dan Batas Maritim yang sudah dibuat.
2. Capaian untuk *output* jangka menengah dalam tahap proses inisiasi pelaksanaan. *Output* untuk jangka menengah yaitu terpenuhi data sarpras untuk semua 111 PPKT bukan hanya 49 PPKT Amanat RPJMN 2020-2024. Adapun Keasdepan Taslaud sudah pernah melakukan beberapa kunjungan selain 49 PPKT seperti PPKT Berpenduduk yang masuk kedalam 12 PPKT Penanganan Khusus yang masuk kedalam tupoksi dari Keasdepan Taslaud yaitu Miangas, Marore, Marampit yang nantinya akan dimasukkan kedalam basis data PPKT. Rencana untuk integrasi database dari keasdepan lain seperti Database Keasdepan Darat, Keasdepan Lintas Batas Negara masih dalam proses perencanaan menunggu tiap Keasdepan menyelesaikan proyek integrasi data pada Keasdepan mereka. Rencana Revisi untuk Perka BNPP masih dalam tahap perencanaan dan sudah dibincangkan kepada pihak Sektap BNPP.
3. Capaian untuk ouput jangka panjang masih menunggu penyelesaian dari *output* jangka menengah, dikarenakan sebagian besar *output* jangka menengah akan menjadi awal dari *output* jangka panjang. Keasdepan Taslaud akan menyusun kajian, rencana program, struktur kepengurusan untuk pembuatan proyek Sistem Informasi BWN-KP Batas Maritim – SIBATIM.

C. SARAN

Berdasarkan rapat koordinasi dari K/L terkait mengenai pembuatan basis data ini didapat masukan penting pelaksanaan Proyek Perubahan ini antara lain:

1. Informasi pertahanan dan keamanan memang suatu hal yang rahasia dan tidak boleh disebar secara luas, tugas besar BNPP untuk memilah mana data yang bisa disebar, data yang harus dirahasiakan ke publik dalam Sistem Informasi ini. Data yang sudah tersimpan secara daring memiliki satu kelemahan yang paling urgent adanya pihak tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan data dan mengakses data tanpa izin. Adapun pihak tersebut bisa datang dari internal ataupun kontraktor yang bertanggung jawab menjaga sistem informasi ini. Dengan begitu pihak Keasdepan Laut kedepannya akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam koordinasi mengenai gagasan ini, selanjutnya BSSN dapat menjadi koordinator dan pengawas bagi kontraktor nantinya yang memegang proyek ini.
2. BNPP disarankan melakukan studi banding mengenai sistem informasi tingkat lanjut kepada K/L yang memang sudah memiliki sistem informasi tingkat lanjut seperti TNI AL, Bakamla, KKP dan sebagainya. Dikarenakan sistem informasi tersebut bukan merupakan sistem informasi terbuka dan hanya bisa diakses hanya untuk pihak tertentu sehingga untuk mendapat akses untuk mempelajari sistem informasi harus melakukan koordinasi langsung ke K/L tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kepresidenan, M. (2018, Desember 9). Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957. Diambil kembali dari Museum Kepresidenan RI Balai Kirti. Kemdikbud: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/deklarasi-djuanda-13-desember-1957/>
- Naning Nur Wijayanti. (2021). *Database: Berikut adalah Pengertian, Fungsi, dan Jenis-jenisnya*. NiagaHosterblog. <https://www.niagahoster.co.id/blog/database-adalah/>
- Pratama, A. N. (2018, Desember 13). *13 Desember 1957, Deklarasi Juanda Jadi Titik Balik Kelautan Indonesia*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/13/10262121/13-desember-1957-deklarasi-juanda-jadi-titik-balik-kelau>
- Surbakti, T. (2016, Mei 20). *Membuka Sejarah: Tata Laut Republik Indonesia dan Masa Kolonial Belanda*. Diambil kembali dari MaritimNews.com.: <http://maritimnews.com/2016/05/membuka-sejarah-tata-lautan-republik-indonesia-dan-masa-kolonial-belanda/>
- Ulwiya, S. (2019). *Deklarasi Djuanda dalam Sejarah Nusantara*. Diambil kembali dari ITS News. itssin: <https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/>
- Yuniarto, T. (2021). *Kedaulatan Maritim Indonesia: Sejarah dan Potretnya*. Diambil kembali dari Kompaspedia: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kedaulatan-maritim-indonesia-sejarah-dan-potretnya>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Metrianda Akuan, S.T, M.Si.
 NIP : 19670920 200003 2001
 Tempat dan Tanggal Lahir : Teluk Betung, 20-09-1967
 Agama : Islam
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/ IV(b)
 Pendidikan Terakhir : S-2
 Jabatan : Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah I
 Alamat : Jl. Sensus II No. 5 Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur.
 No Telepon : (Hp) 081282830801
 Alamat Email : metrianda@gmail.com

RIWAYAT KEPANGKATAN					
No	Pangkat / Gol. Ruang		No. SK	Tgl. SK	TMT Pangkat
1.	Penata Muda (CPNS)	III/a	816.113.3 - 1741	10-4-2000	1-3-2000
2.	Penata Muda	III/a	816.113.3 - 1741	24-2-2003	24-2-2003
3.	Penata Muda Tk.I	III/b	811.33.-1671	28-3-2003	1-4-2003
4.	Penata	III/c	811.233-2235	18-6-2007	1-4-2007
5.	Penata Tk.I	III/d	811.233-640	17-3-2011	1-4-2011
6.	Pembina	IV/a	823.4-200 Tahun 2015	16-2-2015	1-4-2015
7.	Pembina Tk. I	IV/b	823.4-591 Tahun 2019	01-2-2019	1-4-2019

RIWAYAT JABATAN/PEKERJAAN						
No	Jabatan	Eselon	TMT. Jabatan	Masa Kerja Jabatan	Keterkaitan Dengan Jabatan Yang Dilamar	
					Terkait	Tidak Terkait
1.	Staf pada Subdit Batas Antar Daerah, Dit. Wilayah Administrasi dan Perbatasan Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.	-	28-02- 2002	4th 1 bulan	terkait	

2.	Kasi Kawasan Tambang Subdit Kawasan Sumber Daya Alam Dit. Kawasan dan Otorita Ditjen PUM	IV	28-3-20006	4th 3 bulan		tidak
3.	Kasi Batas Antar Daerah Wil IIA Subdit Batas Antar Daerah Wil. II Direktorat Wilayah Administrasi dan	IV	5-10-2010	4th 10 bulan	terkait	
4.	Kasubdit Batas Antar Batas Daerah Ditjen Bina Adwil Direktorat Toponimi dan Daerah Wil I	III	19-8-2015	5 th 1 bulan	terkait	

RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM				
No	Jenjang Pendidikan	Pendidikan / Fakultas / Jurusan	Nama Sekolah / PT / Univ.	Tahun Lulus
1	SD	Sekolah Dasar Umum	Negeri Teladan Tanjungkarang	1980
2	SLTP	Sekolah Menengah Umum	SMP N I BOGOR	1983
3	SLTA	Sekolah Menengah	SMA Regina Pacis Bogor	1986
4	S-1	Strata 1 / Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan/ Jurusan Teknik Geodesi	Institut Teknologi Bandung	1993 (1988-1993)
5	S-2	Strata 2/Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan/ Jurusan Ilmu Lingkungan	Universitas Indonesia	2000 (1997-2000)

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN				
No	Nama Diklat	Angkatan / Tahun	Tempat	Panitia Penyelenggara
1.	Diklatpim Tk. IV	Tahun 2005	Bogor	Badan Diklat Depdagri.
2.	Diklatpim Tk. III	Tahun 2007	Bogor	Badan Diklat Depdagri.

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS				
No	Nama Diklat	Tahun	Tempat	Panitia Penyelenggara
1.	PLANNING AND MANAGEMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT	13 September 2004 sd 8 Oktober	KUALA LUMPUR,	National Institute of Public Administration (INTAN)
2.	GEOINFORMATICS SYSTEM IN NATURAL RESOURCES MANAGEMENT	30 Mareh 30 2009 sd 8 April 2009	HYDERABA D, INDIA	National Intitute of Rural Development (NIRD), Hyderabad INDIA

3.	LOCAL ADMINISTRATION	7 Maret 2010 sd 27 Maret 2010	SEOUL, KOREA SELATAN	<i>The Korea International Cooperation Agency (Koica) dan The Local Government Officials Development Institute under the International Cooperation Program of the Government</i>
----	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	--

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL				
No	Nama Diklat	Tahun	Tempat	Panitia Penyelenggara
1	ASESMEN/UJI KOMPETENSI (<i>Workplace Assessment</i>)	2013	JAKARTA	BPSDM Kementerian Dalam Negeri (2013)

PENGALAMAN SEBAGAI PEMBICARA PADA SEMINAR/WORKSHOP				
No	Nama Seminar/Lokakarya /	Tahun	Tempat	Panitia Penyelenggara

RIWAYAT PENGHARGAAN / TANDA JASA			
No	Penghargaan / Tanda Jasa	Tahun	Asal Perolehan
1.	Satyalancana Karya Satya X Tahun	2010	Indonesia, Presiden RI. Kementerian Dalam Negeri
2.	Satyalancana Karya Satya XX Tahun	2020	Indonesia, Presiden RI. Kementerian Dalam Negeri

RIWAYAT PENUGASAN DALAM DAN LUAR NEGERI			
No	Negara Tujuan	Tujuan Penugasan	Masa Penugasan
1.	MALAYSIA	Kursus/Pelatihan (<i>SHORT COURSE at National Institute of Public Administration /INTAN ON, “PLANNING AND MANAGEMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT”</i>)	13 September 2004 sd 8 Oktober 2004

2.	INDIA	Kursus/Pelatihan (<i>REGIONAL TRAINING COURSE ON, "GEOINFORMATICS SYSTEM IN NATURAL RESOURCES</i>	30 Maret 2009 to 8 April 2009
3.	KOREA SELATAN	Kursus/Pelatihan (SHORT COURSE ON, "LOCAL- ADMINISTRATION)	7 Maret 2010 sd 27 Maret 2010
4.	MALAYSIA	Anggora Delegasi RI, Mengikuti Perundingan Batas Antar Negara sebagai peserta dari Kementerian Dalam Negeri, CBDRF, antara Negara Indonesia dengan	Desember 2010

RIWAYAT PENGUASAAN BAHASA			
No	Jenis Bahasa	Nama Bahasa	Kemampuan
1	Bahasa Internasional	Inggris	Baik

Desember 2022

Siti Metrianda Akuan, ST, M.Si

19670920 200003 2001

LAMPIRAN

1. ANALISIS SWOT INTERNAL

STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)	Action	Outcome
Legalitas/ regulasi berdasarkan undang-undang dan setaranya	Luasnya wilayah kerja (geografis) dan jumlah pulau yang banyak	Identifikasi penerapan regulasi pada masing-masing daerah	Surat perjanjian/kesepakatan tentang segmen batas
	Belum lengkapnya wakil Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di daerah.	Usulan pembentukan BPPD	Legalitas pembentukan BPPD
	Rotasi/mutasi SDM berkompeten	Menerapkan rekrutmen SDM sesuai dengan undang-undang yang berlaku	Prosedur pengembangan kompetensi
	Keterbatasan anggaran	Penggunaan anggaran sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi (APBN)	Efektivitas dan efisiensi anggaran
	Masih terbatasnya akses menuju lokasi dan minimnya sarana dan prasarana yang memadai di kawasan perbatasan	Penerapan Perpres No. 27 tahun 2021, Undang-undang no.17 tahun 2008, dan PP No.17 tahun 1988	Mendukung implementasi kegiatan tol laut antar daerah kepulauan perbatasan

STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)	Action	Outcome
Koordinasi Kementerian/Lembaga di bidang pengelolaan batas wilayah dan Kawasan perbatasan	Luasnya wilayah kerja (geografis) dan jumlah pulau yang banyak	Membuat skala prioritas rencana dan program	Rencana kerja tahunan

(terdiri dari 27 K/L) dan 17 Pemprov perbatasan.	Belum lengkapnya wakil (Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD) di daerah.	Mengusulkan pembentukan BPPD di pemda perbatasan	1. BPPD Provinsi 2. BPPD Kabupaten/Kota
	Rotasi/mutasi SDM berkompeten	Usulan penambahan staff kepada Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK)	Mendapatkan SDM sesuai dengan kriteria
	Keterbatasan anggaran	Mengusulkan rencana anggaran tahunan sesuai dengan program Rencana Kerja tahunan	Tersedianya dana operasional kegiatan
	Masih terbatasnya akses menuju lokasi dan minimnya sarana dan prasarana yang memadai di kawasan perbatasan	Mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana kepada kementerian teknis maupun pemda	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan perbatasan

STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)	Action	Outcome
Aksesibilitas ke daerah perbatasan	Luasnya wilayah kerja (geografis) dan jumlah pulau yang banyak	Koordinasi dengan kemhub, TNI, dan penyedia transportasi laut	Terlaksanakannya kunjungan lapangan
	Belum lengkapnya wakil (Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD) di daerah.	Koordinasi dengan biro pemerintahan	Memfasilitasi kementerian lembaga (KL) untuk akses ke daerah perbatasan

	Rotasi/mutasi SDM berkompeten	N/A	N/A
	Keterbatasan anggaran	Pemanfaatan media online untuk melakukan koordinasi dengan rapat daring	Berita acara rapat daring
	Masih terbatasnya akses menuju lokasi dan minimnya sarana dan prasarana yang memadai di kawasan perbatasan	Memanfaatkan data dari KL, Pemda, dan informasi media sosial	Mendukung optimalisasi data perbatasan

STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)	Action	Outcome
Kemampuan dan pengalaman sumber daya manusia mulai dari tingkat eselon 1 s.d. Tingkat staf mengenai pengelolaan perbatasan	Luasnya wilayah kerja (geografis) dan jumlah pulau yang banyak	N/A	N/A
	Belum lengkapnya wakil (Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD) di daerah.	Memberikan arahan kepada biro pemerintahan pada daerah yang belum memiliki BPPD	Keseragaman visi dan misi di tingkat daerah
	Rotasi/mutasi SDM berkompeten	Transfer knowledge, COC, seminar, workshop, dan kegiatan pelatihan lainnya	Peningkatan kemampuan staff
	Keterbatasan anggaran	N/A	N/A

	Masih terbatasnya akses menuju lokasi dan minimnya sarana dan prasarana yang memadai di kawasan perbatasan	N/A	N/A
--	--	-----	-----

STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)	Action	Outcome
Hubungan yang kuat dengan pemerintah daerah terutama untuk daerah perbatasan	Luasnya wilayah kerja (geografis) dan jumlah pulau yang banyak	Komunikasi secara reguler dengan BPPD dan/atau Biro Pemerintahan	Progress rencana implementasi pembangunan sarana prasarana sesuai target
	Belum lengkapnya wakil (Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD) di daerah.	Komunikasi secara reguler dengan Biro Pemerintahan	Progress implementasi rencana pembangunan sarana prasarana dapat dikendalikan
	Rotasi/mutasi SDM berkompeten	N/A	N/A
	Keterbatasan anggaran	N/A	N/A
	Masih terbatasnya akses menuju lokasi dan minimnya sarana dan prasarana yang memadai di kawasan perbatasan	Melakukan rapat koordinasi secara daring	Informasi progress rencana implemenasi selalu <i>up-to-date</i>

STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)	Action	Outcome
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	----------------

Memiliki akses/hubungan dengan negara tetangga yang berbatasan	Luasnya wilayah kerja (geografis) dan jumlah pulau yang banyak	N/A	N/A
	Belum lengkapnya wakil (Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD) di daerah.	N/A	N/A
	Rotasi/mutasi SDM berkompeten	N/A	N/A
	Keterbatasan anggaran	N/A	N/A
	Masih terbatasnya akses menuju lokasi dan minimnya sarana dan prasarana yang memadai di kawasan perbatasan	Melakukan rapat koordinasi secara daring	Informasi progress rencana implemenasi selalu <i>up-to-date</i>

2. ANALISIS SWOT EKSTERNAL

OPPORTUNITIES (KESEMPATAN)	THREATS (ANCAMAN)	Action	Outcome
Penyelesaian kesepakatan Batas Wilayah Negara dengan negara tetangga melalui perundingan	Belum ada standarisasi pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa untuk sarana transportasi dan komunikasi di Kawasan Perbatasan.	N/A	N/A
	Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan akses	N/A	N/A

	telekomunikasi, informasi dan penyiaran		
	Tidak optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi daerah komoditas lokal	N/A	N/A
	Masih adanya potensi kerentanan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada masyarakat perbatasan	Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kedaulatan wilayah NKRI untuk masyarakat perbatasan	Pemberdayaan masyarakat perbatasan
	Masih banyak di daerah perbatasan yang terisolasi (3T = Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal	N/A	N/A

OPPORTUNITIES (KESEMPATAN)	THREATS (ANCAMAN)	Action	Outcome
Peningkatan dan pengawasan serta pemeliharaan tanda batas negara;	Belum ada standardisasi pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa untuk sarana transportasi dan komunikasi di Kawasan Perbatasan.	N/A	N/A
	Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk akses layanan telekomunikasi, informasi dan penyiaran	Sosialisasi kepada masyarakat pulau terluar mengenai keberadaan patok batas daratan dan pilar titik referensi	Kepedulian masyarakat tentang batas negara

	Tidak optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi daerah komoditas lokal	N/A	N/A
	Masih adanya potensi kerentanan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada masyarakat perbatasan.	Sosialisasi kepada masyarakat pulau terluar mengenai keberadaan patok batas daratan dan pilar titik referensi	Kepedulian masyarakat tentang batas negara
	Masih banyak di daerah perbatasan yang terisolasi (3T = Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal	N/A	N/A

OPPORTUNITIES (KESEMPATAN)	THREATS (ANCAMAN)	Action	Outcome
Mendukung kementerian luar negeri agar mencapai efektivitas diplomasi perbatasan (border diplomacy) dalam rangka perundingan penyelesaian batas negara.	Belum ada standarisasi pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa untuk sarana transportasi dan komunikasi di Kawasan Perbatasan.	N/A	N/A
	Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan akses telekomunikasi, informasi dan penyiaran	N/A	N/A
	Tidak optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi daerah komoditas lokal	N/A	N/A

	Masih adanya potensi kerentanan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada masyarakat perbatasan.	Sosialisasi bersama Pemda kepada masyarakat perbatasan terhadap potensi adanya kegiatan ilegal	Kepedulian masyarakat tentang kegiatan ilegal
	Masih banyak di daerah perbatasan yang terisolasi (3T = Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal	N/A	N/A

OPPORTUNITIES (KESEMPATAN)	THREATS (ANCAMAN)	Action	Outcome
Mendukung tuntasnya penetapan batas laut Indonesia (laut teritorial, batas Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE, dan landas kontinen) dengan beberapa negara.	Belum ada standardisasi pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa untuk sarana transportasi dan komunikasi di Kawasan Perbatasan.	N/A	N/A
	Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan akses telekomunikasi, informasi dan penyiaran	Mengusulkan pembangunan infrastruktur TIK di kawasan perbatasan yang sering terjadi pelanggaran	Berkurangnya jumlah pelanggaran dan kegiatan ilegal yang terjadi di ZEE
	Tidak optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi daerah komoditas lokal	N/A	N/A
	Masih adanya potensi kerentanan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada masyarakat perbatasan.	Memfasilitasi penyelesaian konflik di kawasan perbatasan	Kesepakatan penyelesaian konflik

	Masih banyak di daerah perbatasan yang terisolasi (3T = Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal	N/A	N/A
--	---	-----	-----

OPPORTUNITIES (KESEMPATAN)	THREATS (ANCAMAN)	Action	Outcome
Percepatan penyelesaian dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta pengendalian dan pemanfaatan ruang	Belum ada standarisasi pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa untuk sarana transportasi dan komunikasi di Kawasan Perbatasan.	N/A	N/A
	Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan akses telekomunikasi, informasi dan penyiaran	Mendorong Pemda untuk mengusulkan pembangunan infrastruktur TI	Infrastruktur TIK semakin merata
	Tidak optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi daerah komoditas lokal	Mendorong Pemda untuk menginventarisir data potensi daerah	Data potensi daerah untuk materi perundingan kementerian luar negeri dan TNI
	Masih adanya potensi kerentanan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada masyarakat perbatasan.	N/A	N/A

	Masih banyak di daerah perbatasan yang terisolasi (3T = Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal	Melakukan analisis adanya potensi daerah 3T untuk dimasukkan dalam rencana Tata Ruang (RDTR) serta pengendalian dan pemanfaatan ruang	Berkembangnya daerah 3T sesuai dengan potensinya
--	---	---	--

3. TABEL BASIS DATA PPKT VERSI SEMENTARA

No.	Pulau	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kel./Desa	x	y	Dermaga	SBNP	PTR	Tanggul Laut	Breakwater	Mess Pamputer	Speedboat
1	Rondo	Aceh	Kota Sabang	Sukakarya	Kel Ujung ba'u	95.1175	6.0742	Tidak Ada	Baik	Baik	Tidak Ada	Rusak	Baik	Tidak Ada
2	Berhala	Sumut	Serdang Bedagai	Tanjungberingin		99.5008	3.7772	Rusak	Baik	Baik	Tidak Ada	Rusak	Rusak	Rusak
3	Batumandi	Riau	Rokan Hilir	Panipahan		100.6847	2.8694	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada, menurut BIG	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Berakit	Kep. Riau	Bintan	Telok Seborg	Berakit	104.5717	1.2361	Tidak Ada	Baik	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Ada
5	Sentut	Kep. Riau	Bintan	Bintan Timur	Mapur	104.8306	1.0478	Tidak Ada	Baik	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik	Rusak
6	Malang Berdaun	Kep. Riau	Bintan	Teluk Seborg	Berakit	104.5658	1.2383	Tidak Ada	Baik	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Ada
7	Tokong Malang Biru	Kep. Riau	Natuna	Siantan	Kiabu	105.5964	2.3000	Tidak Ada	Baik	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Damar	Kep. Riau	Natuna	Jemaja	Mampok	105.3794	2.7414	Tidak Ada	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Mangkai	Kep. Riau	Kepulauan Anambas	Jemaja	Keramut	105.5833	3.0922	Baik	Baik	Rusak	Tidak Ada	Tidak Ada	Rusak	Tidak Ada
10	Tokong Nanas	Kep. Riau	Natuna	Siantan	Telaga	105.9511	3.3311	Tidak Ada	Baik	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Tokong Belayar	Kep. Riau	Natuna	Palmatlak	Mubur	106.2689	3.4511	Tidak Ada	Baik	Rusak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Tokong Boro	Kep. Riau	Natuna	Pulau Laut		107.4358	4.0669	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei
13	Semiun	Kep. Riau	Natuna	Pulau Laut	Air Payang	107.7214	4.5192	Tidak Ada	Baik	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Sebetul	Kep. Riau	Natuna	Pulau Laut	Air Payang	107.9056	4.7069	Tidak Ada	Baik	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Sekatung	Kep. Riau	Natuna	Pulau Laut	Air Payang	108.0219	4.7958	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak Ada	Baik	Tidak Ada
16	Senoa	Kep. Riau	Natuna	Bunguran Timur	Sepempang	108.4178	4.0133	Rusak	Rusak	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Kepala	Kep. Riau	Natuna	Serasan	Air Nusa	109.1678	2.6453	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei
18	Tokong Iyu Kecil	Kep. Riau	Karimun	Tebing	Kel Pongkar	103.3526	1.1906	Rusak	Baik	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik	Tersedia
19	Nipa	Kep. Riau	Kota Batam	Belakang Padang	Pomping	103.6581	1.1469	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
20	Batu Berhanti	Kep. Riau	Kota Batam	Belakang Padang	Tj. Sari	103.8825	1.1850	Tidak Ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak Ada
21	Putri/Nongsa	Kep. Riau	Kota Batam	Nongsa	Nongsa Pantai	104.0797	1.2081	Baik	Baik	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Karang Unarang	Kaltara	Nunukan			118.0828	4.0106	Tidak Ada	Rusak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik
23	Sambit	Kaltim	Berau	Talisayang		119.0406	1.7814	Tidak Ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Solando	Sulteng	Toli-Toli	Dako Pamean	Kapas	120.7919	1.3378	Rusak	Baik	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Rusak	Baik
25	Dolongan	Sulteng	Toli-Toli	Toli-toli Utara	Sentigi	120.8844	1.3778	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik
26	Bongkil/Bangkit	Sulut	Bolaang Mongondow Utara			123.1058	1.0431	Tidak Ada	Baik	Belum diketahui	Tidak Ada	Tidak Ada	Rusak	Tidak Ada
27	Batu Bawaikang	Sulut	Kepulauan Sangihe	Tabukan Utara		125.4900	4.7814	Tidak Ada	Rusak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
28	Intata	Sulut	Kepulauan Talaud	Pulau Karatung	Kakarutan	127.1636	4.6439	Tidak Ada	Rusak	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
29	Yiew Besar /Jiew	Maluku	Halmahera Tengah	Patani Utara		129.1417	0.7275	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum

No.	Pulau	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kel./Desa	x	y	Dermaga	SBNP	PTR	Tanggul Laut	Breakwater	Mess Pamputer	Speedboat
		Utara						Disurvei	Disurvei	Disurvei	Disurvei	Disurvei	Disurvei	Disurvei
30	Ararkula	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Utara Timur Batuley	Kompane	134.8181	5.5950	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei
31	Asutubun	Maluku	Maluku Tenggara Barat	Tanimbar Selatan	Amdasa & Olilit	131.3006	8.0519	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada, menurut BIG	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
32	Batarkusu	Maluku	Maluku Tenggara Barat	Tanimbar Selatan		130.8211	8.3417	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada, menurut BIG	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
33	Batu Goyang	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Selatan	Batu Goyang	134.1939	6.9503	Tidak Ada	Baik	Ada, menurut BIG	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
34	Enu	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Tengah	Gomo-gomo	134.5219	7.1039	Tidak Ada	Baik	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
35	Karang	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Selatan	Longgar/Apara	134.6906	7.0189	Tidak Ada	Baik	Ada, menurut BIG	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
36	Karaweira Besar	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Tengah		134.8586	5.9572	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei
37	Kultubai Utara	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Tengah	Mesiang/Gomo-gomo	134.7919	6.6869	Tidak Ada	Baik	Ada, menurut BIG	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
38	Kultubai Selatan	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Selatan	Longgar/Apara	134.7192	6.8708	Tidak Ada	Baik	Ada, menurut BIG	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
39	Fani	Papua Barat	Raja Ampat	Distrik Ayau	Rutum	131.2803	1.0744	Rusak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik	Rusak
40	Miossu	Papua Barat	Tambrau	Distrik Sausapor	Werur	132.1707	0.3471	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei
41	Moff/Budd	Papua Barat	Raja Ampat	Ayau		130.7341	0.5300	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
42	Fanildo	Papua	Supiori	Distrik Supiori Barat	Mapia	134.2956	0.9394	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Rusak	Tidak Ada
43	Habee	Papua	Merauke	Tubang		139.4364	8.2697	Tidak Ada	Rusak	Rusak	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
44	Komolom	Papua	Merauke	Kimaam		138.9064	8.4358	Rusak	Rusak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
45	Laag	Papua	Asmat	Pulau Tiga		137.7186	5.3872	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei	Belum Disurvei
46	Puriri	Papua	Mimika	Timur Jauh		136.7597	4.9067	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
47	Dana	NTT	Sabu Raijua	Raijua	Ledeunu	121.2825	10.8333	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
48	Ndana (rote)	NTT	Rote Ndao	Rote Barat Daya		122.8769	11.0100	Tidak Ada	Rusak	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Rusak	Rusak
49	Batek	NTT	Kupang	Amfoang Timur	Netemenanu Utara	123.9936	9.2569	Tidak Ada	Baik	Ada, menurut BIG	Tidak Ada	Tidak Ada	Rusak	Rusak

No.	Pulau	Menara BTS	TD	TR	Gambar	Status	Tanggal Survei
1	Rondo	Tidak Ada	TD.177; TD.177A	TR.177	https://drive.google.com/uc?id=1NOIq3xP7xuU42-Hr6HeV0lrJs5g2xLcy	Sudah Dikoordinasikan	
2	Berhala	Rusak	TD.184	TR.184	https://drive.google.com/uc?id=1HsU6hOYpN00U9YQ32gtcmRtptBVU6nCq	Sudah Disurvei	Agustus 2020
3	Batumandi	Tidak Ada	TD.185	TR.185	https://drive.google.com/uc?id=1xF5PPxURG_4ZI2T2-Z5ybRUszE7jSlzY	Sudah Dikoordinasikan	
4	Berakit	Baik	TD.001	TR.001	https://drive.google.com/uc?id=18obaO34uLMQtzZ4OW_Ev-0t09S-9fVO2	Sudah Disurvei	Mei 2021
5	Sentut	Baik	TD.001A	TR.001A	https://drive.google.com/uc?id=1A3_Xetwxlto0AJ1X2vMEJIPk-sbPRZkf	Sudah Disurvei	Oktober 2021
6	Malang Berdaun	Baik	TD.195	TR.001	https://drive.google.com/uc?id=1Zo8X7zLO3SlgJj8cmrfwrwculPPFuhAK	Sudah Disurvei	Mei 2021
7	Tokong Malang Biru	Tidak Ada	TD.022	TR.022	https://drive.google.com/uc?id=1NyGoDsgVUy38XrcvJnyE3-hXSruHkjUO	Sudah Disurvei	Juni 2021
8	Damar	Tidak Ada	TD.023	TR.023	https://drive.google.com/uc?id=1JYp9x_2yVa77VOi4p-M-XOURIV-naa4E	Sudah Disurvei	Juni 2021
9	Mangkai	Tidak Ada	TD.024	TR.024	https://drive.google.com/uc?id=1RAnRXgm91Jbdfpenu7S98hV9ldpcNcRg	Sudah Disurvei	Juni 2021
10	Tokong Nanas	Tidak Ada	TD.025	TR.025	https://drive.google.com/uc?id=1jgBQ_XgCDQyK1ID5Lz9nSrNuywNh9as8	Sudah Disurvei	Mei 2021
11	Tokong Belayar	Tidak Ada	TD.026	TR.026	https://drive.google.com/uc?id=1grEpPX5PqAjfP-p8dILS0HieQ_cck4Gi	Sudah Disurvei	Mei 2021
12	Tokong Boro	Belum Disurvei	TD.028	TR.028		Belum Disurvei	
13	Semiun	Tidak Ada	TD.029	TR.029	https://drive.google.com/uc?id=1y2sfAsrdqxl90ka3oIXtRu6I2O2xXPwW	Sudah Disurvei	April 2021
14	Sebetul	Baik	TD.030A	TR.030A	https://drive.google.com/uc?id=1psfXjjRt-qulxMOCmUMgR3wxYIEq32ri	Sudah Disurvei	April 2021
15	Sekatung	Baik	TD.030D; TD.030B	TR.030	https://drive.google.com/uc?id=1XkX-AZ9oRQ3C1ZjmipluBnHhclHg5XC	Sudah Disurvei	November 2021
16	Senoa	Baik	TD.031	TR.031	https://drive.google.com/uc?id=1bvU4IAf7pOC07oOBI5kGlv2qfr4hHyhP	Sudah Disurvei	Februari 2021
17	Kepala	Belum Disurvei	TD.033	TR.033		Belum Disurvei	
18	Tokong Iyu Kecil	Baik	TD.188	TR.188	https://drive.google.com/uc?id=11DiGMxeOVOSgTZ3ZDWb7ya3TteipIIQ	Sudah Disurvei	April 2021

No.	Pulau	Menara BTS	TD	TR	Gambar	Status	Tanggal Survei
19	Nipa	Baik	TD.190; TD.190A	TR.190	https://drive.google.com/uc?id=1rr5WPgwH1uimgRPW83z4ehicTcWdpvig	Sudah Disurvei	April 2021
20	Batu Berhanti	Baik	TD.192	TR.192	https://drive.google.com/uc?id=1OpbmXfs6vFfyVsVI3U9-WByXVZqbyPuv	Sudah Disurvei	Oktober 2021
21	Putri/Nongsa	Baik	TD.193	TR.193	https://drive.google.com/uc?id=1FbPNsSB5690DKJ7GKa_ZYLuYsjiCOSxv	Sudah Disurvei	April 2021
22	Karang Unarang	Tidak Ada	TD.037	TR.037	https://drive.google.com/uc?id=17Kxb8mYIYgdxnz-ijuApp1MKQZ7PRdm6	Sudah Disurvei	April 2021
23	Sambit	Tidak Ada	TD.040	TR.040		Sudah Disurvei	Agustus 2020
24	Solando	Baik	TD.044	TR.044		Sudah Disurvei	Juni 2021
25	Dolangan	Baik	TD.044A; TD.044B	TR.044A		Sudah Disurvei	Juni 2021
26	Bongkil/Bangkit	Tidak Ada	TD..047	TR.047		Sudah Disurvei	Maret 2022
27	Batu Bawaikang	Tidak Ada	TD.055;TD.055A;TD.055B	TR.055		Sudah Dikoordinasikan	
28	Intata	Rusak	TD.58A	TR.058A		Sudah Disurvei	Mei 2022
29	Yiew Besar /Jiew	Belum Disurvei	TD.063	TR.063		Belum Disurvei	
30	Ararkula	Belum Disurvei	TD_097A	TR.097		Belum Disurvei	
31	Asutubun	Tidak Ada	TD_105 dan TD_105C	TR.105		Sudah Dikoordinasikan	
32	Batarkusu	Baik	TD_107	TR.107		Sudah Dikoordinasikan	
33	Batu Goyang	Tidak Ada	TD_102	TR.102		Sudah Dikoordinasikan	
34	Enu	Tidak Ada	TD_101	TR.100B		Sudah Dikoordinasikan	
35	Karang	Tidak Ada	TD_100A dan TD_100B	TR.100A		Sudah Disurvei	
36	Karaweira Besar	Belum Disurvei	TD_098	TR.098		Belum Disurvei	
37	Kultubai Utara	Tidak Ada	TD_099	TR.099		Sudah	

No.	Pulau	Menara BTS	TD	TR	Gambar	Status	Tanggal Survei
						Dikoordinasikan	
38	Kultubai Selatan	Tidak Ada	TD_100	TR.100		Sudah Dikoordinasikan	
39	Fani	Baik	TD.066;TD.066A	TR.066		Sudah Dikoordinasikan	
40	Miossu	Belum Disurvei	TD_070	TR.070		Belum Disurvei	
41	Moff/Budd	Tidak Ada	TD.065	TR.065		Sudah Disurvei	Juni 2022
42	Faniido	Tidak Ada	TD.072	TR.072		Sudah Disurvei	Juni 2022
43	Habee	Tidak Ada	TD_085	TR.086		Sudah Disurvei	Oktober 2020
44	Komolom	Rusak	TD.086	TR.085		Sudah Dikoordinasikan	
45	Laag	Belum Disurvei	TD_092	TR.092		Belum Disurvei	
46	Puriri	Tidak Ada	TD_093	TR.093		Sudah Disurvei	September 2022
47	Dana	Tidak Ada	TD_123A dan TD_123	TR.123		Sudah Disurvei	September 2022
48	Ndana (rote)	Tidak Ada	TD_121	TR.121		Sudah Disurvei	Agustus 2020
49	Batek	Tidak Ada				Sudah Disurvei	November 2020

4. TABEL BASIS DATA BATAS MARITIM VERSI SEMENTARA

Nama Titik	X	Y	Berbatasan	Tahun	Zona Maritim	Segmen	Laut Teritorial	ZEE	Landas Kontinen	Peta Batas Maritim
1	94.6300	6.6400	India	1974	Landas Kontin	Samudera Hindia, Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
2	94.5500	6.5000	India	1974	Landas Kontin	Samudera Hindia, Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
3	94.4000	6.2700	India	1974	Landas Kontin	Samudera Hindia, Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
4	94.1700	6.0000	India	1974	Landas Kontin	Samudera Hindia, Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
K	94.9300	7.0400	India	1977	Landas Kontin	Samudera Hindia, Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
N	95.4300	7.6700	India	1977	Landas Kontin	Samudera Hindia, Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
O	95.5200	7.7700	India	1977	Landas Kontin	Samudera Hindia, Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
R	93.6900	5.4200	India	1977	Landas Kontin	Samudera Hindia, Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
S	92.8500	4.4600	India	1977	Landas Kontin	Samudera Hindia, Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
T	92.7300	4.3100	India	1977	Landas Kontin	Samudera Hindia, Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
U	92.4000	4.0300	India	1977	Landas Kontin	Samudera Hindia, Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
cp	95.5300	7.7800	India - Thailand	1978	Landas Kontin	Laut Andaman	Trijunction Point			https://drive.google.com/...
1	97.9000	6.3600	Thailand	1971	Landas Kontin	Selat Malaka bagian utara	Tidak ada batas Laut Terito	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
2	96.6100	7.1000	Thailand	1971	Landas Kontin	Selat Malaka bagian utara	Tidak ada batas Laut Terito	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
A	96.6100	7.1000	Thailand	1975	Landas Kontin	Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial		Selesai	https://drive.google.com/...
L	95.5500	7.7700	Thailand	1975	Landas Kontin	Laut Andaman	Tidak ada batas Laut Teritorial		Selesai	https://drive.google.com/...
cp	98.0300	5.9500	Thailand - Malaysia	1978	Landas Kontin	Selat Malaka bagian utara			Selesai	https://drive.google.com/...
1	98.2900	5.4500	Malaysia	1969	Landas Kontin	Selat Malaka	Selesai	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
2	98.6900	4.9300	Malaysia	1969	Landas Kontin	Selat Malaka	Selesai	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
3	99.7300	3.9900	Malaysia	1969	Landas Kontin	Selat Malaka	Selesai	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
4	99.9200	3.7900	Malaysia	1969	Landas Kontin	Selat Malaka	Selesai	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
5	101.2000	2.6900	Malaysia	1969	Landas Kontin	Selat Malaka	Selesai	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
6	101.7800	2.2600	Malaysia	1969	Landas Kontin	Selat Malaka	Selesai	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
7	102.2200	1.9200	Malaysia	1969	Landas Kontin	Selat Malaka	Selesai	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
8	102.5800	1.6900	Malaysia	1969	Landas Kontin	Selat Malaka	Selesai	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
9	103.0700	1.3300	Malaysia	1969	Landas Kontin	Selat Malaka	Selesai	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
10	103.3800	1.2500	Malaysia	1969	Landas Kontin	Selat Malaka	Selesai	Belum Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
11	104.4900	1.4000	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan (sisi barat - lepas pantai ti	Tahap Perundingan		Selesai	https://drive.google.com/...
12	104.8800	1.6300	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
13	105.0900	1.9100	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
14	105.0200	2.3800	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
15	104.8600	2.9200	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
16	104.7800	3.8400	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
17	104.8700	4.0500	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
18	105.4800	5.0800	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
19	105.7900	5.6800	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
20	105.8200	6.1000	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
21	109.6500	2.0800	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan (sisi timur - lepas pantai S	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
22	109.9100	3.0000	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
23	110.0300	4.6700	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
24	109.9800	5.5200	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
25	109.6400	6.3000	Malaysia	1969	Landas Kontin	Laut Cina Selatan	Tahap Perundingan	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
1	101.0000	2.8600	Malaysia	1971	Laut Teritorial	Selat Malaka bagian selatan (Selat Singapura	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
2	101.2000	2.6900	Malaysia	1971	Laut Teritorial	Selat Malaka bagian selatan (Selat Singapura	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
3	101.7800	2.2600	Malaysia	1971	Laut Teritorial	Selat Malaka bagian selatan (Selat Singapura	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
4	102.2200	1.9200	Malaysia	1971	Laut Teritorial	Selat Malaka bagian selatan (Selat Singapura	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
5	102.5800	1.6900	Malaysia	1971	Laut Teritorial	Selat Malaka bagian selatan (Selat Singapura	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
6	103.0400	1.3200	Malaysia	1971	Laut Teritorial	Selat Malaka bagian selatan (Selat Singapura	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
7	103.0700	1.3300	Malaysia	1971	Laut Teritorial	Selat Malaka bagian selatan (Selat Singapura	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
8	103.3800	1.2500	Malaysia	1971	Laut Teritorial	Selat Malaka bagian selatan (Selat Singapura	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
1	103.6700	1.1800	Singapura	1973	Laut Teritorial	Selat Singapura Segmen Tengah	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
2	103.7400	1.1300	Singapura	1973	Laut Teritorial	Selat Singapura Segmen Tengah	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
3	103.8100	1.1700	Singapura	1973	Laut Teritorial	Selat Singapura Segmen Tengah	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
4	103.8600	1.2000	Singapura	1973	Laut Teritorial	Selat Singapura Segmen Tengah	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
5	103.8800	1.2100	Singapura	1973	Laut Teritorial	Selat Singapura Segmen Tengah	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...

Nama Titik	X	Y	Berbatasan	Tahun	Zona Maritim	Segmen	Laut Teritorial	ZEE	Landas Kontinen	Peta Batas Maritim
6	104.0300	1.2700	Singapura	1973	Laut Teritorial	Selat Singapura Segmen Tengah	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
1	103.6700	1.1800	Singapura	2009	Laut Teritorial	Selat Singapura Segmen Barat	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
1A	103.6600	1.1900	Singapura	2009	Laut Teritorial	Selat Singapura Segmen Barat	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
1B	103.5700	1.2000	Singapura	2009	Laut Teritorial	Selat Singapura Segmen Barat	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
1C	103.5700	1.2000	Singapura	2009	Laut Teritorial	Selat Singapura Segmen Barat	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
6	104.0300	1.2700	Singapura	2014	Laut Teritorial	Selat Singapura Segmen Timur, selatan Ch	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
7	104.0400	1.2700	Singapura	2014	Laut Teritorial	Selat Singapura Segmen Timur, selatan Ch	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
8	104.1200	1.2800	Singapura	2014	Laut Teritorial	Selat Singapura Segmen Timur, selatan Ch	Tahap Perundingan	Tidak ada batas ZEE	Tidak ada batas L	https://drive.google.com/...
20	105.8200	6.1000	Vietnam	2003	Landas Kontin	Pulau Natuna bagian Utara	Tidak ada batas Laut Teritorial	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
H	106.2000	6.2500	Vietnam	2003	Landas Kontin	Pulau Natuna bagian Utara	Tidak ada batas Laut Teritorial	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
H1	106.3200	6.2500	Vietnam	2003	Landas Kontin	Pulau Natuna bagian Utara	Tidak ada batas Laut Teritorial	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
A4	106.6600	6.3500	Vietnam	2003	Landas Kontin	Pulau Natuna bagian Utara	Tidak ada batas Laut Teritorial	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
X1	109.2900	6.8400	Vietnam	2003	Landas Kontin	Pulau Natuna bagian Utara	Tidak ada batas Laut Teritorial	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
25	109.6400	6.3000	Vietnam	2003	Landas Kontin	Pulau Natuna bagian Utara	Tidak ada batas Laut Teritorial	Tahap Perundingan	Selesai	https://drive.google.com/...
1	119.9300	3.1100	Filipina	2014	ZEE	Laut Sulawesi	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Pending	https://drive.google.com/...
2	121.3600	3.4400	Filipina	2014	ZEE	Laut Sulawesi	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Pending	https://drive.google.com/...
3	122.9300	3.8200	Filipina	2014	ZEE	Laut Sulawesi	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Pending	https://drive.google.com/...
4	124.8500	4.9600	Filipina	2014	ZEE	Laut Sulawesi	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Pending	https://drive.google.com/...
5	125.4700	5.0500	Filipina	2014	ZEE	Laut Sulawesi	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Pending	https://drive.google.com/...
6	127.2000	6.4200	Filipina	2014	ZEE	Laut Sulawesi	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Pending	https://drive.google.com/...
7	128.6500	6.4100	Filipina	2014	ZEE	Laut Sulawesi	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Pending	https://drive.google.com/...
8	129.5300	6.4100	Filipina	2014	ZEE	Laut Sulawesi	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Pending	https://drive.google.com/...
Land	141.0000	-6.3200	Papua Nugini	1973	Landas Kontinen		Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
Land	141.0200	-6.8900	Papua Nugini	1973	Landas Kontinen		Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
B3	141.0200	-9.1400	Papua Nugini	1973	Landas Kontinen		Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
B1	140.8300	-9.4100	Papua Nugini	1973	Landas Kontinen		Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
B2	140.8700	-9.3800	Papua Nugini	1973	Landas Kontinen		Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
North	141.0000	-2.5900	Papua Nugini	1973	Landas Kontinen		Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
C2	141.0300	-2.1400	Papua Nugini	1980	Landas Kontinen dan ZEE		Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
C3	141.4000	-1.0800	Papua Nugini	1980	Landas Kontinen dan ZEE		Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
C4	140.8200	0.7400	Papua Nugini	1980	Landas Kontinen dan ZEE		Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
C5	140.8100	1.0300	Papua Nugini	1980	Landas Kontinen dan ZEE		Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.1	140.4800	-9.8700	Australia	1971	Landas Kontin	Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.2	139.7700	-10.4000	Australia	1971	Landas Kontin	Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.3	139.2000	-10.8300	Australia	1971	Landas Kontin	Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.4	138.6300	-10.4000	Australia	1971	Landas Kontin	Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.5	138.5800	-10.3700	Australia	1971	Landas Kontin	Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.6	138.2200	-10.1500	Australia	1971	Landas Kontin	Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.7	137.7500	-9.9500	Australia	1971	Landas Kontin	Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.8	135.4800	-9.1300	Australia	1971	Landas Kontin	Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.9	135.2200	-9.2800	Australia	1971	Landas Kontin	Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.10	135.0500	-9.3700	Australia	1971	Landas Kontin	Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.11	134.8300	-9.4200	Australia	1971	Landas Kontin	Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.12	133.3800	-8.8800	Australia	1971	Landas Kontin	Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.13	133.2300	-8.9000	Australia	1972	Landas Kontin	Laut Timor dan Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.14	130.1700	-9.4200	Australia	1972	Landas Kontin	Laut Timor dan Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.15	128.0000	-9.4200	Australia	1972	Landas Kontin	Laut Timor dan Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.16	127.9300	-9.4700	Australia	1972	Landas Kontin	Laut Timor dan Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.17	126.0000	-10.4700	Australia	1972	Landas Kontin	Laut Timor dan Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.18	125.6800	-10.6200	Australia	1972	Landas Kontin	Laut Timor dan Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.19	125.3200	-11.0200	Australia	1972	Landas Kontin	Laut Timor dan Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.20	124.5700	-11.1200	Australia	1972	Landas Kontin	Laut Timor dan Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.21	124.1700	-11.4200	Australia	1972	Landas Kontin	Laut Timor dan Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.22	124.0000	-11.4300	Australia	1972	Landas Kontin	Laut Timor dan Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...
A.23	123.6700	-11.4700	Australia	1972	Landas Kontin	Laut Timor dan Arafura	Tidak ada batas Laut Teritorial	Selesai	Selesai	https://drive.google.com/...

5. BERKAS RAPAT BASIS DATA 25 OKTOBER 2022

5.1 UNDANGAN PESERTA



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA**

Jl. Kebon Sirih No. 31 Jakarta Pusat-10340 Tlp. (021)3142142 Web. <https://bnpp.go.id>

Nomor : BWN.84.01/2627/X/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 21 Oktober 2022

Yth. Pejabat dalam Daftar Terlampir
di -
Jakarta

Dengan hormat dipermaklumkan, bahwa dalam rangka optimalisasi pengamanan kawasan perbatasan laut berbasis Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, akan melaksanakan Rapat Koordinasi pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Hotel Orchardz Industri, Jalan Industri Raya, No. 8, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat
Agenda Rapat : Penyusunan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) Dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT.
Pimpinan Rapat : Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap kehadiran Saudara/i sebagai peserta pada rapat dimaksud dengan membawa bahan yang relevan dengan agenda rapat sesuai lingkup tugas Saudara/i, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan *Covid-19*.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rapat dapat menghubungi Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara melalui Sdra. Tommi (HP: 0813 7051 2504).

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**DEPUTI
BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA,**



Dr. ROBERT SIMBOLON, MPA

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris BNPP, sebagai laporan.

Lampiran I Surat Deputi I BNPP
Nomor : BWN.84.01/2627/X/2022
Tanggal : 21 Oktober 2022

**DAFTAR PESERTA
RAPAT PENYUSUNAN BASIS DATA PULAU–PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) DALAM RANGKA
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN PPKT
SELASA, 25 OKTOBER 2022**

- 1. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**
 - a. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara
 - b. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
- 2. KEMENTERIAN PERTAHANAN**
 - a. Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan
 - b. Direktur Wilayah Pertahanan
- 3. MABES TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Komandan Pushidros, TNI AL
- 4. BADAN KEAMANAN LAUT**

Direktur Kebijakan dan Strategi
- 5. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
 - a. Direktur Perencanaan Ruang Laut
 - b. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

JADWAL RAPAT
RAPAT PENYUSUNAN BASIS DATA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) DALAM RANGKA
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN PPKT
 Hotel Orchardz Industri, Jalan Industri Raya No. 8 Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat
 Tanggal 25 Oktober 2022

WAKTU	KEGIATAN/MATERI	NARASUMBER	MODERATOR	
1	2	3	4	
08.00 – 09.00	Check In & Registrasi			
09.00 – 09.30	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Laporan Panitia	Panitia	Kasubdisfastanah Disfaslanal TNI AL	
	Sambutan/Pengarahan dan Pembukaan secara Resmi	Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP		
09.30 – 09.45	Coffee Break			
	MATERI	NARASUMBER		MODERATOR
09.45 – 11.45	Sinergi Kementerian/Lembaga dalam Pemenuhan Sarana Prasarana di PPKT	1. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		
11.45 – 12.15	Ishoma			
12.15 – 14.15	Program pembangunan sarana prasarana di PPKT	2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertahanan		
14.15 – 14.30	Coffee Break			
14.30 – 16.30	Pembangunan Dermaga di Pulau Rondo	3. Direktur Pengendalian Program dan Anggaran, Kementerian Pertahanan		
16.30 – 18.30	Program pembangunan sarana prasarana telekomunikasi di PPKT.	4. Direktur Infrastruktur, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika		
18.30 – Selesai	Perumusan Kesimpulan Hasil Rapat dan Penutupan	Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP		

5.2 UNDANGAN NARASUMBER



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

Jl. Kebon Sirih No. 31 Jakarta Pusat-10340 Tlp. (021)3142142 Web. <https://bnpp.go.id>

Nomor : BWN.84.01/2628/X/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Narasumber dan Moderator

Jakarta, 21 Oktober 2022

Yth. Pejabat dalam Daftar Terlampir
di -

Jakarta

Dengan hormat dipermakdumkan, bahwa dalam rangka optimalisasi pengamanan kawasan perbatasan laut berbasis Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, akan melaksanakan Rapat Koordinasi pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Hotel Orchardz Industri, Jalan Industri Raya, No. 8, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat
Agenda Rapat : Penyusunan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) Dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT.
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap kehadiran Saudara sebagai Narasumber pada rapat dimaksud dengan membawa bahan paparan terkait agenda rapat, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan *Covid-19*.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rapat dapat menghubungi Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara melalui Sdra. Tommi (HP: 0813 7051 2504).

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

DEPUTI
BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA,



Dr. ROBERT SIMBOLON, MPA

Tembusan.:

Yth. Bapak Sekretaris BNPP, sebagai laporan.

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT PENYUSUNAN BASIS DATA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) DALAM RANGKA
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN PPKT
SELASA, 25 OKTOBER 2022

1. NARASUMBER

- a. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. Direktur Infrastruktur, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. Direktur Pengendalian Program dan Anggaran, Kementerian Pertahanan ;
- d. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertahanan.

2. MODERATOR

Kepala Subdinas Fasilitas Tanah Disfaslanal TNI AL.

JADWAL RAPAT
RAPAT PENYUSUNAN BASIS DATA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) DALAM RANGKA
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN PPKT
 Hotel Orchardz Industri, Jalan Industri Raya No. 8 Gunung Sahari Utara ,Jakarta Pusat
 Tanggal 25 Oktober 2022

WAKTU	KEGIATAN/MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1	2	3	4
08.00 – 09.00	Check In & Registrasi		
09.00 – 09.30	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Laporan Panitia	Panitia	Kasubdisfastanah Disfaslanal TNI AL
	Sambutan/Pengarahan dan Pembukaan secara Resmi	Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP	
09.30 – 09.45	Coffee Break		
	MATERI	NARASUMBER	
09.45 – 11.45	Sinergi Kementerian/Lembaga dalam Pemenuhan Sarana Prasarana di PPKT	1. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	
11.45 – 12.15	Ishoma		
12.15 – 14.15	Program pembangunan sarana prasarana di PPKT	2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertahanan	
14.15 – 14.30	Coffee Break		
14.30 – 16.30	Pembangunan Dermaga di Pulau Rondo	3. Direktur Pengendalian Program dan Anggaran, Kementerian Pertahanan	
16.30 – 18.30	Program pembangunan sarana prasarana telekomunikasi di PPKT.	4. Direktur Infrastruktur, Badan Aksibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika	
18.30 – Selesai	Perumusan Kesimpulan Hasil Rapat dan Penutupan	Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP	





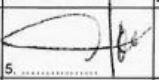

5.3 DAFTAR HADIR PESERTA

DAFTAR HADIR				
RAPAT ANALISA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA HANKAM NON ALUTSISTA YANG DIBUTUHKAN UNTUK PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DI PPKT PENANGANAN KHUSUS				
BERTEMPAT DI HOTEL ORCHARD INDUSTRI JAKARTA, SELASA, 25 OKTOBER 2022				
No.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	NPWP	TANDA TANGAN
1	LETTU (KH) RIZAL T.	PAUR ADAPUS TANAH DISFASLANAL	84.062.836.9-999.000	1.
2	Kol. Joni Juvendi	Bid. Kodr Hasmanisasi Kibijekera	47.327.629.4-954.000	2.
3	LETTA CEM HAM HAMS	BAIS TNI	88.08.255.2-801.000	3.
4	LtK LANT (D) SUCIPTO	Dirutihan Kemhan	44.206.695.7.421.000	4.
5	ROY SAGALA	SAKTI Kominfo	47.805.208.7-411.000	5.
6	HERU PURWANTO	KABOLABEAS ROBEKUR KEMHAN	43.021.853.4.902.000	6.
7	NAUFAL SANCA LOYANDHIKA	ANALIS TATA RUANG/DIT.PRL-KIP	70.291.200.8-412.000	7.
8	Francisco Agisi Muhamera	Anjak Madja Dirutirabi Bantala	26.492.655.8.005.000	8.
9	WIC HADI UCHINO	ANALIS DALPROBEK REKUN		9.
10	ARIF SUDIAWTO	Subk. KANT - DIT.PRL-KIP	89.249.251.6-412.000	10.
11	S. HARZAHIDY	Pakar C 4		11.
12	NOR SARKOLA			12.
13	Amrta Rahmi	Staf Taslaud. ANPP	53.229.245.020-3.000	13.
14	Freedo S.H. Sinarat.	Staf Taslaud ANPP	63.002.462.021.000	14.
15	Willianto P. Sinarat	Staf Taslaud ANPP		15.

No.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	NPWP	TANDA TANGAN
16	DI. MAULIYADI	STAF TASLAUD		16.
17	Esni Indrasari	Perenc Muda Taslaud	57.241.065.1A32.000	17.
18	Sufarwan	Staf Taslaud, BNPP	77.413.022.3-054.000	18.
19	EKA PUTRA	Staf TASLAUD BNPP		19.
20	Sonaganti Utami Putri Bantari	Staf Taslaud Bantari, Utami Bantari		20.
21	Fatrah Fatmala	Staf Taslaud		21.
22	David Hayyadi	Ksdt geropisla Bantala		22.
23	Pulung	Padya 3/i Stenum TNI		23.
24	ZAINUDDIN M	REKUNAN KEMHAN		24.
25	Heru Kurniawan	Rekunan		25.
26	Trimulyono	Pushid ro-sul		26.
27	ARIYAN D	BAIS TNI		27.
28	SYA RIF H	Klep		28.
29	Ibnu Fatah	Padya G. Sten-Sop TNI		29.
30	Umar Budi	Klep TNI K		30.
31	Amad Anis	Kor PRK d PDET KKP		31.
32	I made Ray Wirasa	Staf Biro KUH, BNPP		32.
33	Cinde Marni Mita	Korps Taktikhas Kemhan		33.
34	A Sofyan	Kamhan		34.
35	Kol. Jai Shaky	Ksdt Willam		35.
36	Dep. In P	Pabandya Bantari Bantari		36.
37	Dan Wahyuni	Padya I Jastan Stenum TNI		37.
38	Edhy Prasetya	Ksdt Jastan Dispersand		38.
39	Asep Seli	Pabandya Soprs TNI		39.
40	Alexander Ganteng	Pabandya Dalpro Bantari V Stenum		40.
41	Viktor Sanyan	Sdt Wlud Kemhan		41.
42	Lusita Budi	TANAL		42.
43	Dyan Adistia	Staf Taslaud		43.
44				44.
45				45.

5.4 DAFTAR HADIR NARASUMBER

DAFTAR HADIR NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT ANALISA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA HANKAM NON ALUTSISTA YANG DIBUTUHKAN UNTUK PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DI PPKT PENANGANAN KHUSUS
BERTEMPAT DI HOTEL ORCHARDZ INDUSTRI JAKARTA, SELASA, 25 OKTOBER 2022

No.	N A M A	J A B A T A N	ALAMAT EMAIL	NPWP	TANDA TANGAN
1	2	3	5	6	7
1	ROY SAGALA	Staf Ahli Dir Infrastruktur DAETI I Kominfo	j.roysagala@gmail.com	47.805.208.7-411.000	1. 
2	Vutikuo Vulum	Asdep Wiltat Iptar Kementan Polhukam	alberhetio.sagunaidi@gmail.com		2. 
3	Bambang Irawan	DirOps Laut Bakamla			3. 
4	RIDO BATUBARA	AHLI Madya Dikp			4. 
5	Harry Prasetyo	Kat TGT Disfusi Mabasat	harryprasetyo@gmail.com	48.246.847.9-112.000	5. 
6	Wito HU	Analys Renhar, Komhar			6. 

5.5 NOTA DINAS HASIL RAPAT



BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

ASDEP PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT DAN UDARA

NOTA DINAS

Nomor:

Yth. : Bapak Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
Dari : Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara
Hal : Laporan Rapat Penyusunan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT)
dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT
Tanggal :

Dengan hormat dilaporkan, menindaklanjuti Surat Undangan Bapak Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara nomor BWN.84.01/2627/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, hal Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT, bersama ini dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Oktober 2022 di Hotel Orchardz Industri, Jl. Industri Raya No.8, RT.17/RW.3, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Rapat dibuka oleh Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, dan dihadiri oleh para pejabat yang mewakili K/L terkait (Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mabes TNI, dan Badan Keamanan Laut).
2. Tujuan penyelenggaraan rapat adalah untuk mempermudah Kementerian/Lembaga dan BNPP dalam penyajian, mencari data sarana prasarana di PPKT, serta mendukung penguatan fungsi dan kewenangan BNPP selaku Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).
3. Beberapa hal yang disampaikan pada rapat sebagai berikut:
 - a. Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara
Keasdepan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara sedang melaksanakan penyusunan basis data sarpras hankam non alutsista di PPKT sebagai bentuk pengintegrasian data (mess pamputer, *speedboat* patroli, dan menara *base transceiver station*). Pengelolaan PPKT sebagai titik terluar (wilayah perbatasan) diarahkan harus dapat mendukung upaya pertahanan negara dan pengelolaan SDA dan kepentingan ekonomi di wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga kebijakan pemenuhan sarana prasarana di PPKT harus mempertimbangkan hal tersebut.
 - b. Kementerian Pertahanan
 - i. Dalam Renaksi pembangunan sarpras hankam wilayah perbatasan Kementerian Pertahanan TA. 2022 s.d 2024 tidak melaksanakan pembangunan dermaga. Namun Kementerian Pertahanan memberikan saran dalam pembangunan dermaga seperti di Pulau Rondo. Untuk pembangunan dermaga diperlukan kajian

strategis dan teknis mendalam mengingat letak pulau yang berada di perairan terbuka di Samudera Hindia.

Tabel 1. Rencana Aksi Pembangunan Sarana Prasarana Pertahanan Wilayah Perbatasan TA. 2022 s.d 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	TARGET			PUSAT/ DAERAH/	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN / LEMBAGA)
					2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KP 2. PENINGKATAN PERTAHANAN WILAYAH NEGARA									
1	Pembukaan/rintisan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan	Panjang Rintisan/ Pembukaan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan	932	Km	57,98	375	370,28	Prov. Kalbar, Prov. Kaltim, Prov. Kaltara	Kementerian Pertahanan
2	Perkerasan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan	Panjang Perkerasan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan	1662	Km	59,81	765	761,54	Prov. Kalbar, Prov. Kaltim, Prov. Kaltara	Kementerian Pertahanan
10	Pembangunan Pos Pengamanan Perbatasan (Pantas)	Jumlah Pos Pantas yang dibangun	43	Pos	12	4	4	Prov. Kalbar, Prov. Kaltara, Prov. Papua, dan Prov. NTT	TNI/ UO TNI AD

Tabel 2. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan POS TNI AL Tahun Anggaran 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN PROYEK	VOLUME	SATUAN	ALOKASI	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN		PERMASALAHAN
						ANGGARAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AF	PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA, NON ALUTSISTA DAN SARPRASHAN							
6516	PEMBANGUNAN/PENGADAAN SARPRASHAN MATRA LAUT							
RBM	PRASARANA BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN							
	003 POSAL/POS KAWASAN PERBATASAN (UNIT)	11	UNIT	29.937.500.000	1.046.250.000	3,49%	49,95%	TA.2021-2022 = 6 UNIT TA. 2022-2023 = 5 UNIT PELAKSANAAN PEKERJAAN TA.2022-2023 BARU DIMULAI DIKARENAKAN IJIN PRINSIP KONTRAK MULTIYEARS BARU DISETUJUI

Sumber: Laporan Prioritas Nasional KSP Periode B-09 Srena Mabasal, diolah

Terlampir peta lokasi pembangunan POSAL;

- ii. Penempatan Pamputer sudah dilakukan di 24 PPKT, namun Kementerian Pertahanan fokus melakukan pembangunan sarana prasarana pendukung masih di 12 PPKT.

c. Kementerian Komunikasi dan Informatika

- i. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika belum memiliki program dan rencana pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di PPKT tetapi di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), salah satunya di perbatasan negara. Hal tersebut dilakukan melalui usulan panglima TNI kepada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui MOU, bakti sedang berproses dalam pembangunan BTS di 35

pos pamtas. Sedangkan untuk komunikasi seluler bukan ranah BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- ii. Selain pembangunan BTS, BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika juga melakukan Palapa Ring Integrasi yaitu proyek infrastruktur telekomunikasi pembangunan *fiber optic* yang ada di laut maupun darat yang ada di perbatasan negara untuk membuat jaringan yang ada saat ini makin baik.

d. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam waktu dekat akan mengundang Kementerian Dalam Negeri terkait kependudukan di PPKT berstatus tidak berpenduduk. Saat ini dari 42 PPKT berpenduduk masih perlu dikonfirmasi, termasuk 69 PPKT Tidak Berpenduduk karena basis data kependudukan akan berpengaruh dalam pemenuhan sarpras hankam berdasarkan kluster PPKT. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah melakukan penyusunan basis data. Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mendukung dalam indikasi program salah satunya pembangunan sarpras di PPKT. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana untuk membuat Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri dengan melibatkan K/L dalam pemenuhan sarana prasarana di PPKT, harapannya dari Peraturan Menteri tersebut dapat mendorong K/L dalam melakukan pembangunan sarana prasarana di PPKT.

4. Rencana Tindak Lanjut

- a. Penyusunan basis data sarana prasarana PPKT yaitu mess pamputer/pos jaga, *speedboat*, dan BTS akan diintegrasikan dengan data sarpras hankam non alutsista lainnya di PPKT. Pengintegrasian ini akan disusun dalam laporan penyusunan basis data PPKT dalam rangka efektivitas pengelolaan batas maritim dan PPKT;
- b. Rapat tindak lanjut Penyusunan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT dilaksanakan pada tanggal 26 dan 28 Oktober 2022 dengan fokus pada Sarpras Hankam Non Alutsista yang telah dilakukan identifikasi di PPKT tidak berpenduduk dan penanganan khusus (*breakwater*, tanggul laut, Pilar Titik Referensi, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, dan dermaga);
- c. Hasil dari tahapan rapat dimaksud akan dikompilasi ke dalam laporan penyusunan basis data K/L teknis untuk memastikan program dimaksud telah atau belum masuk dalam dokumen perencanaan K/L khusus sarpras hankam non Alutsista 2023-2024.

Demikian untuk menjadi pemeriksaan dan mohon arahan lebih lanjut.

SITI METRIANDA

6. BERKAS RAPAT BASIS DATA 26 OKTOBER 2022

6.1 UNDANGAN PESERTA



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA**

Jl. Kebon Sirih No. 31 Jakarta Pusat-10340 Tlp. (021)3142142 Web. <https://bnpp.go.id>

Nomor : BWN.84.01/2629/X/2022 Jakarta, 21 Oktober 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Pejabat dalam Daftar Terlampir
di -
Jakarta

Dengan hormat dipermaklumkan bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, Asisten Deputy Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, akan melaksanakan rapat pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Grand Cemara Hotel, Jl. Cemara No. 1, RT 5/RW 3, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
Agenda Rapat : Penyusunan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT.
Pimpinan Rapat : Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap kehadiran Saudara/i sebagai peserta pada rapat dimaksud dengan membawa bahan yang relevan dengan agenda rapat sesuai lingkup tugas Saudara/i, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rapat dapat menghubungi Asisten Deputy Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara melalui Sdri. Yori Elfritriani (HP: 0822 8587 7894).

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**DEPUTI
BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA,**



Dr. ROBERT SIMBOLON, MPA

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris BNPP, sebagai laporan.

Lampiran I Surat Deputi I, BNPP
Nomor : BWN.84.01/2629/X/2022
Tanggal : 21 Oktober 2022

DAFTAR PESERTA
RAPAT PENYUSUNAN BASIS DATA PULAU–PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) DALAM RANGKA
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN PPKT
RABU, 26 OKTOBER 2022

1. KEMENTERIAN PERTAHANAN

- a. Direktur Wilayah Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
- b. Direktur Pengendalian Program dan Anggaran, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
- c. Direktur Perencanaan Program dan Anggaran, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.

2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- a. Direktur Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- b. Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

3. KEMENTERIAN KEUANGAN

Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktorat Jenderal Anggaran.

4. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

- a. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara;
- b. Fungsional Ahli Madya pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara;
- c. Fungsional Ahli Muda pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara;
- d. JFU pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara;
- e. Staf pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara.

JADWAL RAPAT
RAPAT PENYUSUNAN BASIS DATA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) DALAM RANGKA
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN PPKT

Grand Cemara Hotel, Jl. Cemara No. 1, RT 5/RW 3, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
 Tanggal 26 Oktober 2022

WAKTU	KEGIATAN/MATERI	NARASUMBER	MODERATOR	
1	2	3	4	
08.00 – 09.00	Check in & Registrasi			
09.00 – 09.30	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia	Kasubdis Fasilitas Perawatan Personil, Disfaslanal, TNI AL	
	2. Sambutan/Pengarahan dan Pembukaan secara Resmi	Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP		
09.30 – 09.45	Coffee Break			
	MATERI	NARASUMBER		MODERATOR
09.45 – 11.45	Kebijakan Perencanaan Program Sarana Prasarana di PPKT	1. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional		
11.45 – 12.15	Ishoma			
12.15 – 14.15	Kebijakan Perencanaan dan Program dalam Pembangunan Sarana Prasarana di PPKT	2. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
14.15 – 14.30	Coffee Break			
14.30 – 16.30	Kebijakan Pembangunan Dermaga di PPKT	3. Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan		
16.30 – 18.30	Kebijakan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi di PPKT	4. Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan		
18.30 – Selesai	Perumusan Kesimpulan Hasil Rapat dan Penutupan	Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP		

PANITIA PENYELENGGARA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT DAN UDARA BNPP

6.2 UNDANGAN NARASUMBER



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

Jl. Kebon Sirih No. 31 Jakarta Pusat-10340 Tlp. (021)3142142 Web. <https://bnpp.go.id>

Nomor : BWN.84.01/2630/X/2022 Jakarta, 21 Oktober 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Narasumber dan Moderator

Yth. Pejabat dalam Daftar Terlampir
di -
Jakarta

Dengan hormat dipermaklumkan bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, akan melaksanakan rapat pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Grand Cemara Hotel, Jl. Cemara No. 1, RT 5/RW 3, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
Agenda Rapat : Penyusunan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT.
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap kehadiran Saudara sebagai Narasumber dan Moderator pada rapat dimaksud dengan membawa bahan paparan terkait agenda rapat, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan *Covid-19*.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rapat dapat menghubungi Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara melalui Sdri. Yori Elfitriani (HP: 0822 8587 7894).

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

DEPUTI
BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA,



Dr. ROBERT SIMBOLON, MPA

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris BNPP, sebagai laporan.

Lampiran I Surat Deputi I, BNPP
Nomor : BWN.84.01/2630/X/2022
Tanggal : 21 Oktober 2022

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT PENYUSUNAN BASIS DATA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) DALAM RANGKA
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN PPKT
RABU, 26 OKTOBER 2022

1. NARASUMBER :

- a. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
- c. Direktur Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
- d. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. MODERATOR :

Kasubdis Fasilitasi Perawatan Personil, Disfaslanal, TNI AL

Lampiran II Surat Deputi I, BNPP
 Nomor : BWN.84.01/2630/X/2022
 Tanggal : 21 Oktober 2022

JADWAL RAPAT
RAPAT PENYUSUNAN BASIS DATA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) DALAM RANGKA
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN PPKT
 Grand Cemara Hotel, Jl. Cemara No. 1, RT 5/RW 3, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
 Tanggal 26 Oktober 2022

WAKTU	KEGIATAN/MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1	2	3	4
08.00 – 09.00	Check In & Registrasi		
09.00 – 09.30	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia	Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP
	2. Sambutan/Pengarahan dan Pembukaan secara Resmi		
09.30 – 09.45	Coffee Break		
	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
09.45 – 11.45	Kebijakan Perencanaan Program Sarana Prasarana di PPKT	1. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kasubdis Fasilitas Perawatan Personil, Disfaslanal, TNI AL
11.45 – 12.15	Ishoma		
12.15 – 14.15	Kebijakan Perencanaan dan Program dalam Pembangunan Sarana Prasarana di PPKT	2. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
14.15 – 14.30	Coffee Break		
14.30 – 16.30	Kebijakan Pembangunan Dermaga di PPKT	3. Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	
16.30 – 18.30	Kebijakan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi di PPKT	4. Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	
18.30 – Selesai	Perumusan Kesimpulan Hasil Rapat dan Penutupan	Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP	

PANITIA PENYELENGGARA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT DAN UDARA BNPP

6.3 DAFTAR HADIR PESERTA

DAFTAR HADIR
RAPAT IDENTIFIKASI SARANA PRASARANA ALAT KOMUNIKASI DAN SARANA BANTU NAVIGASI DI PPKT TIDAK BERPENDUDUK
BERTEMPAT DI HOTEL GRAND CEMARA JAKARTA, RABU, 26 OKTOBER 2022

No.	N A M A	JABATAN/INSTANSI	NPWP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Leida Cpm Haris Haris	BAS TU I	06.128.25T.2-801.000	1.
2	ASEP SOFYANU	DITULHAN KEMENHUB	36.169.69.5-043.000	2.
3	Ellenlen	DITWAL KEMENHUB		3.
4	WILHAN ARIS	Koordinator, PORT, KIRP		4.
5	Eko Artanto	Kor. Pemula Batas Wil. DE		5.
6	HAIR RAHMAT	SURTA PIRW, BIG		6.
7	Inda Supriatna, Ds.	Kor. Pem. Batas Wil. DE		7.
8	Simone	Sops, Mula TALI		8.
9	Qusis	WILHAN, KEMHUB		9.
10	Ibnu Fatchi	Sops TUI		10.
11	Edu Rahma	Identi.		11.
12	Agung R	Analisis Kimia		12.
13	Dandan	Wk. amli air laut		13.
14	M. Nur Fohman	Polri	34.412.669.041.000	14.
15	Indy. H.	Polri		15.

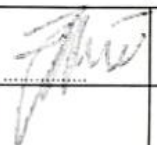

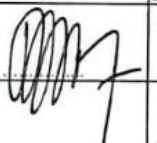
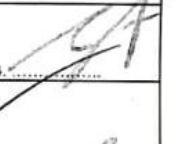
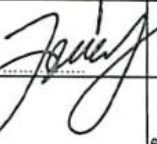
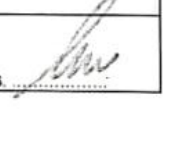
DAFTAR HADIR
RAPAT IDENTIFIKASI SARANA PRASARANA ALAT KOMUNIKASI DAN SARANA BANTU NAVIGASI DI PPKT TIDAK BERPENDUDUK
BERTEMPAT DI HOTEL GRAND CEMARA JAKARTA, RABU, 26 OKTOBER 2022

No.	N A M A	JABATAN/INSTANSI	NPWP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Leida Cpm Haris Haris	BAS TU I	06.128.25T.2-801.000	1.
2	ASEP SOFYANU	DITULHAN KEMENHUB	36.169.69.5-043.000	2.
3	Ellenlen	DITWAL KEMENHUB		3.
4	WILHAN ARIS	Koordinator, PORT, KIRP		4.
5	Eko Artanto	Kor. Pemula Batas Wil. DE		5.
6	HAIR RAHMAT	SURTA PIRW, BIG		6.
7	Inda Supriatna, Ds.	Kor. Pem. Batas Wil. DE		7.
8	Simone	Sops, Mula TALI		8.
9	Qusis	WILHAN, KEMHUB		9.
10	Ibnu Fatchi	Sops TUI		10.
11	Edu Rahma	Identi.		11.
12	Agung R	Analisis Kimia		12.
13	Dandan	Wk. amli air laut		13.
14	M. Nur Fohman	Polri	34.412.669.041.000	14.
15	Indy. H.	Polri		15.

No.	N A M A	J A B A T A N I N S T A N S I	N P W P	T A N D A T A N G A N
1	2	3	4	5
16	Indah D	Kemlu	27.663.373.725.00	16.....
17	Muhammad Hudaib W.	Polri	41.007.181.5.516.00	17.....
18	Pasir	TNI AL	77.137.578.864.2.00	18.....
19	Wahyuni	Pabank 1 Bank Syariah TNI	68.507.711.7.643.00	19.....
20	Indah Sutarnoto	Ksdt Tala ruay, Wilan, Kengkou	89.213.075.8.435.00	20.....
21	Indah Sutarnoto	TNI AL	77.415.420.661.9.00	21.....
22	Indah Sutarnoto	Kad Kencu, Pustakal	75.893.677.557.1.00	22.....
23	Indah Sutarnoto	Pabank 1 Bank TNI		23.....
24	Indah Sutarnoto	Pabank 1, Pustakal	78.256.059.302.3.00	24.....
25	Indah Sutarnoto	Kad Kencu, Pustakal	67.987.550.6.543.00	25.....
26	Indah Sutarnoto	Kad Kencu, Pustakal	42.302.307.9.000.00	26.....
27	Indah Sutarnoto	Kembatis, Pustakal, TNI AL	78.452.601.9.607.00	27.....
28	Indah Sutarnoto	Pabank 1, Pustakal	68.439.791.2.607.00	28.....
29	Indah Sutarnoto	Kad Kencu, Pustakal	69.163.761.2.636.00	29.....
30	Indah Sutarnoto	Kad Kencu, Pustakal	72.435.605.070.4.00	30.....
31	Indah Sutarnoto	Surveyor Pemetaan, BIE	66.306.108.5.642.00	31.....
32	Indah Sutarnoto	Kasigau UC, Kengkou	77.423.783.2.009.00	32.....

6.4 DAFTAR HADIR NARASUMBER

DAFTAR HADIR NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT IDENTIFIKASI SARANA PRASARANA ALAT KOMUNIKASI DAN SARANA BANTU NAVIGASI DI PPKT TIDAK BERPENDUDUK
BERTEMPAT DI HOTEL GRAND CEMARA JAKARTA, RABU, 26 OKTOBER 2022

No.	N A M A	J A B A T A N	ALAMAT EMAIL	NPWP	TANDA TANGAN
1	2	3	5	6	7
1	Brigjen TNI Novi Herianto	Dirdalprogar, Kemhan		15.368.761.1.223.000	1. 
2	Laksma TNI Bambang Irawan	Direktur Ops. Laut, Bakamla		65.422.185.2.074.000	2. 
3	Sinung Budi Prasjo	Kadis Nautika Pushidrosal		78.415.186.2.043.000	3. 
4	Rahadi Bintang	Sub Koor. Kelompok Program Pembangunan Faspel, Kemhub		78.178.535.7.215.000	4. 
5	Kol. Jerry Kristianto	Kasubdit Wil. Udara, Ditwilhan, Kemhan		87.235.857.9.045.000	5. 
6	Kombes Pol. Andy Kemala, S.IK, MM	Srena, Mabes Polri		08.276.802.9-801.000	6. 

6.5 NOTA DINAS HASIL RAPAT



BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

ASDEP PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT DAN UDARA

NOTA DINAS

Nomor:

Yth. : Bapak Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
Dari : Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara
Hal : Laporan Rapat Penyusunan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT)
dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT
Tanggal :

Dengan hormat dilaporkan, menindaklanjuti Surat Undangan Bapak Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nomor BWN.84.01/2629/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, hal Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Basis Data PPKT dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT, bersama ini dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 di Grand Cemara Hotel, Jl. Cemara No. 1, RT 5/RW 3, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat. Rapat dibuka oleh Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, dan dihadiri oleh para pejabat yang mewakili K/L terkait (Kementerian Pertahanan, Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan, Direktorat Kenavigasian Kementerian Perhubungan).
2. Tujuan penyelenggaraan rapat adalah untuk mengintegrasikan data batas maritim dan PPKT untuk mempermudah Kementerian/Lembaga dan BNPP dalam pencarian data batas maritim dan sarana prasarana di PPKT untuk koordinasi perencanaan/fasilitasi pelaksanaan program/kegiatan di BWN-KP, serta mendukung penguatan fungsi dan kewenangan BNPP selaku Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).
3. Beberapa hal yang disampaikan pada rapat sebagai berikut:
 - i. Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara
 - a. Identifikasi kebutuhan sarana prasarana pertahanan dan keamanan oleh Keasdepan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara sebagaimana surat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan nomor BWN.84.01/1233/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 hal hasil identifikasi dan evaluasi sarpras hankam non alutsista di PPKT;
 - b. Sarana prasarana yang diidentifikasi di PPKT pada rapat hari ini adalah dermaga, SBNP, tanggul laut dan pemecah ombak. Kondisi saat ini secara umum adalah belum ada program/kegiatan di Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Kepelabuhanan untuk pembangunan sarana prasarana dimaksud di PPKT Tidak Berpenduduk;
 - c. Dalam rangka melaksanakan pembangunan ke-7 RPJMN Tahun 2020-2024 melalui Program Prioritas menjaga stabilitas keamanan nasional dengan penguatan keamanan dalam negeri, dilaksanakan 7 (tujuh) proyek prioritas penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar. Merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2022

tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan terdapat kegiatan pembangunan sempadan dan tanggul abrasi pantai di 19 PPKT yang menjadi target capaian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2023 sebanyak 9 PPKT dan tahun 2024 sebanyak 10 PPKT, hal ini menjadi fokus pemantapan stabilitas keamanan nasional.

ii. Kementerian Pertahanan

Untuk mendukung penguatan sistem pengamanan laut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan peningkatan kekuatan pertahanan negara dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang mencakup sarana prasarana, alutsista (materil) dan personil;
- b. Pembangunan dan peningkatan kemampuan pertahanan negara dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang mencakup intelijen, pertahanan, keamanan, diplomasi, pemberdayaan wilayah pertahanan laut dan survei/pemetaan.
- c. Upaya mengadakan Sarpras *Speedboat* di perbatasan untuk peningkatan patroli pengamanan laut dalam rangka penegakan hukum dan keamanan di laut teritorial dan yurisdiksi Indonesia.
- d. Pembangunan sistem pengendalian keamanan laut terpadu dan terintegrasi (*Command Center*).
- e. Mengikutsertakan elemen masyarakat pesisir dan perbatasan sebagai mata telinga negara dalam upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi ancaman di perbatasan laut negara.

iii. Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan

- a. Khusus untuk Pulau Fani yang merupakan PPKT Tidak Berpenduduk di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat telah dibangun dermaga pengumpan lokal yang dibangun dengan alasan khusus. Alasan pembangunan dermaga ini secara khusus akan diinformasikan oleh Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan secara tertulis pada kesempatan berikutnya.
- b. Pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dimana lokasi rencana pelabuhan harus telah tercantum dalam lampiran A2 RIPN yang disusun setiap lima tahun atau dapat direview jika ada kebutuhan.
- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.112 tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.245 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Bahwa usulan kegiatan harus memenuhi dokumen-dokumen perencanaan dan administrasi serta izin lingkungan.
- d. Terdapat rencana lokasi pada RIPN untuk 12 PPKT antara lain: P. Rondo, P. Berhala, P. Sekatung, P. Marore, P. Miangas, P. Marampit, P. Nipah, P. Batek, P. Fanildo, P. Ndana, P. Fani, dan P. Bras, namun bersifat opsional dalam mengalokasikan perencanaan pembangunan pelabuhan/dermaga di PPKT Tidak Berpenduduk.

Gambar 1. Peta Sebaran Rencana Pembangunan Dermaga di 12 PPKT



Sumber: Paparan Direktorat Kepelabuhanan pada rapat tanggal 26 Oktober 2022

iv. Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar telah ditetapkan 92 (Sembilan dua) PPKT dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan jumlah Pulau-pulau Kecil terluar sehingga menjadi 111 (seratus sebelas) PPKT.

Tabel 1. Data SBNP di Pulau Terluar sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2005

NO	NAMA	POSISI	PERBATASAN DGN NEGARA	JENIS SBNP	STATUS	DISTRIK NAVIGASI
1	2	3	4	5	6	7
1	P. Sentut	01° 02' 52" U / 104° 49' 50" T	Malaysia	Ramsu 30 m	Dibangun 2011	Tg.Pinang
2	P. Tokong Malang Biru	02° 18' 00" U / 105° 35' 47" T	Malaysia	Ramsu 10 m	Sudah ada	Tg.Pinang
3	P. Damar	02° 44' 29" U / 105° 22' 46" T	Malaysia	Ramsu 10 m	Sudah ada	Tg.Pinang
4	P. Mangkai	03° 05' 32" U / 105° 35' 00" T	Malaysia	Mensu 40 m	Sudah ada	Tg.Pinang
5	P. Tokong Nanas	03° 19' 52" U / 105° 57' 04" T	Malaysia	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Tg.Pinang
6	P. Tokong Berlayar	03° 27' 04" U / 106° 16' 08" T	Malaysia	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Tg.Pinang
7	P. Tokong Boro	04° 04' 01" U / 107° 26' 09" T	Malaysia	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Tg.Pinang
8	P. Semiun	04° 31' 09" U / 107° 43' 11" T	Malaysia & Vietnam	Mensu 40 m	Sudah ada	Tg.Pinang
9	P. Sebetul	04° 42' 25" U / 107° 54' 20" T	Vietnam	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Tg.Pinang
10	P. Sekatung	04° 47' 38" U / 108° 00' 39" T	Vietnam	Mensu 30 m	Sudah ada	Tg.Pinang
11	P. Senua	04° 00' 48" U / 108° 25' 04" T	Malaysia	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Tg.Pinang
12	P. Subi kecil	03° 01' 51" U / 108° 54' 52" T	Malaysia	Mensu 22 m	Sudah ada	Tg.Pinang
13	P. Kepala	02° 38' 43" U / 109° 10' 04" T	Malaysia	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Tg.Pinang
14	P. Sebatik Timur	04° 10' 00" U / 117° 54' 00" T	Malaysia	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Tarakan
15	Gosong Makassar	03° 59' 25" U / 117° 57' 42" T	Malaysia	Ramsu 15 m	Dibangun 2006	Tarakan
16	P. Maratua	02° 15' 12" U / 118° 38' 41" T	Malaysia	Mensu 40 m	Sudah ada	Tarakan
17	P. Sambit	01° 46' 53" U / 119° 02' 26" T	Malaysia	Mensu 40 m	Sudah ada	Tarakan
18	P. Lingian	00° 59' 55" U / 120° 12' 50" T	Malaysia	Ramsu 10 m	Sudah ada	Bitung
19	P. Salando	01° 20' 16" U / 120° 47' 31" T	Malaysia	Mensu 25 m	Sudah ada	Bitung
20	P. Dolangan	01° 22' 40" U / 120° 53' 04" T	Malaysia	Ramsu 15 m	Dibangun 2006	Bitung
21	P. Bangkil	01° 02' 52" U / 123° 06' 45" T	Philipina	Ramsu 10 m	Sudah ada	Bitung
22	P. Manterawu	01° 45' 47" U / 124° 43' 51" T	Philipina	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Bitung
23	P. Makalehi	02° 44' 15" U / 125° 09' 28" T	Philipina	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Bitung
24	P. Kawalusu	04° 14' 06" U / 125° 18' 59" T	Philipina	Mensu 30 m	Sudah ada	Bitung
25	P. Kawio	04° 40' 16" U / 125° 25' 41" T	Philipina	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Bitung
26	P. Marore	04° 44' 14" U / 125° 28' 42" T	Philipina	Mensu 40 m	Sudah ada	Bitung
27	P. Batu Bawaikang	04° 44' 46" U / 125° 29' 24" T	Philipina	Ramsu 30 m	Dibangun 2011	Bitung
28	P. Miangas	05° 34' 02" U / 126° 34' 54" T	Philipina	Mensu 30 m	Sudah ada	Bitung

29	P. Marampit	04° 46' 18" U / 127° 08' 32" T	Philipina	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Bitung
30	P. Intata	04° 38' 38" U / 127° 09' 49" T	Philipina	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Bitung
31	P. Kakarutan	04° 37' 36" U / 127° 09' 53" T	Philipina	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Bitung
32	P. Yiew	00° 43' 39" U / 129° 08' 30" T	Palau	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Ambon
33	P. Budd	00° 32' 08" U / 130° 43' 52" T	Palau	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Sorong
34	P. Fani	01° 04' 28" U / 131° 16' 49" T	Palau	Ramsu 10 m	Sudah ada	Jayapura
35	P. Miossu	00° 20' 16" S / 132° 09' 34" T	Palau	Ramsu 16,5 m	Sudah ada	Jayapura
36	P. Fanildo	00° 56' 22" U / 134° 17' 44" T	Palau	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Jayapura
37	P. Brass	00° 55' 57" U / 134° 20' 30" T	Palau	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Jayapura
38	P. Bepondi	00° 23' 38" S / 135° 16' 27" T	Palau	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Jayapura
39	P. Liki	01° 34' 26" S / 138° 42' 57" T	Palau	Mensu 40 m	Sudah ada	Jayapura
40	P. Kolepon	08° 24' 56" S / 137° 38' 05" T	Australia	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Merauke
41	P. Laag	05° 23' 14" S / 137° 43' 07" T	Australia	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Merauke
42	P. Ararkula	05° 35' 42" S / 134° 49' 05" T	Australia	Ramsu 30 m	Dibangun 2011	Tual
43	P. Karaweira	06° 00' 09" S / 134° 54' 26" T	Australia	Ramsu 30 m	Dibangun 2011	Tual
44	P. Penambulai	06° 19' 26" S / 134° 54' 53" T	Australia	Ramsu 30 m	Dibangun 2011	Tual
45	P. Kultubai Utara	06° 38' 50" S / 134° 50' 12" T	Australia	Ramsu 30 m	Dibangun 2011	Tual
46	P. Kultubai Selatan	06° 49' 54" S / 134° 47' 14" T	Australia	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Tual
47	P. Karang	07° 01' 08" S / 134° 41' 26" T	Australia	Ramsu 30 m	Dibangun 2011	Tual
48	P. Enu	07° 06' 14" S / 134° 31' 19" T	Australia	Mensu 40 m	Sudah ada	Tual
49	P. Batu Goyang	06° 57' 01" S / 134° 11' 38" T	Australia	Ramsu 30 m	Dibangun 2011	Tual
50	P. Larat	07° 14' 26" S / 131° 58' 49" T	Australia	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Tual
51	P. Asutubun	08° 03' 07" S / 131° 18' 02" T	Australia		Sudah ada	Ambon
52	P. Selaru	08° 10' 17" S / 131° 07' 31" T	Australia	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Tual
53	P. Batarkusu	08° 20' 30" S / 130° 49' 16" T	Australia	Ramsu 10 m	Sudah ada	Ambon
54	P. Masela	08° 13' 29" S / 129° 49' 32" T	Australia	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Tual
55	P. Meatimiarang	08° 21' 09" S / 128° 30' 52" T	Australia	Ramsu 15 m	Sudah ada	Ambon
56	P. Leti	08° 14' 20" S / 127° 30' 52" T	Timor Leste	Mensu 40 m	Sudah ada	Ambon
57	P. Kisar	08° 06' 10" S / 127° 08' 36" T	Timor Leste	Ramsu 10 m	Sudah ada	Kupang
58	P. Wetar (Tg. Tutun Lakaio)	07° 56' 50" S / 126° 28' 10" T	Timor Leste	Mensu 40 m	Sudah ada	Kupang
59	P. Liran	08° 03' 50" S / 125° 44' 00" T	Timor Leste	Mensu 40 m	Sudah ada	Kupang
60	P. Alor (Tg. Laisumbu)	08° 13' 50" S / 125° 07' 55" T	Timor Leste	Mensu 40 m	Sudah ada	Kupang
61	P. Batek	09° 15' 30" S / 123° 59' 30" T	Timor Leste	Mensu 20 m	Sudah ada	Kupang
62	P. Dana Rote	11° 00' 36" S / 122° 52' 37" T	Australia	Ramsu 30 m	Sudah ada	Kupang
63	P. Dana Sabu	10° 50' 00" S / 121° 16' 57" T	Australia	Ramsu 30 m	Dibangun 2011	Kupang
64	P. Mangudu	10° 20' 08" S / 120° 05' 56" T	Australia	Ramsu 10 m	Sudah ada	Kupang
65	P. Sophialouisa	08° 55' 20" S / 116° 00' 08" T	Australia	Ramsu 15 m	Dibangun 2006	Benoa
66	P. Barung	08° 30' 30" S / 113° 17' 37" T	Australia	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Surabaya
67	P. Sekel	08° 24' 24" S / 111° 42' 31" T	Australia	Ramsu 30 m	Dibangun 2012	Surabaya
68	P. Panehan	08° 22' 12" S / 111° 30' 48" T	Australia	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Surabaya
69	P. Nusa Kambangan	07° 47' 05" S / 109° 03' 34" T	Australia	Mensu 40 m	Sudah ada	Cilacap
70	P. Manuk	07° 49' 11" S / 108° 19' 18" T	Australia	Ramsu 30 m	Dibangun 2006	Cilacap
71	P. Deli	07° 01' 00" S / 105° 31' 25" T	Australia	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Tg. Priok
72	P. Batu Kecil	05° 53' 45" S / 104° 26' 26" T	Laut Lepas	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Tg. Priok
73	P. Enggano	05° 31' 13" S / 102° 16' 00" T	Laut Lepas	Mensu 40 m	Sudah ada	Tg. Priok
74	P. Mega	04° 01' 12" S / 101° 01' 49" T	Laut Lepas	Mensu 30 m	Sudah ada	Teluk Bayur
75	P. Sibarubaru	03° 17' 18" S / 100° 19' 50" T	Laut Lepas	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Teluk Bayur
76	P. Sinyaunyu	01° 51' 58" S / 099° 04' 34" T	Laut Lepas	Ramsu 30 m	Sudah ada	Sibolga
77	P. Simuk	00° 05' 33" S / 097° 51' 14" T	Laut Lepas	Ramsu 10 m	Sudah ada	Sibolga
78	P. Wunga	01° 12' 47" U / 097° 04' 48" T	Laut Lepas	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Sibolga
79	P. Simeulucut	02° 31' 47" U / 095° 55' 05" T	Laut Lepas	Ramsu 10 m	Sudah ada	Sabang
80	P. Salaut Besar	02° 57' 35" U / 095° 24' 00" T	India	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Sabang
81	P. Raya	04° 52' 33" U / 095° 21' 46" T	India	Ramsu 10 m	Sudah ada	Sabang
82	P. Rusa	05° 16' 34" U / 095° 12' 07" T	India	Ramsu 10 m	Sudah ada	Sabang
83	P. Benggala	05° 47' 34" U / 094° 58' 21" T	India & Thailand	Ramsu 15 m	Dibangun 2011	Sabang
84	P. Rondo	06° 04' 30" U / 095° 06' 45" T	India & Thailand	Mensu 40 m	Sudah ada	Sabang
85	P. Berhala	03° 46' 38" U / 099° 30' 03" T	Malaysia	Mensu 10 m	Sudah ada	Belawan
86	P. Batu Mandi	02° 52' 10" U / 100° 41' 05" T	Malaysia	Mensu 40 m	Dibangun 2006	Dumai
87	P. Iyu Kecil	01° 11' 30" U / 103° 21' 08" T	Malaysia & Singapura	Ramsu 13 m	Sudah ada	Dumai
88	P. Karimun Kecil	01° 09' 59" U / 103° 23' 20" T	Malaysia	Ramsu 15 m	Dibangun 2006	Dumai
89	P. Nipa	01° 09' 13" U / 103° 39' 11" T	Singapura	Ramsu 10 m	Sudah ada	Tg. Pinang
90	P. Pelampong	01° 07' 44" U / 103° 41' 58" T	Singapura	Ramsu 15 m	Dibangun 2006	Tg. Pinang
91	P. Batu Berhenti	01° 11' 06" U / 103° 52' 57" T	Singapura	Ramsu 10 m	Sudah ada	Tg. Pinang
92	P. Nongsa	01° 12' 29" U / 104° 04' 47" T	Singapura & Malaysia	Mensu 40 m	Sudah ada	Tg. Pinang
93	Karang Unarang		Malaysia	Ramsu 20 m	Sudah ada	Tarakan

Tabel 2. Daftar Selisih SBNP dari Perpres 78 Tahun 2005 ke Perpres 6 Tahun 2017

No	NAMA	DSI	KOORDINAT	DISTRIK NAVIGASI	KETERANGAN
1	Pulau Berakit (mensu)	1110	01° 14' 10" N / 104° 34' 18" T	Tg. Pinang / Kep. Riau	Ada bangunan Mensu Tg Berakit
2	Pulau Habe	6010	08° 16' 11" S / 139° 26' 11" T	Merauke / Papua	Ada bangunan Rambu Suar
3	Pulau Komolom		08° 26' 09" S / 138° 54' 23" T	Papua	
4	Pulau Puriri		04° 54' 24" S / 136° 45' 35" T	Papua	
5	Pulau Nuhu Yut / Pulau Kei Besar		06° 00' 25" S / 132° 50' 42" T	Maluku	
6	Pulau Dana		11° 00' 36" S / 122° 52' 37" T	Kupang / NTT	Ada Rambu Suar
7	Pulau Dana		10° 50' 00" S / 121° 16' 57" T	Kupang / NTT	Ada Rambu Suar
8	Pulau Guhakolak		06° 50' 22" S / 105° 14' 20" T	Tg Priok / Banten	Hanya Pulau
9	Pulau Pagai Utara		02° 50' 14" S / 99° 59' 55" T	Teluk Bayur / Sumatera Barat	Ada bangunan Rambu Suar Tj. Pinang-pinang DSI 2910, Ramsu Sikakap DSI 2640,2, Ramsu Pugago Selat Sikakap DSI 2641,6, Ramsu Alur Pelb Pasa Puat DSI 2640,3
10	Pulau Nusa Penida		08° 49' 11" S / 115° 35' 13" T	Benoa / Bali	Ada bangunan Mensu Sedihiang DSI 4175
11	Pulau Batukolotok		07° 49' 03" S / 108° 17' 55" T	Tg Priok / Banten	Hanya Pulau
12	Pulau Karangpabayang		06° 51' 17" S / 105° 15' 44" T	Tg Priok / Banten	Hanya Pulau
13	Pulau Weh (bukan termasuk pulau terluar)		05° 53' 50" N / 95° 20' 03" T	Sabang / Aceh	Mensu Pulau Klah DSI 40, Mensu Ujung Seukee DSI 46, Mensu le Meulee DSI 10 Rambu Penimpun Ujung Lhok Mee DSI 20
14	Pulau Rupa		02° 05' 42" N / 101° 42' 30" T	Dumai / Kep. Riau	Ada bangunan Mensu Tg Medang DSI 630
15	Pulau Bengkalis		01° 31' 29" N / 102° 28' 13" T	Dumai / Kep. Riau	Ada bangunan Mensu Tg Parit DSI 632
16	Pulau Rangsang		01° 06' 04" N / 102° 58' 11" T	Dumai / Kep. Riau	Ada bangunan Ramsu Tg Ayung DSI 779
17	Pulau Bintang		01° 12' 16" N / 104° 23' 37" T	Tg. Pinang / Kep. Riau	Sedang ada pembangunan Ramsu Karang Singa
18	Pulau Malangberdaun		01° 14' 18" N / 104° 33' 57" T	Tg. Pinang / Kep. Riau	Jarak dari P. Bintang 12-15 NM

Berdasarkan daftar keterangan tabel di atas, dari 49 PPKT hanya 2 (dua) pulau yang belum ada bangunan SBNP, yaitu Pulau Komolom dan Pulau Puriri yang masuk dalam distrik Navigasi Provinsi Papua.

4. Rencana Tindak lanjut

- Sebagai bahan dalam penyusunan basis data sarana prasarana yang diintegrasikan dengan data sarpras hankam non alutsista di PPKT, pengintegrasian ini akan disusun dalam laporan penyusunan basis data PPKT dalam rangka efektivitas pengelolaan batas maritim dan PPKT;
- Pembangunan pelabuhan, dermaga/jetty akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan keberadaan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, untuk memastikan masuk atau tidaknya dalam program dan rencana Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan;

- c. Menyusun draft surat Rekomendasi Kebijakan yang ditujukan kepada Direktorat Kenavigasian untuk pembangunan menara suar di Pulau Puriri dan Pulau Komolom sebagai penanda keberadaan pulau, sebagai penentu posisi kapal, dan untuk mengetahui posisi bahaya di bawah permukaan laut dalam di wilayah perairan yang luas;
- d. BNPP menyusun rekomendasi kepada Kementerian Pertahanan untuk melakukan pemenuhan sarana prasarana pendukung sebagaimana Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan TNI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan, yang menyatakan bahwa pengamanan wilayah PPKT, Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Membangun pulau terluar strategis sebagai pangkalan militer; b. Menempatkan personel Pengamanan; c. Membangun Pos Pengamanan dan sarana prasarana pendukung dan; d. Memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

Demikian untuk menjadi pemeriksaan dan mohon arahan lebih lanjut.

SITI METRIANDA AKUAN

7. BERKAS RAPAT BASIS DATA 28 OKTOBER 2022

7.1 UNDANGAN PESERTA



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

Jl. Kebon Sirih No. 31 Jakarta Pusat-10340 Tlp. (021)3142142 Web. <https://bnpp.go.id>

Nomor : BWN.84.01/2625/X/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 21 Oktober 2022

Yth. Pejabat dalam Daftar Terlampir
di -
Jakarta

Dengan hormat dipermaklumkan bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, akan melaksanakan rapat pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Luminor Hotel Kota, Jl. Raya Mangga Besar No. 73, RT 1/RW 2, Tangki
Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
Agenda Rapat : Penyusunan Basis Data Batas Maritim Dalam Rangka Efektivitas
Pengelolaan Batas Wilayah Negara
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap kehadiran Saudara/i sebagai peserta pada rapat dimaksud dengan membawa bahan yang relevan dengan agenda rapat sesuai lingkup tugas Saudara/i, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan *Covid-19*.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rapat dapat menghubungi Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara melalui Sdri. Yori Elfitriani (HP: 0822 8587 7894).

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**DEPUTI
BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA,**



Dr. ROBERT SIMBOLON, MPA

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris BNPP, sebagai laporan.

DAFTAR PESERTA
RAPAT PENYUSUNAN BASIS DATA BATAS MARITIM DALAM RANGKA EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
JUMAT, 28 OKTOBER 2022

- 1. KEMENTERIAN PERTAHANAN**
Direktur Wilayah Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.
- 2. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
 - a. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
 - b. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
Direktur Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- 4. KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**
 - a. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Direktur Regional II, Deputy Bidang Pengembangan Regional.
- 5. BADAN KEAMANAN LAUT**
 - a. Deputy Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama;
 - b. Direktur Operasi Laut.
- 6. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**
 - a. Asisten Deputy Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara;
 - b. Fungsional Ahli Madya pada Asisten Deputy Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara;
 - c. Fungsional Ahli Muda pada Asisten Deputy Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara;
 - d. JFU pada Asisten Deputy Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara;
 - e. Staf pada Asisten Deputy Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara.

JADWAL RAPAT
PENYUSUNAN BASIS DATA BATAS MARITIM DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
BATAS WILAYAH NEGARA

Luminor Hotel Kota, Jl. Raya Mangga Besar No. 73, RT 1/RW 2, Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
 Tanggal 28 Oktober 2022

WAKTU	KEGIATAN/MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1	2	3	4
08.00 – 09.00	Check In & Registrasi		
09.00 – 09.30	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Laporan Panitia	Panitia	
09.30 – 10.00	Sambutan/Pengarahan dan Pembukaan secara Resmi	Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP	
PAPARAN DAN DISKUSI			
	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
10.00 – 10.30	Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara	1. Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kasubdit Survei dan Pemetaan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan
10.30 – 11.00	Letak dan Posisi Titik Koordinat TR di 49 PPKT	2. Komandan Pusat Hidro Oseanografi TNI AL	
11.00 – 11.30	Letak/Posisi Geografis TD di 49 PPKT Letak dan Posisi Titik Koordinat TR di 49 PPKT	3. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial	
12.00 – 12.30	Perkembangan Hasil Perundingan Batas Maritim RI	4. Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri	
12.30 – Selesai	Perumusan Kesimpulan Hasil Rapat dan Penutupan	Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP	

PANITIA PENYELENGGARA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT DAN UDARA BNPP

7.2 UNDANGAN NARASUMBER



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

Jl. Kebon Sirih No. 31 Jakarta Pusat-10340 Tlp. (021)3142142 Web. <https://bnpp.go.id>

Nomor : BWN.84.01/2626/X/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Narasumber dan Moderator

Jakarta, 21 Oktober 2022

Yth. Pejabat dalam Daftar Terlampir
di -
Jakarta

Dengan hormat dipermaklumkan bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, akan melaksanakan rapat pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Luminor Hotel Kota, Jl. Raya Mangga Besar No. 73, RT 1/RW 2, Tangki
Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
Agenda Rapat : Penyusunan Basis Data Batas Maritim Dalam Rangka Efektivitas
Pengelolaan Batas Wilayah Negara
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap kehadiran Saudara/i sebagai Narasumber dan Moderator pada rapat dimaksud dengan membawa bahan paparan terkait agenda rapat, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan *Covid-19*.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rapat dapat menghubungi Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara melalui Sdri. Yori Elfritiani (HP: 0822 8587 7894).

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**DEPUTI
BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA,**



Dr. ROBERT SIMBOLON, MPA

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris BNPP, sebagai laporan.

Lampiran I Surat Deputi I, BNPP
Nomor : BWN.84.01/2626/X/2022
Tanggal : 21 Oktober 2022

**DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT PENYUSUNAN BASIS DATA BATAS MARITIM DALAM RANGKA EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
JUMAT, 28 OKTOBER 2022**

1. NARASUMBER

- a. Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b. Komandan Pusat Hidro Oseanografi TNI AL
- c. Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri
- d. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial

2. MODERATOR

Kasubdit Survei dan Pemetaan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan

Lampiran II Surat Deputi I, BNPP
 Nomor : BWN.84.01/2626/X/2022
 Tanggal : 21 Oktober 2022

JADWAL RAPAT
PENYUSUNAN BASIS DATA BATAS MARITIM DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
BATAS WILAYAH NEGARA

Luminor Hotel Kota, Jl. Raya Mangga Besar No. 73, RT 1/RW 2, Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
 Tanggal 28 Oktober 2022

WAKTU	KEGIATAN/MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1	2	3	4
08.00 – 09.00	Check in & Registrasi		
09.00 – 09.30	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Laporan Panitia	Panitia	
09.30 – 10.00	Sambutan/Pengarahsan dan Pembukaan secara Resmi	Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP	
PAPARAN DAN DISKUSI			
	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
10.00 – 10.30	Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara	1. Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kasubdit Survei dan Pemetaan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan
10.30 – 11.00	Letak dan Posisi Titik Koordinat TR di 49 PPKT	2. Komandan Pusat Hidro Oseanografi TNI AL	
11.00 – 11.30	Letak/Posisi Geografis TD di 49 PPKT Letak dan Posisi Titik Koordinat TR di 49 PPKT	3. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial	
12.00 – 12.30	Perkembangan Hasil Perundingan Batas Maritim RI	4. Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri	
12.30 – Selesai	Perumusan Kesimpulan Hasil Rapat dan Penutupan	Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP	










PANITIA PENYELENGGARA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT DAN UDARA BNPP

7.3 DAFTAR HADIR PESERTA

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN BAHAN MASUKAN RENCANA AKSI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH LAUT DAN UDARA TA. 2024 (T-2)
BERTEMPAT DI LUMINOR HOTEL KOTA, JAKARTA BARAT, JUM'AT 28 OKTOBER 2022

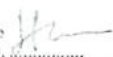







No.	N A M A	JABATAN/INSTANSI	NPWP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Budhi Yuzerman	Kasubdit Renewal Opsis Bakasud	78.931.203.0.617.000	
2	JAN L. BOY SUBURNO	KASUBDIT INFORMASI DATA BAKASUD	87.161.244.6.112.000	
3	Serta Anggar Prasetyo	APC Depati Bidker Hanney	29.249.995.1-421.000	
4	TRI Mulyono	STAF KEMERKAS	69.987.550.6.593.000	
5	Adrian Nugroho P	Staff Tasland		
6	Yusuf	Manajemen / HR	80.111.111.1.111.000	
7	S. HARAHYU	Pabancu / BAKASUD	657087443842000	
8	Harri Haris Priyanto	Dartim Mobile / BAKASUD	881682552801000	
9	Amir PW	Pusidrosal		
10	Rosa Juli Dharma	Bakasud		
11	ANDI AZIZ	Bakasud		
12	SADEK AL WIDAN	Kepu		
13	Andi Subianto	Dir PPL KKP		
14	Suroto	Sopis Makas TNI		
15	Wido H. WISNU	Andi Wido Bakti, Kendan		

No.	N A M A	JABATAN/INSTANSI	NPWP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
16	Kot Supto	Pabancu, Pusidrosal	68.439.791.2.609.000	
17	Ilham Hris	Koordinator PPKT, KKP	82.073.203.540.4.000	
18	Pelung	Pabancu 7/1. Suren TNI	41.594.473.5-411.000	
19	Zafwan M.	Pabancu Kendan	37.423.783.8-009.000	
20	Idris Satrio	PB. B. Sura Sep TNI	58.476.193.2.432.000	
21	Jul Shalaby	Ksbal Willaut, Kendan	04.905.513.9.112.000	
22	Rakso Sulmonso	Kasubdit Tani, Ditwilhan, Kendan	89.213.095.8.435.000	
23	Ardiyaning Gudi	Surveyor pemetaan. B16	66.306.100.5.642.000	
24	Muhammad Nuzul Fathoni	Surveyor pemetaan. B16	86.783.241.409.000	
25	Heru Kurniawan	Pusidrosal	46.552.101.1.541.000	
26	Bio Ardiyaning	B16		
27	Nurkhal S.L.	Dir PPL KKP		
28	Rizwan DL	Pabancu - C 2 / BAKASUD	71.485.852.2003.000	
29	Candi Jayananta Dwi A.	Kasi Tani, Ditwilhan, Kendan		
30	Stung Budi P.	Pusidrosal		
31	Maryo	Bakasud		
32	Dian Widyadati A.W	Pelidik / Jamban S Suren TNI	59.451.573.4.575.000	

No.	N A M A	J A B A T A N / I N S T A N S I	N P W P	T A N D A T A N G A N
1	2	3	4	5
33	Elli Prasetya	Kepala bagian Departemen, Pemasaran		33. 
34	IDI. MAOLITAOI	STAF TAJALUB		34. 
35	Indrasari	Staf TAJALUB, Supir		35. 
36	Esmi Indrasari			36. 
37	Annisa Rahmawati	Staf TAJALUB, BNP		37. 
38	Freto S.A. Sinurat	Staf TAJALUB BNP		38. 
39	William P. Siagian	Pemas. Marketing TAJALUB		39. 
40	EKA PUTRA	Staf TAJALUB		40. 
41	Dhuoni Adisoria	Staf asdep TAJALUB		41. 
42				42.
43				43.
44				44.
45				45.

7.4 DAFTAR HADIR NARASUMBER

DAFTAR HADIR NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT PENYUSUNAN BAHAN MASUKAN RENCANA AKSI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH LAUT DAN UDARA TA. 2024 (T-2)
BERTEMPAT DI LUMINOR HOTEL KOTA, JAKARTA BARAT, JUM'AT 28 OKTOBER 2022

No.	N A M A	J A B A T A N	A L A M A T E M A I L	N P W P	T A N D A T A N G A N
1	2	3	5	6	7
1	Sugeng Tri Hedi Wiranto	Deputi Bidkooor Hanneg Polhutan		25.119.575.0-640.000	1. 
2	KOLONEL FAJAR R	ASAMKRESAMTA PUSNIDORMA			2. 
3	Arif Fahman	Surta PPBW	arif-fahman@big.go.id	34.399 928 0-522 000	3. 
4	Sopo Dwi D	Dirren pager, kementerian			4. 
5	DAVID HASTADI	Korplaut Batas Laut			5. 
6	Riko Bahman	plh mudin kep			6. 
7	HERTO BUDI AGROHO	Ksb Batas laut, kementu			7. 
					8. 

7.5 NOTA DINAS HASIL RAPAT



BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

ASDEP PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT DAN UDARA

NOTA DINAS

Nomor:

Yth. : Bapak Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
Dari : Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara
Hal : Penyusunan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) Dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT
Tanggal :

Dengan hormat dilaporkan, menindaklanjuti menindaklanjuti surat undangan Bapak Deputy Nomor BWN.84.01/2625/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, hal Undangan Rapat dengan agenda rapat Penyusunan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) Dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Batas Maritim dan PPKT bersama ini dengan hormat dilaporkan kegrpt dimaksud telah dilaksanakan dgn hasil pelaks sbb:

1. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat 28 Oktober 2022 di Luminor Hotel Kota Jl. Raya Mangga Besar No. 73 RT 1/RW 2 Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dan dihadiri oleh para pejabat yang mewakili K/L terkait (Kemeterian Polhukam, Pushidrosal, BIG, Kemlu, Bakamla, BAIS, Bappenas.
2. Tujuan penyelenggaraan rapat adalah untuk mengintegrasikan data batas maritim dan PPKT serta mempermudah Kementerian/Lembaga dan BNPP dalam pencarian data batas maritim dan sarana prasarana di PPKT untuk koordinasi perencanaan/fasilitasi pelaksanaan pogram/kegiatan di BWN-KP, serta mendukung penguatan fungsi dan kewenangan BNPP selaku Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk dan penanganan khusus.
3. Narsum pada rapat tsbt terdiri atas :
 - Deputy Iv Bid. Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenkopulhukam Bapak Mayjen TNI Heri Wiranto;
 - Kolonel L (P) Fajar Rusdianto Aspamkersamat Danpushidrosal;
 - Arief Rahman mewakili BIG
 - Haryo Budi Nigroho mewakili Direktur HPK Kemlu. *zomm*
4. Berapa hal-hal yang disampaikan pada rapat sebagai berikut:
 - a. Asdepan taslaud menyampaikan maksud dan tujuan rapat serta penjelasan tentang design penyusunan Data base sarpras hankam non alutsista di PPKT sebagai bentuk pengintegrasian data sarpras (PTR) di PPKT

- b. Pengelolaan PPKT sebagai titik terluar (wilayah perbatasan) diarahkan agar dapat mendukung upaya pertahanan negara serta mendukung kebijakan nasional dalam pengelolaan SDA dan kepentingan ekonomi di wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga kebijakan pemenuhan sarpras di PPKT dapat terealisasi
 - c. Diperlukan sinergi K/L dalam rangka pemenuhan sarpras di PPKT sebagai kunci keberhasilan dalam upaya pelaksanaan kebijakan pengelolaan/ pembangunan di BWN-KP.
5. Berapa hal-hal yang disampaikan pada rapat sebagai berikut:
- 1. Salah satu sarpras Hankam Non Alutsista yang diidentifikasi di PPKT tidak berpenduduk dan penanganan khusus yaitu TR/PTR di 49 PPKT sebagai titik ikat best point (TD) dan sebagai dasar dalam perjanjian batas maritime Indonesia dengan 10 negara tetangga yang berbatasan laut yang keseluruhannya sebanyak 18 perjanjian perbatasan maritime Indonesia dengan negara tetangga.
 - 2. Surverfisi dan verifikasi posisi koordinat titik dasar (TD) merupakan elemen penting dalam mendukung proses perundingan batas maritime dengan negara yang belum selesai. TR sebagai titik ikat yang berada di PPKT terus dipelihara dan sangat diperlukan dalam salah satu bentuk mempertahankan eksistensi kedaulatan negara dan perlu dilakukan koordinasi lintas K/L dalam pemeliharaan TR di PPKT.
 - 3. Koordinat titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana telah didepositkan ke PBB pada tanggal 11 Maret 2009 meliputi:
 - a. Jumlah Garis Pangkal Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2008 sebanyak 193 garis pangkal;
 - b. Jumlah garis pangkal normal/biasa sebanyak 32 garis pangkal;
 - c. Jumlah garis pangkal lurus kepulauan sebanyak 161 garis pangkal;
 - d. Jumlah garis pangkal lurus kepulauan dengan panjang segmen $100 < X \leq 125$ nm sebanyak 5 segmen.
 - 4. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan 111 (seratus sebelas) PPKT diantaranya 49 PPKT tidak berpenduduk sebagai lokus koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan untuk dilakukan pemeliharaan TR/PTR di setiap PPKT. Best Point (TD) pada suatu PPKT bisa terdapat lebih dari 1 (satu) dan untuk menjadi perhatian jika TD berupa LTE/Karang tetapi diberi nama sesuai pulau terdekatnya perlu dilakukan verifikasi toponomi untuk pulau mempunyai nama lebih dari satu atau berbeda dengan penamaan di Gazetir Republik Indonesia. Langkah tindak lanjut sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) cq. Keasdepan Taslaud melaksanakan penyusunan basis data pulau-pulau kecil terluar (PPKT) dalam rangka efektivitas

pengelolaan batas maritim dan PPKT dalam pemenuhan sarpras Hankam Non alutsista (TR/PTR) di PPKT

5. Batas Maritim Indonesia dengan 10 (sepuluh) Negara tetangga merupakan Long Haul Process yang dilakukan secara teknis untuk kepentingan Indonesia, batas negara yang telah ditetapkan tidak akan berubah/diamandemen. Batas Maritim Indonesia dengan negara tetangga terbagi atas: Batas Maritim yang sudah ditetapkan; Batas Maritim yang sedang tahap perundingan, dan Batas Maritim yang ditetapkan secara Unilateral di area yang tidak tumpang tindih dengan zona maritime negara lain seperti di Samudra Hindia dan Pasifik.
6. Beberapa rekomendasi dalam FGD yaitu: pengelolaan batas maritime di wilayah Rote Ndao, wilayah perairan Natuna dan perairan Nunukan dalam pengelolaan PPKT.

Beberapa Rencana Tindak lanjut yg disepakati forum rapat :

- Hasil pertemuan FGD yang telah dilaksanakan pada tanggal 15, 26 dan 28 Oktober 2022 dengan peserta K/L sesuai dengan tanggungjawab dalam pemenuhan sarpras hankam non alutsista yang menjadi bahan program tanggungjawab masing-masing.
- K/L mendukung BNPP melakukan penyusunan basis data sarpras hankam non alutsista yang dibutuhkan di PPKT serta dukungan terkait data selanjutnya yang diperlukan untuk memperkaya basis data.
- Hasil akhir akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi program dalam mendukung K/L untuk melaksanakan pemenuhan sarpras hankam dimaksud sebagai penanggungjawab teknis untuk tahun 2023-2024.
-

Demikian beberapa hal yg dapat kami laporkan, selanjutnya mohon arahan Bapak Deputi.

SITI METRIANDA AKUAN